

Laporan Keuangan (Gabungan)

Per 31 Desember 2025
Audited

Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta



KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas otonomi pengelolaan keuangan daerah yang dimiliki Pemerintah Daerah melalui penyusunan dan pelaksanaan APBD secara otonom, maka diawali dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah, setiap Pemerintah Daerah juga diwajibkan menyusun Laporan Keuangan Akhir Tahun. Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 29 Tahun 2002 kemudian memberi pedoman pengelolaan keuangan daerah yang lebih rinci bagi Pemerintah Daerah, diantaranya pedoman mengenai pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kedua peraturan perundangan ini telah mencantumkan adanya kewajiban pemerintah daerah untuk menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berbasis Standar Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAP).

Laporan keuangan pada tingkat SKPD sebagai entitas akuntansi terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Neraca menyajikan posisi aset, posisi kewajiban, dan posisi ekuitas dana. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menerbitkan Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan, maka neraca tahun sebelumnya menjadi saldo awal bagi neraca tahun berikutnya.

Kami menyadari bahwa Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna laporan keuangan ini. Kami akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good government governance*).

Jakarta, 22 Mei 2026
Kepala Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta

Iqbal Akbarudin
NIP. 197301151998031003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR LAMPIRAN	vii
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	viii
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	viii
N E R A C A	x
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024	xviii
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	3
1.3 Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan	5
BAB II IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN.....	7
2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan	7
2.1.1 Pendapatan	8
2.1.2 Belanja	8
2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang tidak tercapai	12
2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis dan Hambatan Kinerja yang tidak tercapai	12
2.2.2 Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan dan Hambatan Kinerja yang tidak tercapai	19
BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI	24
3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah.....	24
3.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan	25
3.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan	25
3.3.1 Pendapatan-LRA.....	25
3.3.2 Belanja	27
3.3.3 Pendapatan-LO	33
3.3.4 Beban	34
3.3.5 Aset	36
3.3.6 Kewajiban.....	51
3.3.7 Ekuitas	53
3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	54

BAB IV PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN	55
4.1. Laporan Realisasi Anggaran	55
4.1.1 Pendapatan Daerah	55
4.1.1.1Pendapatan Asli Daerah	56
4.1.2 Belanja	56
4.2 Penjelasan Akun-Akun Neraca	65
4.2.1. Aset	65
4.2.2. Kewajiban	102
4.3 Laporan Operasional	108
4.3.1 Pendapatan-LO	108
4.3.1.1Pendapatan Asli Daerah	108
4.3.1.2Lain-Lain PAD yang Sah-LO	109
4.3.2 Beban	109
4.4 Laporan Perubahan Ekuitas	115
BAB V PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN	116
5.1 Struktur Organisasi	116
5.2 Visi dan Misi	119
5.3 Tugas dan Fungsi SKPD	119
5.4 Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD	121
5.5 Target Kinerja Strategis SKPD	121
5.6 Mekanisme Pembayaran Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2024	124
BAB VI	126
LAMPIRAN	127

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Ringkasan Realisasi APBD Dinas Sosial per 31 Desember 2025	7
Tabel 2. 2 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis	12
Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan	19
Tabel 3. 1 Nilai Batasan Minimal Kapitalisasi Belanja Modal menjadi Aset Tetap	28
Tabel 3. 2 Nilai Batasan Minimal Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan menjadi Aset Tetap	29
Tabel 3. 3 Pertambahan Masa Manfaat Aset yang Mengalami overhaul/renovasi/perbaikan	30
Tabel 3. 4 Masa Manfaat Aset Tetap	47
Tabel 4. 1 Rincian Realisasi Pendapatan Daerah per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024.....	56
Tabel 4. 2 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024	56
Tabel 4. 3 Rincian Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Jajaran per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024	57
Tabel 4. 4 Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025.....	58
Tabel 4. 5 Realisasi Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025.....	59
Tabel 4. 6 Rincian Realisasi Belanja Hibah per 31 Desember 2025.....	60
Tabel 4. 7 Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025	62
Tabel 4. 8 Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025.....	63
Tabel 4. 9 Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025.....	64
Tabel 4. 10 Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025	64
Tabel 4. 11 Rincian realisasi belanja modal aset lainnya per 31 Desember 2025	65
Tabel 4. 12 Aset Lancar Dinas Sosial 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	66
Tabel 4. 13 Rekening Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 31 Desember 2025 dan 2024	66
Tabel 4. 14 Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	67
Tabel 4. 15 Rincian Pengembalian Pengadaan Gas Tahun 2025.....	67
Tabel 4. 16 Rincian Pengembalian Kurang Volume Rehab Gedung Tahun 2024.....	67
Tabel 4. 17 Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	68
Tabel 4. 18 Rincian saldo Beban Barang Dibayar Dimuka 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	68
Tabel 4. 19 Rincian saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	70
Tabel 4. 20 Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	70
Tabel 4. 21 Pendapatan Hibah Persediaan Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	72
Tabel 4. 22 Rincian Barang Persediaan yang Belum Dibayar dan Dicatat	72
Tabel 4. 23 Rincian Mutasi Aset Tetap.....	73
Tabel 4. 24 Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah.....	74
Tabel 4. 25 Rincian Penambahan Aset Tetap Tanah - Transfer Masuk dari SKPD Lain.....	74
Tabel 4. 26 Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah - Transfer Keluar ke SKPD Lain	74
Tabel 4. 27 Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah - Koreksi Lebih Catat Barang.....	75
Tabel 4. 28 Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin.....	75
Tabel 4. 29 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Transfer Masuk.....	76
Tabel 4. 30 Penambahan aset tetap peralatan dan mesin – reklasifikasi antar aset tetap	77
Tabel 4. 31 Penambahan aset tetap peralatan dan mesin – kapitalisasi dari beban persediaan.....	78
Tabel 4. 32 Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Kapitalisasi dari Beban Barang.....	78
Tabel 4. 33 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Kapitalisasi dari Beban Jasa	79
Tabel 4. 34 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Transfer Keluar ke SKPD lain	80
Tabel 4. 35 Pengurangan Peralatan dan Mesin – Reklas Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	80
Tabel 4. 36 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Rekalsifikasi Aset Tetap menjadi Aset dalam Proses Penyelesaian MPSA	81
Tabel 4. 37 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Rekalsifikasi Belanja Modal tahun 2025 ke Beban Barang Tak Habis Pakai	81

Tabel 4. 38 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Reklasifikasi Belanja Modal 2025 menjadi Barang Pakai Habis.....	81
Tabel 4. 39 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Reklasifikasi Aset Tetap (selain belanja modal 2025) ke Beban Barang Tak Habis Pakai.....	82
Tabel 4. 40 Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2025) menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan).....	82
Tabel 4. 41 Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan.....	83
Tabel 4. 42 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Transfer Masuk dari SKPD lain.....	84
Tabel 4. 43 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Saldo Kas yang Dibatasi Penggunaannya	84
Tabel 4. 44 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Reklasifikasi antar Aset Tetap.....	85
Tabel 4. 45 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Reklas ke-5 Bidang Aset Tetap dari KDP	85
Tabel 4. 46 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Kapitalisasi dari Beban Jasa.....	86
Tabel 4. 47 Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	86
Tabel 4. 48 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Transfer Keluar ke SKPD Lain.....	87
Tabel 4. 49 Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	88
Tabel 4. 50 Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi.....	89
Tabel 4. 51 Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi - Reklasifikasi Antar Aset Tetap .	90
Tabel 4. 52 Rincian Mutasi Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya.....	90
Tabel 4. 53 Rincian Mutasi Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan	91
Tabel 4. 54 Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan - Kapitalisasi dari Beban Jasa	92
Tabel 4. 55 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan - Reklasifikasi antar Aset Tetap.....	92
Tabel 4. 56 Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan – reklasifikasi ke-5 bidang aset tetap dari KDP	93
Tabel 4. 57 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024.....	94
Tabel 4. 58 Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025.....	94
Tabel 4. 59 Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	94
Tabel 4. 60 Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025	95
Tabel 4. 61 Rincian Lisensi dan Franchise.....	95
Tabel 4. 62.....	96
Tabel 4. 63 Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	96
Tabel 4. 64 Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	97
Tabel 4. 65 Rincian Mutasi Aset Lainnya – Aset Rusak Berat	98
Tabel 4. 66 Penambahan Aset Rusak Berat/Usang - Transfer Masuk dari SKPD Lain.....	98
Tabel 4. 67 Penambahan Aset Rusak Berat/Usang - Reklasifikasi Aset Tetap	98
Tabel 4. 68 Pengurangan Aset Rusak Berat/Usang - Penghapusan	99
Tabel 4. 69 Nilai Buku Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	100
Tabel 4. 70 Rincian Aset MPSA	100
Tabel 4. 71 Penambahan Aset MPSA - Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset dalam Proses MPSA..	101
Tabel 4. 72 Mutasi Penambahan - Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	101
Tabel 4. 73 Nilai buku Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	102
Tabel 4. 74 Rincian Utang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	102
Tabel 4. 75 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	102
Tabel 4. 76 Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024.....	104
Tabel 4. 77 Rincian Utang Belanja Jasa TALI 31 Desember 2024.....	104
Tabel 4. 78 Rincian Utang Belanja Jasa Non TALI Tahun 2024	105
Tabel 4. 79 Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024	106
Tabel 4. 80 Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024	106

Tabel 4. 81 Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024	107
Tabel 4. 82 Pendapatan LO per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024	108
Tabel 4. 83 Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024	109
Tabel 4. 84 Rekapitulasi Beban Dinas Sosial dan Jajaran.....	110
Tabel 4. 85 Perhitungan Beban Pegawai per 31 Desember 2025	111
Tabel 4. 86 Perhitungan Beban Barang per 31 Desember 2025	111
Tabel 4. 87 Perhitungan Beban Jasa per 31 Desember 2025	112
Tabel 4. 88 Perhitungan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025	113
Tabel 4. 89 Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024	114
Tabel 4. 90 Laporan Perubahan Ekuitas.....	115
Tabel 5. 1 Target Kinerja Strategis Dinas Sosial Tahun 2025	121

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Rincian Realisasi Belanja Hibah Per 31 Desember 2025	128
Lampiran 2 : Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar per 31 Desember 2025	130
Lampiran 3 : Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2025	131
Lampiran 4 : Belanja Modal Gedung dan Bangunan 31 Desember 2025	133
Lampiran 5 : Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi 31 Desember 2025	134
Lampiran 6 : Belanja Modal Aset Tetap Lainnya 31 Desember 2025	145
Lampiran 7 : Daftar Utang Belanja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025	136
Lampiran 8 : Rincian Utang Belanja Barang Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 31 Desember 2025 dan 2024	139
Lampiran 9 : Pendapatan Hibah dari Pihak Diluar Provinsi DKI Jakarta	140
Lampiran 10 : Lain-Lain PAD yang Sah	142



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS SOSIAL

Jalan Gunung Sahari II No. 6 – Jakarta Pusat

Telp. (021) 4265115 - 4222497 – 4222498 – 4264679 - 4264678 Fax.4253639

Website : www.dinsos.jakarta.go.id email : dinsosdki@jakarta.go.id

JAKARTA

Kode Pos : 10610

**PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI DKI JAKARTA**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Iqbal Akbarudin

NIP : 197301151998031003

Jabatan : Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Unit Organisasi : Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Dengan ini menyatakan bahwa Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan jajarannya yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 31 Desember 2025 merupakan tanggung jawab saya. Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum sebagaimana tertuang dalam Standar Akuntansi Pemerintahan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Mei 2026

Kepala Dinas Sosial
Provinsi DKI Jakarta

Iqbal Akbarudin
NIP. 197301151998031003



**LAPORAN KEUANGAN DINAS
SOSIAL PROVINSI DKI JAKARTA
31 DESEMBER 2025
*AUDITED***



LAPORAN REALISASI ANGGARAN
31 DESEMBER 2025
AUDITED



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DINAS SOSIAL (GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
PENDAPATAN DAERAH					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					
Pajak Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah	4.1.1	310.000.000,00	387.550.000,00	125,02	53.150.000,00
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		310.000.000,00	387.550.000,00	125,02	53.150.000,00
PENDAPATAN TRANSFER					
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat					
Dana Perimbangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Insentif Daerah (DID)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahan Infrastruktur		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Keistimewaan		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Desa		0,00	0,00	0,00	0,00
Insentif Fiskal		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Bagi Hasil (DBH)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Alokasi Khusus (DAK)		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah					
Pendapatan Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pendapatan Transfer Antar Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH					
Pendapatan Hibah		0,00	0,00	0,00	0,00
Dana Darurat		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		310.000.000,00	387.550.000,00	125,02	53.150.000,00
BELANJA DAERAH					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	4.1.2.1.a	285.952.032.643,00	232.982.751.678,00	81,48	241.813.652.444,00
Belanja Barang dan Jasa	4.1.2.1.b	517.204.706.306,00	480.833.838.261,00	92,97	440.827.344.094,00
Belanja Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Hibah	4.1.2.1.c	2.880.000.000,00	2.780.000.000,00	96,53	1.300.000.000,00
Belanja Bantuan Sosial	4.1.2.1.d	687.308.914.085,00	661.823.321.954,00	96,29	670.772.470.000,00
Belanja Imbalan		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik BUD		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA OPERASI		1.493.345.653.034,00	1.378.419.911.893,00	92,30	1.354.713.466.538,00
BELANJA MODAL					
Belanja Modal Tanah		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.1.2.2.a	10.695.288.116,00	9.977.696.280,00	93,29	3.461.169.726,00
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.1.2.2.b	18.949.050.914,00	16.706.642.925,00	88,17	40.112.964.343,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DINAS SOSIAL(GABUNGAN)

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)					
U R A I A N	CATATAN	ANGGARAN Tahun 2025	REALISASI Tahun 2025	(%)	REALISASI Tahun 2024
Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.1.2.2.c	5.087.635.841,00	4.893.369.161,00	96,18	313.592.500,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	4.1.2.2.d	29.728.814,00	28.554.750,00	96,05	0,00
Belanja Modal Aset Lainnya	4.1.2.2.e	155.355.194,00	136.200.000,00	87,67	0,00
JUMLAH BELANJA MODAL		34.917.058.879,00	31.742.463.116,00	90,91	43.887.726.569,00
BELANJA TIDAK TERDUGA					
Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TIDAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
BELANJA TRANSFER					
Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BELANJA DAERAH		1.528.262.711.913,00	1.410.162.375.009,00	92,27	1.398.601.193.107,00
SURPLUS / (DEFISIT)		(1.527.952.711.913,00)	(1.409.774.825.009,00)		(1.398.548.043.107,00)
PEMBIAYAAN DAERAH					
PENERIMAAN PEMBIAYAAN					
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya		0,00	0,00	0,00	0,00
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penarikan Pokok Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
PENGELUARAN PEMBIAYAAN					
Pembentukan Dana Cadangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Penyertaan Modal Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo		0,00	0,00	0,00	0,00
Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembentukan Dana Abadi Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
Pembayaran Pembiayaan Utang Daerah		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN DAERAH		0,00	0,00		0,00
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berkenaan		(1.527.952.711.913,00)	(1.409.774.825.009,00)		(1.398.548.043.107,00)

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 22 Mei 2026

KEPALA DINAS SOSIAL

IQBAL AKBARUDIN
NIP. 197301151998031003



NERACA
31 DESEMBER 2025
AUDITED



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS SOSIAL (GABUNGAN)
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
<u>ASET</u>			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	4.2.1.1.1	0,00	0,00
Kas di Bendahara Penerimaan		0,00	0,00
Pendapatan yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas Penerimaan yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Asuransi yang Belum Disetor		0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran		0,00	0,00
Sisa UP		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Sisa LS		0,00	0,00
Sisa TU		0,00	0,00
Kas Tunai		0,00	0,00
Kas di Bank		0,00	0,00
Uang Panjar		0,00	0,00
Jasa Giro di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
Potongan PFK di SKPD yang Belum Disetor		0,00	0,00
PPh 21 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 22 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 23 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 26 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPN di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPn-BM di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Kesehatan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
BPJS Ketenagakerjaan di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PFK lainnya di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
PPh 15 di SKPD yang belum disetor		0,00	0,00
Kas Pengeluaran yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Kas Dana BOP		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Kas Lainnya		0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek		0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah		0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah		0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	4.2.1.1.2	188.554.600,00	172.967.951,00
Piutang Jasa Giro pada Kas Daerah		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Kas di Bendahara		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana Cadangan		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada BLUD		0,00	0,00
Piutang Jasa Giro pada Rekening Dana BOS		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS SOSIAL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Piutang Jasa Giro Dana Kapitasi pada FKTP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOK Puskesmas		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Jasa Giro pada Rekening Dana BOSP		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah Terhadap Bendahara		0,00	0,00
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		0,00	0,00
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Piutang Pendapatan dari Pengembalian		188.554.600,00	172.967.951,00
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah		0,00	0,00
Piutang Lainnya		0,00	0,00
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Uang Muka		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang/Jasa		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di SKPD		0,00	0,00
Uang Muka Pengadaan Barang dan Jasa di BLUD		0,00	0,00
Piutang Pengembalian Kelebihan Pembayaran kepada Pihak Ketiga		0,00	0,00
Bagian Lancar Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Penyisihan Piutang		0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	4.2.1.1.3	2.780.037.396,00	2.394.482.353,00
Beban Pegawai Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Barang Dibayar Dimuka	4.2.1.1.3.a	2.741.903.963,00	2.359.150.153,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka	4.2.1.1.3.b	38.133.433,00	35.332.200,00
Beban Pemeliharaan Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Beban Perjalanan Dinas Dibayar Dimuka		0,00	0,00
Persediaan	4.2.1.1.4	40.870.564.601,00	22.167.240.159,00
Barang Pakai Habis		40.847.193.709,00	22.166.894.727,00
Barang Tak Habis Pakai		23.370.892,00	0,00
Barang Bekas Dipakai		0,00	345.432,00
Aset Untuk Dikonsolidasikan		0,00	0,00
JUMLAH ASET LANCAR		43.839.156.597,00	24.734.690.463,00
INVESTASI JANGKA PANJANG			
Investasi Jangka Panjang Non Permanen			
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara		0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah		0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi		0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan		0,00	0,00
Dana Bergulir		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Non Permanen		0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen			
Penyertaan Modal		0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS SOSIAL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Investasi Dana Abadi Daerah		0,00	0,00
Jumlah Investasi Jangka Panjang Permanen		0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG		0,00	0,00
ASET TETAP			
Tanah	4.2.1.2.1	978.646.077.364,00	966.664.501.364,00
Peralatan dan Mesin	4.2.1.2.2	147.766.251.377,00	133.001.892.436,00
Gedung dan Bangunan	4.2.1.2.3	1.363.056.046.490,00	1.337.431.264.617,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.2.1.2.4	3.262.958.894,00	3.225.962.594,00
Aset Tetap Lainnya	4.2.1.2.5	2.688.598.870,00	2.641.394.120,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	4.2.1.2.6	3.177.165.187,00	11.301.308.534,00
Akumulasi Penyusutan	4.2.1.2.7	(991.671.037.243,00)	(933.655.004.577,00)
Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin		(127.703.487.944,00)	(121.902.355.448,00)
Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		(859.849.731.106,00)	(807.641.509.752,00)
Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, dan Irigasi		(1.707.544.604,00)	(1.553.229.681,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya		(2.410.273.589,00)	(2.557.909.696,00)
Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00
JUMLAH ASET TETAP		1.506.926.060.939,00	1.520.611.319.088,00
DANA CADANGAN			
Dana Cadangan		0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN		0,00	0,00
ASET LAINNYA			
Tagihan Jangka Panjang		0,00	0,00
Tagihan Penjualan Angsuran		0,00	0,00
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Disewakan		0,00	0,00
Kerja Sama Pemanfaatan		0,00	0,00
Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kekayaan Daerah yang Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	4.2.1.3.1	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Aset Lain-lain	4.2.1.3.2	77.230.763.104,00	76.580.471.535,00
Aset Rusak Berat/Usang		69.621.434.120,00	66.977.369.978,00
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Validasi		0,00	0,00
Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Aset Lain-lain di BLUD		0,00	0,00
Tuntutan Perbendaharaan yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Aset di BP THR Lokasari		0,00	0,00
Aset Lembaga di Biro Dikmental		0,00	0,00
Kas Dikonsinyasikan		0,00	0,00
Aset yang Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS SOSIAL (GABUNGAN)

N E R A C A

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Tuntutan Pengembalian UMK Pengadaan Transjakarta		0,00	0,00
Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		7.609.328.984,00	9.603.101.557,00
Tuntutan Ganti Rugi yang belum ditetapkan statusnya		0,00	0,00
Kas yang Dibatasi Penggunaannya		0,00	0,00
Uang Penjaminan Pemulihan Fungsi Lingkungan Hidup - Uang Jaminan Reklamasi		0,00	0,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Sewa		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Pemanfaatan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Bangun Guna Serah/Bangun Serah Guna (BGS/BSG)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kekayaan Daerah Yg Dipinjampakaikan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Kemitraan Dengan Pihak Ketiga-Kerjasama Penyediaan Infrastruktur		0,00	0,00
Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kerjasama Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain		(70.396.239.879,00)	(69.027.023.125,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang		(64.943.675.567,00)	(61.600.007.688,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Fasos Fasum		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Kompensasi Pelampauan Nilai Koefisien Luas Bangunan/Koefisien Dasar Bangunan (KLB/KDB)		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap - Belum Ditetapkan Statusnya		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset		(5.452.564.312,00)	(7.427.015.437,00)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah		0,00	0,00
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)		0,00	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA		6.834.523.225,00	7.553.448.410,00
PROPERTI INVESTASI			
Properti Investasi - Tanah		0,00	0,00
Properti Investasi - Gedung dan Bangunan		0,00	0,00
Properti Investasi - Jalan, Jaringan, dan Irigasi		0,00	0,00
Properti Investasi Dalam Pengerjaan		0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00
JUMLAH PROPERTI INVESTASI		0,00	0,00
JUMLAH ASET		1.557.599.740.761,00	1.552.899.457.961,00
<u>KEWAJIBAN</u>			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)		0,00	0,00
Utang Taspen		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kesehatan		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja		0,00	0,00
Utang Iuran Jaminan Kematian		0,00	0,00
Utang PPh Pusat		0,00	0,00



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS SOSIAL (GABUNGAN)
N E R A C A
PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang PPh 21		0,00	0,00
Utang PPh 21 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 21 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 22		0,00	0,00
Utang PPh 22 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 22 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 23		0,00	0,00
Utang PPh 23 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 23 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 25		0,00	0,00
Utang PPh 25 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26		0,00	0,00
Utang PPh 26 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 26 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2)		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh Pasal 4 ayat (2) Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPh 15		0,00	0,00
Utang PPh 15 di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPh 15 Dana BLUD		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN Pusat		0,00	0,00
Utang PPN di SKPD dan PPKD		0,00	0,00
Utang PPN Dana BLUD		0,00	0,00
Utang Taperum		0,00	0,00
Utang Iuran Wajib Pegawai		0,00	0,00
Utang Perhitungan Pihak Ketiga Lainnya		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Bongkar Bangunan Reklame		0,00	0,00
Utang Jaminan Penawaran		0,00	0,00
Utang Jaminan Pelaksanaan Pekerjaan		0,00	0,00
Utang Jaminan KTP Musiman		0,00	0,00
Utang Jaminan Pekerjaan Sarana Jaringan Utilitas		0,00	0,00
Utang Jaminan Sanggah Banding		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Pemerintah Daerah Lain		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank		0,00	0,00
Utang Bunga kepada Masyarakat		0,00	0,00
Utang Bunga BLUD		0,00	0,00
Utang Bunga Atas Keterlambatan Pembayaran Kelebihan Pembayaran Pajak		0,00	0,00
Utang Pinjaman Jangka Pendek		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS SOSIAL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Pinjaman dari Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang Pinjaman BLUD		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang dari Masyarakat		0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Pendek BLUD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka		0,00	0,00
Setoran Kelebihan Pembayaran Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Penjualan Produk Pemda Dari Pihak III		0,00	0,00
Uang Muka Lelang Penjualan Aset Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Pajak Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Retribusi Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Lain-lain PAD		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Sewa		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil Lelang Titik Reklame		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Guna Serah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Jasa Layanan Umum BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga- Meubelair		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Lain-lain PAD Yang Sah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bunga atas Penempatan Uang Pemerintah Daerah		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Pajak		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Umum (DAU)		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Dana Alokasi Khusus		0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka Bunga Deposito		0,00	0,00
Pendapatan Diterima di Muka BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja	4.2.2.1.1	16.966.291.997,00	19.241.582.112,00
Utang Belanja Pegawai	4.2.2.1.1.a	12.327.958.652,00	12.307.596.080,00
Utang Belanja Barang dan Jasa		4.638.333.345,00	1.484.586.477,00
Utang Belanja Barang	4.2.2.1.1.b	3.897.795.267,00	165.906.250,00
Utang Belanja Jasa	4.2.2.1.1.c	740.538.078,00	1.318.680.227,00
Utang Belanja Pemeliharaan		0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS SOSIAL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Utang Belanja Perjalanan Dinas		0,00	0,00
Utang Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		0,00	0,00
Utang Belanja Bunga		0,00	0,00
Utang Belanja Subsidi		0,00	0,00
Utang Belanja Hibah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Tanah		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.2.2.1.1.d	0,00	704.735.800,00
Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	4.2.2.1.1.d	0,00	4.674.663.755,00
Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.2.2.1.1.d	0,00	70.000.000,00
Utang Belanja Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00
Utang Belanja Tidak Terduga		0,00	0,00
Utang Belanja Bagi Hasil		0,00	0,00
Utang Belanja Bantuan Keuangan		0,00	0,00
Utang Belanja BLUD		0,00	0,00
Utang Belanja bantuan Sosial		0,00	0,00
Utang Belanja Modal Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00
Utang Kepada Pihak Ketiga di BLUD		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran PAD		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Transfer		0,00	0,00
Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah		0,00	0,00
Utang Transfer		0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Restitusi Pajak		0,00	0,00
Utang Kompensasi Pajak		0,00	0,00
Kewajiban - Penerimaan Kas yang Belum Teridentifikasi Kepemilikan		0,00	0,00
Utang Jaminan		0,00	0,00
Utang Jaminan Pajak Daerah		0,00	0,00
Utang Jaminan BLUD		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		16.966.291.997,00	19.241.582.112,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
Utang kepada Pemerintah Pusat		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)		0,00	0,00
Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)		0,00	0,00
Utang kepada Masyarakat		0,00	0,00
Kewajiban Konsesi Jasa		0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN		16.966.291.997,00	19.241.582.112,00
EKUITAS			
EKUITAS			
Ekuitas		112.770.281.204,00	138.684.244.513,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS SOSIAL (GABUNGAN)

NERACA

PER 31 DESEMBER 2025 DAN 2024

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CAT- ATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
Ekuitas untuk Dikonsolidasikan		1.427.863.167.560,00	1.394.973.631.336,00
RK PPKD Kas		1.409.774.825.009,00	1.398.548.043.107,00
RK PPKD Non Kas		18.088.342.551,00	(3.574.411.771,00)
JUMLAH EKUITAS	4.2.3	1.540.633.448.764,00	1.533.657.875.849,00
JUMLAH EKUITAS		1.540.633.448.764,00	1.533.657.875.849,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		1.557.599.740.761,00	1.552.899.457.961,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini

Jakarta, 22 Mei 2026

Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

Iqbal Akbarudin

NIP. 197301151998031003



LAPORAN OPERASIONAL
31 DESEMBER 2025
AUDITED



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
10201000 - DINAS SOSIAL (Gabungan)
LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
PENDAPATAN					
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	4.3.1.1	387.550.000,00	53.150.000,00	334.400.000,00	629,16
Pajak Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Retribusi Daerah-LO		387.550.000,00	53.150.000,00	334.400.000,00	629,16
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain PAD yang Sah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
PENDAPATAN TRANSFER-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	4.3.1.2	337.464.760,00	510.438.153,00	(172.973.393,00)	(33,89)
Pendapatan Hibah-LO		337.464.760,00	510.438.153,00	(172.973.393,00)	(33,89)
Dana Darurat-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH PENDAPATAN		725.014.760,00	563.588.153,00	161.426.607,00	28,64
BEBAN					
BEBAN OPERASI	4.3.2.1	1.357.868.005.902,00	1.351.393.024.614,00	6.474.981.288,00	0,48
Beban Pegawai		233.003.114.250,00	239.486.400.810,00	(6.483.286.560,00)	(2,71)
Beban Barang dan Jasa		460.261.569.698,00	438.621.733.804,00	21.639.835.894,00	4,93
Beban Barang		211.073.891.809,00	200.507.177.961,00	10.566.713.848,00	5,27
Beban Jasa		226.372.012.782,00	212.944.986.062,00	13.427.026.720,00	6,31
Beban Pemeliharaan		9.466.082.307,00	9.525.153.481,00	(59.071.174,00)	(0,62)
Beban Perjalanan Dinas		403.295.000,00	0,00	403.295.000,00	0,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		12.946.287.800,00	15.644.416.300,00	(2.698.128.500,00)	(17,25)
Beban Bunga		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Subsidi		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Hibah		2.780.000.000,00	1.300.000.000,00	1.480.000.000,00	113,85
Beban Bantuan Sosial		661.823.321.954,00	671.984.890.000,00	(10.161.568.046,00)	(1,51)
Beban Penyisihan Piutang		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Lain-lain		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan dan Amortisasi	4.3.2.2	62.862.295.813,00	58.571.276.009,00	4.291.019.804,00	7,33
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin		7.729.033.328,00	4.506.738.601,00	3.222.294.727,00	71,50
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan		54.592.067.068,00	53.415.713.431,00	1.176.353.637,00	2,20
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi		153.537.144,00	150.909.551,00	2.627.593,00	1,74
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya		13.440.950,00	4.000.000,00	9.440.950,00	236,02
Beban Penyusutan Aset Lainnya		374.217.323,00	493.914.426,00	(119.697.103,00)	(24,23)
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Aset Konsesi Jasa		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Penyusutan Properti Investasi		0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN TRANSFER		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bagi Hasil		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Bantuan Keuangan		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Karena Rugi Selisih kurs dalam pengelolaan Rekening Milik		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH BEBAN		1.420.730.301.715,00	1.409.964.300.623,00	10.766.001.092,00	99,24
SURPLUS / DEFISIT OPERASIONAL		(1.420.005.286.955,00)	(1.409.400.712.470,00)	(10.604.574.485,00)	0,75
NON OPERASIONAL					
SURPLUS NON OPERASIONAL-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset		0,00	0,00	0,00	0,00



AUDITED

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
10201000 - DINAS SOSIAL (Gabungan)

LAPORAN OPERASIONAL TAHUN ANGGARAN 2024

UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2025

(Dalam Rupiah)

U R A I A N	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)	KENAIKAN / (PENURUNAN)	(%)
1	2	3	4	5=3-4	6=5:4
NON OPERASIONAL					
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka		0,00	0,00	0,00	0,00
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT NON OPERASIONAL		0,00	0,00	0,00	0,00
POS LUAR BIASA					
BEBAN TAK TERDUGA		0,00	0,00	0,00	0,00
Beban Tak Terduga		0,00	0,00	0,00	0,00
JUMLAH POS LUAR BIASA		0,00	0,00	0,00	0,00
SURPLUS / DEFISIT - LO		(1.420.005.286.955,00)	(1.409.400.712.470,00)	(10.604.574.485,00)	0,75

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 22 Mei 2026
Kepala
DINAS SOSIAL

IQBAL AKBARUDIN
NIP. 197301151998031003



**LAPORAN PERUBAHAN
EKUITAS
31 DESEMBER 2025
*AUDITED***

**AUDITED****PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA****DINAS SOSIAL****LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS****UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN JUNI 2025 DAN 2024***(Dalam Rupiah)*

URAIAN	CATATAN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024 (AUDITED)
EKUITAS AWAL			
<u>Ekuitas - LO</u>			
Ekuitas - LO per 31 Desember 2024 dan 2023		138.684.244.513,00	16.749.003.371,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		1.400.344.857.718,00	1.543.010.941.511,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi		0,00	0,00
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025		1.539.029.102.231,00	1.559.759.944.882,00
<u>RK PPKD</u>			
RK PPKD per 31 Desember 2024 dan 2023		1.394.973.631.336,00	1.555.439.131.405,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun		(1.400.344.857.718,00)	(1.543.010.941.511,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025		(5.371.226.382,00)	12.428.189.894,00
JUMLAH EKUITAS AWAL		1.533.657.875.849,00	1.572.188.134.776,00
PERUBAHAN EKUITAS			
Surplus/Defisit LO		(1.420.005.286.955,00)	(1.409.400.712.470,00)
Mutasi RK PPKD		1.433.234.393.942,00	1.382.545.441.442,00
Koreksi Ekuitas		(6.253.534.072,00)	(11.674.987.899,00)
Jumlah Perubahan Ekuitas		6.975.572.915,00	(38.530.258.927,00)
EKUITAS AKHIR	4.4		
Ekuitas - LO		112.770.281.204,00	138.684.244.513,00
RK PPKD		1.427.863.167.560,00	1.394.973.631.336,00
EKUITAS AKHIR		1.540.633.448.764,00	1.533.657.875.849,00

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

JAKARTA, 22 Mei 2026,

KEPALA DINAS SOSIAL
PROVINSI DKI JAKARTA

IQBAL AKBARUDIN

NIP. 197301151998031003



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2025
AUDITED



BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Semester II Tahun 2025 sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Tahun 2025.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah maka Kepala SKPD harus menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi Anggaran menyajikan informasi mengenai realisasi pendapatan, belanja, surplus/defisit, dan pembiayaan dari suatu entitas pelaporan yang masing-masing dibandingkan dengan anggarannya dalam satu periode tertentu.

2. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu.

3. Laporan Operasional

Laporan perasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

4. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

CaLK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan, menyajikan informasi pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta semester II tahun 2025 disusun dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pemangku kepentingan (masyarakat, DPRD, lembaga pengawas, lembaga pemeriksa dan pemerintah pusat). Informasi yang dimaksud adalah informasi mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta sampai dengan Semester II tahun 2025 serta menyajikan informasi yang bermanfaat bagi pengguna dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan. Laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menyediakan informasi mengenai pendapatan, beban, belanja, surplus/defisit, aset, kewajiban, dan kenaikan/penurunan ekuitas. Informasi ini disajikan agar pengguna memiliki pengetahuan mengenai:

- a. Kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dan peraturan Perundang-undangan.
- b. Jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- c. Perubahan posisi keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mengenai kenaikan atau penurunan sebagai akibat kegiatan yang dilakukan sampai dengan 31 Desember 2025.

Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan dalam penyusunan laporan keuangan semester II Tahun 2025 menggunakan kebijakan akuntansi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun

2017 tentang kebijakan akuntansi.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia a (Lembaran Negara UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6757);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 5165);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua! Pada Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2037);
 14. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 15. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;
 16. Peraturan Gubernur Nomor 162 Tahun 2013 tentang Pedoman Penatausahaan Keuangan Daerah;
 17. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2014 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Provinsi DKI Jakarta Berbasis Akrua!;
 18. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 67 Tahun 2022;
 19. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 148 Tahun 2018 tentang

- Tata Cara Penghapusan Piutang Daerah;
20. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 154 Tahun 2018 tentang Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan;
 21. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 35 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023;
 22. Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
 23. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung;
 24. Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025 dan Rencana Aksi dalam Rangka Mempertahankan Predikat Wajar Tanpa Pengecualian.

1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai. Penyusunan CaLK Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Jajaran Semester II Tahun 2025 dibagi ke dalam enam (enam) Bab, terdiri dari:

Bab 1 : Pendahuluan

Berisi pendahuluan yang membahas maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan, landasan hukum penyusunan laporan keuangan dan sistematika penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.

Bab 2 : Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

Memuat ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan dan kendala yang dihadapi dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.

Bab 3 : Kebijakan Akuntansi

Membahas mengenai entitas pelaporan keuangan daerah, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan, basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan penerapan kebijakan

akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Bab 4 : Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

Berisi rincian dan penjelasan masing-masing pos-pos pelaporan keuangan yang terdiri dari pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana dan komponen-komponen laporan arus kas, disamping itu memuat pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya untuk entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual

Bab 5 : Penjelasan atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Berisi penjelasan atas informasi-informasi non keuangan seperti struktur organisasi, visi dan misi, tugas dan fungsi SKPD, tujuan dan sasaran strategis SKPD, target kinerja strategis SKPD, penghargaan yang diterima, dan lain-lain.

Bab 6 : Penutup

Berisi penutup yang diuraikan mengenai ikhtisar secara garis besar dari catatan atas laporan keuangan semester II Tahun 2025.



BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan

APBD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2025 ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. Pada tahun 2025 terdapat Perubahan APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, dan Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Pencapaian target kinerja keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 disajikan dalam ringkasan tabel berikut ini:

Tabel 2. 1
Ringkasan Realisasi APBD Dinas Sosial per 31 Desember 2025

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi 31 Desember 2025	%	Realisasi 31 Desember 2024
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	PENDAPATAN	310.000.000,00	387.550.000,00	125,02%	53.150.000,00
1.1	Pendapatan Asli Daerah	310.000.000,00	387.550.000,00	125,02%	53.150.000,00
1.1.1	Pendapatan Retribusi	310.000.000,00	387.550.000,00	125,02%	53.150.000,00
2	BELANJA	1.528.262.711.913,00	1.410.162.375.009,00	92,27%	1.398.601.193.107,00
2.1	Belanja Operasi	1.493.345.653.034,00	1.378.419.911.893,00	92,30%	1.354.713.466.538,00
2.1.1	Belanja Pegawai	285.952.032.643,00	232.982.751.678,00	81,48%	241.813.652.444,00
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	517.204.706.306,00	480.833.838.261,00	92,97%	440.827.344.094,00
2.1.3	Belanja Hibah	2.880.000.000,00	2.780.000.000,00	96,53%	1.300.000.000,00
2.1.4	Belanja Bantuan Sosial	687.308.914.085,00	661.823.321.954,00	96,29%	670.772.470.000,00
2.2	Belanja Modal	34.917.058.879,00	31.742.463.116,00	90,91%	43.887.726.569,00
2.2.1	Belanja Peralatan dan Mesin	10.695.288.116,00	9.977.696.280,00	93,29%	3.461.169.726,00
2.2.2	Belanja Gedung dan Bangunan	18.949.050.914,00	16.706.642.925,00	88,17%	40.112.964.343,00
2.2.3	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5.087.635.841,00	4.893.369.161,00	96,18%	313.592.500,00
2.2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.728.814,00	28.554.750,00	96,05%	-
2.2.5	Belanja Modal Aset Lainnya	155.355.194,00	136.200.000,00	87,67%	-
3	SILPA	(1.527.952.711.913,00)	(1.409.774.825.009,00)		(1.398.548.043.107,00)

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 diuraikan sebagai berikut:

2.1.1 Pendapatan

Realisasi pendapatan daerah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 sebesar Rp387.550.000,00 atau 125,02% dari target yang ditetapkan sebesar Rp310.000.000,00. Realisasi pendapatan ini terdiri dari pendapatan asli daerah berupa pendapatan retribusi daerah sebesar Rp387.550.000,00.

Persentase realisasi pendapatan daerah per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan persentase realisasi pendapatan 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 31,38%. Hal ini disebabkan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta baru dapat melakukan pungutan retribusi setelah disahkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 pada 16 Oktober 2024 sehingga pendapatan retribusi daerah yang dipungut Tahun 2024 tidak maksimal.

2.1.2 Belanja

Realisasi belanja Dinas Sosial dan Jajaran per 31 Desember 2025 adalah Rp1.410.162.375.009,00 atau sebesar 92,27% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.528.262.711.913,00. Persentase realisasi belanja tersebut mengalami penurunan jika dibandingkan dengan realisasi per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 95,75%. Realisasi belanja dinas sosial terdiri dari:

- a. Realisasi belanja operasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp1.378.419.911.893,00 atau 92,30% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.493.345.653.034,00. Realisasi belanja operasi terdiri dari:
 - 1) Realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 sebesar Rp232.982.751.678,00 atau 81,48% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp285.952.032.643,00. Persentase realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 mengalami

penurunan jika dibandingkan dengan persentase realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 96,15%. Penurunan realisasi belanja pegawai dibandingkan tahun sebelumnya terjadi karena pada tahun 2025 telah dialokasikan anggaran untuk kenaikan tunjangan tambahan penghasilan pegawai, namun hingga akhir tahun 2025 kenaikan tersebut tidak terealisasi;

2) Realisasi belanja barang dan jasa per 31 Desember 2025 sebesar Rp480.833.838.261,00 atau 92,97% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp517.204.706.306,00. Persentase realisasi belanja barang dan jasa per 31 Desember 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan persentase realisasi belanja barang dan jasa per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 96,21%. Hal ini disebabkan :

- kelengkapan dokumen pengajuan pembayaran pengadaan barang pada kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial provinsi (penyediaan paket makanan anak tanggap bencana, paket keluarga, dan paket anak) dari pihak ketiga belum memenuhi syarat untuk diproses pembayarannya. Tagihan atas kegiatan tersebut dicatat sebagai utang dan akan dibayarkan pada tahun 2026.
- Realisasi kegiatan penyelenggaraan dapur umum bencana pada 5 (lima) Suku Dinas Sosial tidak maksimal karena bencana yang terjadi tidak dapat diprediksi;
- Pelaksanaan perancangan Detail Engineering Design (DED) gedung Unit Informasi Layanan Sosial, SKKT Kampung Rawa, dan Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) Rawasari pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat tidak direalisasikan karena pihak ketiga tidak menyelesaikan pekerjaan meskipun sudah diberikan perpanjangan waktu penyelesaian pekerjaan.

- 3) Realisasi belanja hibah per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp2.780.000.000,00 atau 96,53% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.880.000.000,00. Persentase realisasi belanja hibah per 31 Desember 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan persentase realisasi belanja hibah per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 98,11%. Hal ini dikarenakan terdapat 4 yayasan penerima hibah yang tidak terealisasi anggarannya karena kelengkapan dokumen dari penerima hibah belum memenuhi syarat untuk diproses pembayarannya; dan
 - 4) Realisasi belanja bantuan sosial per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp661.823.321.954,00 atau 96,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp687.308.914.085,00. Persentase realisasi belanja bantuan sosial per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan persentase realisasi belanja bantuan sosial per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 95,85%. Hal ini dikarenakan sejak April 2025 bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar (Kartu Anak Jakarta, Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta, dan Kartu Lansia Jakarta) disalurkan setiap bulan, dengan data penerima yang telah dipadankan bersama Dinas Dukcapil dan Bank DKI. Oleh karena itu, Dinas Sosial tidak merealisasikan dana bantuan sosial kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria.
- b. Realisasi belanja modal per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp31.742.463.116,00 atau 90,91% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp34.917.058.879,00, terdiri dari :
- 1) Realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.977.696.280,00 atau 93,29% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.695.288.116,00. Persentase realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31

Desember 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan persentase realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 58,53%;

- 2) Realisasi belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp16.706.642.925,00 atau 88,17% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp18.949.050.914,00. Persentase realisasi belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan persentase realisasi belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 91,87%. Hal ini disebabkan oleh besarnya sisa anggaran hasil negosiasi pelaksanaan rehabilitasi Gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) pada Suku Dinas Sosial serta pembangunan pagar di Sekretariat Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari;
- 3) Realisasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.893.369.161,00 atau 96,18% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp5.087.635.841,00. Persentase realisasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2025 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan persentase realisasi belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 99,03%. Hal ini disebabkan oleh besarnya sisa anggaran hasil negosiasi pelaksanaan pengadaan penggantian AC sentral gedung dinas sosial;
- 4) Realisasi belanja modal aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp28.554.750,00 atau 96,05% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp29.728.814,00. Persentase realisasi belanja modal aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan persentase realisasi belanja modal aset tetap lainnya per 31

Desember 2024 yang tercatat sebesar 0,00%.

- 5) Realisasi belanja modal aset lainnya per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp136.200.000,00 atau 87,67% dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp155.355.194,00. Persentase realisasi belanja modal aset lainnya per 31 Desember 2025 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan persentase realisasi belanja modal aset lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 0,00%.

Dari data realisasi belanja maka posisi SiKPA per 31 Desember 2025 tercatat sebesar Rp1.409.774.825.009,00. Penjelasan lebih rinci masing-masing komponen LRA disajikan dalam CaLK Bab 4.

2.2 Capaian Keuangan dan Kinerja Utama dan Hambatan Kinerja yang tidak tercapai

2.2.1 Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis dan Hambatan Kinerja yang tidak tercapai

Capaian perjanjian kinerja dan Sasaran Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 2
Capaian Kinerja Keuangan dan Sasaran Strategis

Sasaran	Indikator Program	Kinerja				Kinerja Keuangan		
		Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian Kinerja	Rata-Rata Capaian (Max 100%)	Target Keuangan TW 4	Realisasi Anggaran TW 4	% Realisasi TW 4
Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	Indeks Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	4	4	100,00%	100,00%	-	-	0,00%
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial	0,9	0,92	102,22%	100,00%	19.081.680.344,00	18.065.716.015,00	94,68%
Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial Yang Berfungsi Sosial	100	100	100,00%	100,00%	1.509.181.031.569,00	1.392.096.658.994,00	92,24%
Total						1.528.262.711.913,00	1.410.162.375.009,00	92,27%

Capaian kinerja sasaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya pada Semester II Tahun Anggaran 2025 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk mewujudkan Kota yang Inklusif dengan indikator indeks kepuasan penyelenggaraan kesejahteraan sosial. Pemilihan kualitas Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dilakukan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang diperoleh dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Pelaksanaan SKM dilaksanakan pada Semester I dan Semester II Tahun 2025, dengan cakupan penilaian terhadap layanan yang diberikan pada Triwulan III (Juli–September 2025) dan Triwulan IV (Oktober–Desember 2025). Survei ini menasar berbagai kelompok penerima layanan, mulai dari Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) baik dalam panti maupun luar panti, hingga Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) seperti Karang Taruna, PSM, TKSK, dan Tagana. Dalam pelaksanaannya, pengisian survei dilakukan secara daring dan didampingi oleh petugas apabila responden mengalami keterbatasan akses atau kemampuan, sehingga tetap menjamin keterwakilan suara penerima layanan.

Berdasarkan hasil SKM Semester I dan Semester II Tahun 2025, nilai indeks kepuasan masyarakat berada pada kategori Mutu A atau kinerja pelayanan sangat baik. Capaian tersebut menunjukkan bahwa layanan yang dinilai telah mencerminkan kualitas pelayanan Dinas Sosial secara umum, baik dari sisi sikap petugas, kejelasan prosedur, maupun manfaat layanan yang dirasakan masyarakat. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa layanan yang diukur melalui SKM ini telah cukup mewakili dan menggambarkan penyelenggaraan pelayanan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta secara menyeluruh. Hambatan yang dialami dalam pengukuran kinerja adalah sebagai berikut :

- 1) Terdapat sejumlah panti yang tidak dapat dilaksanakan SKM karena karakteristik WBS tidak memungkinkan menjadi

- responden (ODGJ, ODMK, disabilitas mental/ganda, terminal/bedridden, dan balita). Dampaknya, cakupan pengukuran tidak 100%, sehingga hasil kinerja belum sepenuhnya merepresentasikan seluruh layanan Dinas Sosial;
- 2) Banyak responden tidak mampu mengisi secara mandiri (tidak bisa membaca/menulis, tidak paham gawai), pengisian SKM dilakukan dengan pendampingan ASN/tenaga ahli (meski disilang). Hal ini menimbulkan potensi bias respon dan mengurangi objektivitas persepsi yang seharusnya murni dari pengguna layanan;
 - 3) Ketergantungan pada metode daring SKM dilaksanakan secara online, sementara sebagian besar responden adalah kelompok rentan (PPKS dan PSKS) yang memiliki keterbatasan literasi digital. Ini menyebabkan ketidakseimbangan kualitas data antara responden yang mandiri dan yang didampingi;
 - 4) Unsur terendah: Jangka Waktu Pelayanan Walaupun masih dalam kategori Sangat Baik, unsur jangka waktu pelayanan merupakan nilai terendah secara agregat (Nilai Interval 3,58; NIK 89,55). Ini menunjukkan ketidaksesuaian ekspektasi penerima layanan terhadap kecepatan layanan, yang menjadi titik lemah dalam pengukuran kinerja;
 - 5) Pada Semester I dan II, ada layanan yang tidak diukur karena tidak ada kegiatan (misalnya hibah LKS di Semester I). Akibatnya, indikator kinerja tidak sepenuhnya mencerminkan keseluruhan mandat layanan;
 - 6) Nilai kinerja menurun dibanding Semester I Semester I: Nilai Interval 3,73 (NIK 93,28) Semester II: Nilai Interval 3,64 (NIK 91,04) → Terjadi penurunan konsistensi kinerja, meskipun masih dalam kategori "Sangat Baik".

b. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan indikator Indeks Partisipasi Sosial SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial memiliki capaian sebesar 102,22%. Realisasi indikator ini pada Triwulan IV Tahun 2025 mencapai 0,92 indeks dari target 0,90 indeks sebagaimana tercantum dalam e-SAKIP. Capaian tersebut dihitung dari rata-rata partisipasi enam unsur PSKS, yaitu Karang Taruna, Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS), Taruna Siaga Bencana (TAGANA), dan Pelopor Perdamaian (PORDAM). Secara rinci, kontribusi masing-masing unsur terhadap indeks adalah Karang Taruna 0,82; TKSK 0,98; PSM 0,72; LKS 1,00; TAGANA 1,00; dan PORDAM 1,00, sehingga menghasilkan indeks agregat sebesar 0,92. Capaian tertinggi berasal dari LKS, TAGANA, dan PORDAM yang telah mencapai partisipasi penuh, sedangkan PSM menjadi unsur dengan nilai terendah akibat keterbatasan penguasaan teknologi dalam pelaporan kegiatan. Meskipun demikian, secara keseluruhan indikator ini telah melampaui target dan menunjukkan peningkatan konsistensi peran aktif PSKS di tingkat provinsi. Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator ini, antara lain :

- 1) Karang Taruna mencatat indeks partisipasi sebesar 0,82, yang menunjukkan bahwa sebagian besar telah berperan aktif, namun masih menghadapi tantangan mendasar pada aspek administrasi dan kelembagaan. Banyak Karang Taruna yang belum tertib menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan, memiliki kepengurusan yang sudah tidak aktif atau sedang dalam proses peremajaan, serta rekening organisasi yang berstatus tidak aktif. Kondisi ini menghambat proses verifikasi dan penyaluran dukungan, sehingga potensi besar

Karang Taruna sebagai penggerak sosial di tingkat komunitas belum sepenuhnya dapat dioptimalkan;

- 2) Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) menunjukkan indeks partisipasi tertinggi sebesar 0,98, yang mencerminkan dedikasi dan konsistensi peran mereka di lapangan. Meski demikian, capaian ini tidak lepas dari tantangan, seperti berkurangnya jumlah personel akibat kondisi tertentu serta tingginya beban kerja pendampingan lintas program. Jika tidak diiringi dengan penambahan dukungan sumber daya dan penguatan kapasitas, kondisi ini berpotensi memengaruhi keberlanjutan kinerja TKSK di masa mendatang;
- 3) Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) mencatat indeks partisipasi sebesar 0,72, yang menjadi nilai terendah di antara seluruh unsur PSKS. Angka ini lebih mencerminkan keterbatasan dalam sistem pelaporan dibandingkan tingkat keaktifan riil di lapangan. Banyak PSM yang aktif mendampingi masyarakat, namun belum seluruhnya mampu mengakses dan mengisi sistem pelaporan secara daring, sehingga kontribusi mereka tidak sepenuhnya tercatat dan terukur;
- 4) Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) berhasil mencapai indeks partisipasi maksimal sebesar 1,00, yang menunjukkan tingkat keaktifan yang sangat baik. Walaupun demikian, masih terdapat tantangan pada aspek administrasi, khususnya dalam kelengkapan persyaratan pencairan hibah dan tata kelola lembaga. Ketidaksiapan sebagian LKS dalam memenuhi standar administrasi dapat menghambat realisasi dukungan pembiayaan dan memengaruhi keberlanjutan program pelayanan sosial;
- 5) Taruna Siaga Bencana (TAGANA) juga mencatat indeks partisipasi sebesar 1,00, yang menandakan seluruh personel

terdaftar dinyatakan aktif. Namun, angka ini belum sepenuhnya menggambarkan kompleksitas dan intensitas peran mereka di lapangan. Aktivitas TAGANA yang sangat situasional, mulai dari kesiapsiagaan hingga penanganan pascabencana, belum seluruhnya terdokumentasi secara detail dalam sistem pencatatan yang ada;

- 6) Tenaga Pelopor Perdamaian memperoleh indeks partisipasi sebesar 1,00, yang menunjukkan seluruh personel terdaftar dinyatakan aktif. Meski demikian, seperti TAGANA, peran mereka bersifat insidental dan berbasis kebutuhan konflik sosial. Banyak aktivitas penting seperti asesmen, mediasi, dan pendampingan psikososial yang belum seluruhnya terdokumentasi secara sistematis, sehingga kontribusi mereka belum sepenuhnya tercermin secara utuh dalam pengukuran kinerja formal

- c. Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial
Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial dengan indikator Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial yang Berfungsi Sosial memiliki realisasi sebesar 100,00% atau capaian sebesar 100,00% dari target sebesar 100,00%. Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh PPKS yang terdata telah memperoleh layanan dan dinilai telah mampu kembali berfungsi sosial sesuai indikator yang ditetapkan. Meskipun target telah tercapai, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian untuk menjaga konsistensi mutu layanan dan keberlanjutan capaian ke depan, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kategori Keberfungsian Sosial PPKS Dalam Panti
Kategori ini mencapai target karena WBS yang masuk ke dalam panti memperoleh pelayanan rehabilitasi sosial secara menyeluruh, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga pembinaan

berkelanjutan. Keberhasilan ini didukung oleh ketersediaan anggaran yang memadai serta sumber daya manusia yang kompeten dan sesuai dengan bidangnya. Selain itu, capaian tersebut juga didorong oleh adanya pengawasan dan monitoring berkelanjutan, koordinasi lintas unit pelayanan, serta evaluasi rutin sebagai upaya peningkatan mutu pelayanan, sehingga seluruh proses rehabilitasi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

- 2) Kategori Keberfungsian Sosial PPKS Luar Panti (Alat Bantu dan Bimbingan Sosial) Kategori ini dapat mencapai target karena Penerima Manfaat memperoleh intervensi berupa pemberian alat bantu fisik serta bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang menunjang keberfungsian mereka di lingkungan sosial. Pelaksanaan layanan ini didukung oleh ketersediaan anggaran, kompetensi SDM, serta kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan. Keberhasilan kategori ini juga ditopang oleh sistem monitoring berkelanjutan, koordinasi antar pemberi layanan, dan evaluasi program secara berkala sebagai dasar peningkatan kualitas pelayanan rehabilitasi.
- 3) Kategori Keberfungsian Sosial Korban Bencana Target keberfungsian sosial korban bencana sebesar 100,00% telah tercapai melalui pemberian bantuan yang meliputi penyediaan permukiman, sandang, tempat penampungan sementara, serta layanan dukungan psikososial di lokasi pengungsian. Keberhasilan intervensi ditandai dengan kemampuan penyintas untuk kembali menjalankan peran sosialnya, berperilaku sesuai norma lingkungan, serta memiliki motivasi untuk melanjutkan kehidupan pascabencana. Pada kategori ini juga dilakukan pengawasan, monitoring, koordinasi lintas sektor, serta evaluasi pelayanan secara berkelanjutan sebagai upaya peningkatan mutu dan efektivitas penanganan korban bencana.

2.2.2 Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan dan Hambatan Kinerja yang tidak tercapai

Penyampaian capaian kinerja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 2. 3
Capaian Kinerja Keuangan dan Program/Kegiatan

Program	Kinerja				Kinerja Keuangan		
	Target TW 4	Realisasi TW 4	Capaian Kinerja	Rata-Rata Capaian (Max 100%)	Target Keuangan TW 4	Realisasi Anggaran TW 4	Presentase Realisasi TW 2
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	4	4	100,00%	100,00%	416.000.078.779,00	352.491.134.924,00	84,73%
Program Rehabilitasi Sosial	100	99,7475	99,75%	99,75%	310.756.892.478,00	299.098.587.784,00	96,25%
Program Pemberdayaan Sosial	80	80,18%	100,23%	100,00%	19.081.680.344,00	18.065.716.015,00	94,68%
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	100	100	100,00%	100,00%	730.276.908.648,00	703.269.198.559,00	96,30%
Program Penanganan Bencana	100	99,9225	99,92%	99,92%	52.147.151.664,00	37.237.737.727,00	71,41%

Capaian kinerja program dan persentase serapan anggaran Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta beserta jajarannya pada Semester II Tahun Anggaran 2025 secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

Program ini menargetkan Indeks Kepuasan sebesar 4. Realisasi kinerja mencapai 4 atau 100 persen. Target anggaran sebesar Rp416.000.078.779. Realisasi anggaran tercatat Rp352.491.134.924 atau 84,73 persen. Selisih anggaran disebabkan keterlambatan pemeliharaan gedung dan perbedaan realisasi gaji CPNS. Hal ini menyebabkan sebagian belanja pegawai tidak terserap. Terjadi ketidaksinkronan antara perencanaan dan realisasi. Faktor kebijakan juga memengaruhi. Faktor pendukungnya adalah sistem administrasi yang berjalan baik. Regulasi internal mendukung kelancaran tugas. SDM aparatur cukup kompeten. Teknologi informasi meningkatkan efisiensi. Kendala utama adalah keterbatasan fiskal dan birokrasi. Beban kerja tinggi memengaruhi kecepatan. Penyesuaian

kebijakan memerlukan waktu. Penyederhanaan proses menjadi penting.

b. Program Rehabilitasi Sosial

Program Rehabilitasi Sosial pada Tahun 2025 ditetapkan dengan target Indeks Pencapaian SPM Rehabilitasi Sosial sebesar 100 sebagai ukuran keterpenuhan standar pelayanan dasar bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial. Realisasi kinerja yang dicapai sebesar 99,75, sehingga secara klasifikasi berada pada kategori sangat tinggi, meskipun belum mencapai nilai maksimal. Dari sisi anggaran, program ini memperoleh alokasi sebesar Rp310.756.892.478 yang bersumber dari APBD Perubahan. Realisasi anggaran mencapai Rp299.098.587.784 atau 96,25 persen, yang menunjukkan penyerapan tinggi namun masih menyisakan selisih anggaran. Perbedaan antara target dan realisasi kinerja terutama dipengaruhi oleh ketidaksinkronan antara jumlah PPKS yang direncanakan untuk dilayani dengan jumlah Warga Binaan Sosial yang benar-benar hadir dan dapat mengikuti layanan di panti maupun luar panti. Dinamika sosial seperti mobilitas WBS menyebabkan sebagian kuota tidak dapat terisi sesuai perencanaan. Selain itu, terdapat PPKS yang memerlukan waktu asesmen lebih panjang sebelum dapat ditetapkan sebagai penerima layanan. Kondisi tersebut menyebabkan target yang bersifat kuantitatif tidak selalu dapat dicapai secara penuh meskipun kualitas layanan telah memenuhi standar. Faktor pendukung utama keberhasilan program ini adalah tersedianya regulasi SPM yang jelas, standar teknis pelayanan yang baku, serta keberadaan tenaga profesional seperti pekerja sosial, instruktur, dan pendamping. Sarana prasarana panti sosial yang relatif memadai turut menunjang kelancaran layanan rehabilitasi. Koordinasi lintas sektor dengan rumah sakit, lembaga sosial, dan pemerintah wilayah juga mempercepat proses rujukan

dan penanganan klien. Selain itu, pengalaman pelaksana dalam menangani berbagai klaster PPKS memperkuat konsistensi mutu layanan. Adapun kendala utama yang masih dihadapi meliputi keterbatasan pembaruan data PPKS secara real-time dan fluktuasi jumlah WBS sepanjang tahun berjalan. Harga kebutuhan operasional yang berubah mengikuti kondisi pasar juga memengaruhi besaran realisasi anggaran. Proses asesmen yang panjang dan bersifat individual menyebabkan waktu pelayanan tidak selalu sejalan dengan rencana tahunan. Oleh karena itu, diperlukan sistem data yang lebih adaptif dan mekanisme perencanaan yang lebih fleksibel terhadap dinamika sosial.

c. Program Pemberdayaan Sosial :

Program Pemberdayaan Sosial menargetkan capaian persentase potensi SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial yang mampu melakukan pemberdayaan sosial sebesar 80 persen pada Tahun 2025. Realisasi yang dicapai adalah 80,18 persen atau 100,23 persen dari target, sehingga secara agregat telah melampaui sasaran yang ditetapkan. Dari sisi anggaran, program ini memperoleh pagu sebesar Rp19.081.680.344. Realisasi anggaran tercatat sebesar Rp18.065.716.015 atau 94,68 persen, yang menunjukkan tingkat penyerapan yang tinggi. Meskipun secara total capaian telah memenuhi target, masih terdapat ketimpangan antar komponen PSKS. Pekerja Sosial Masyarakat menunjukkan tingkat partisipasi yang lebih rendah dibandingkan TKSK, Karang Taruna, dan LKS. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan literasi digital sehingga banyak PSM tidak mengisi laporan kinerja melalui sistem daring. Di sisi lain, Karang Taruna menghadapi kendala administratif seperti kepengurusan tidak aktif, rekening dormant, dan keterlambatan laporan pertanggungjawaban. Faktor pendukung utama berasal dari kebijakan pemberian dana stimulan kepada Karang Taruna, pembinaan kelembagaan, serta kegiatan

peningkatan kapasitas TKSK. Hibah dan pembinaan terhadap LKS juga memperkuat peran lembaga sebagai mitra pemerintah. Sinergi antara Dinas Sosial, pemerintah wilayah, dan masyarakat mempercepat pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Regulasi yang jelas memberikan legitimasi terhadap peran PSKS di lapangan. Kendala yang masih dihadapi meliputi lemahnya tertib administrasi, keterbatasan SDM pendamping, serta rendahnya kemampuan teknologi sebagian PSKS. Perubahan jumlah TKSK akibat kondisi personal juga memengaruhi perencanaan anggaran. Selain itu, pelaporan manual yang belum terintegrasi memperlambat proses pemantauan kinerja. Oleh karena itu, penguatan sistem pelaporan berbasis digital menjadi kebutuhan mendesak.

d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial :

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial menargetkan persentase PPKS penerima layanan yang tepat sasaran sebesar 100 persen. Realisasi kinerja juga tercatat 100 persen, sehingga indikator tercapai secara penuh. Program ini memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp730.276.908.648. Realisasi anggaran mencapai Rp703.269.198.559 atau 96,30 persen. Meskipun kinerja tercapai, selisih penyerapan anggaran terjadi akibat dinamika data sasaran yang terus diverifikasi dan divalidasi. Proses cleansing, musyawarah kelurahan, serta verifikasi lapangan menyebabkan perubahan daftar penerima. Selain itu, transisi kebijakan nasional dari DTKS ke DTSEN menuntut penyesuaian sistem. Hal ini menimbulkan jeda antara perencanaan anggaran dan realisasi di lapangan. Faktor pendukung utama adalah pemanfaatan Regsosek dan DTKS sebagai basis data awal. Pendamping sosial berperan aktif dalam melakukan verifikasi lapangan. Koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat memperkuat ketepatan sasaran. Mekanisme penyaluran yang terstandar menjaga akuntabilitas. Kendala utama

meliputi keterbatasan sistem data nasional dan perubahan kebijakan yang cepat. Dinamika sosial ekonomi masyarakat juga memengaruhi ketepatan sasaran. Kapasitas pengelolaan data masih perlu ditingkatkan. Integrasi sistem lintas sektor menjadi prioritas.

e. Program Penanganan Bencana :

Program Penanganan Bencana menargetkan Indeks Pencapaian SPM sebesar 100 persen. Realisasi kinerja mencapai 99,92 persen. Target anggaran sebesar Rp52.147.151.664. Realisasi anggaran tercatat Rp37.237.737.727 atau 71,41 persen. Selisih kinerja terutama berasal dari mutu permakanan yang belum sepenuhnya optimal. Dinamika bencana yang tidak terduga menyebabkan perencanaan sulit diprediksi. Distribusi logistik dalam skala besar menghadapi kendala geografis. Hal ini memengaruhi konsistensi layanan. Faktor pendukungnya adalah kesiapsiagaan petugas dan jaringan relawan. Standar teknis SPM telah dipahami pelaksana. Koordinasi lintas sektor mempercepat respons. Pengalaman bencana sebelumnya meningkatkan efektivitas. Kendala utama adalah fluktuasi kebutuhan, keterbatasan rantai pasok, dan kekurangan PSKB. Keterlambatan pengadaan logistik juga memengaruhi serapan. Sistem logistik adaptif perlu diperkuat. Koordinasi lintas sektor harus ditingkatkan.



BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

BAB III

KEBIJAKAN AKUNTANSI

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi parapengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasisumber daya.

3.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas akuntansi adalah unit pada Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau diwajibkan menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan.

Entitas akuntansi mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah yang mengatur tugas pokok, fungsi setiap unit atau satuan kerja pada Pemerintah Daerah.

Entitas pelaporan adalah unit pada Pemerintahan yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan.

Laporan Keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Jajarannya merupakan gabungan dari Laporan Dinas Sosial dan 30 (delapan puluh delapan) UKPD dibawah Dinas Sosial, 22 (dua puluh dua) Panti Sosial, 1 (satu) Sekretariat Masjid Raya Hasyim Asy'hari, 1 (satu) Unit Pengelola Kawasan (UPK) Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, 1 (satu) Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, 5 (lima) Suku Dinas Wilayah dan satu entitas induk.

3.2 Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban, dan ekuitas.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan. Beban diakui pada saat timbul kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luar/asing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal realisasi anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, berarti bahwa penerimaan dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas diterima dan dikeluarkan di Rekening Kas Umum Daerah.

Dalam penyajian neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan yang berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah tanpa memperhatikan saat kas diterima / dibayar.

3.3 Basis Pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan

3.3.1 Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan rekening kas umum daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

Pengakuan pendapatan-LRA mencakup hal-hal sebagai berikut:

- a. Pendapatan kas yang diterima oleh bendahara penerimaan yang merupakan pendapatan daerah dan hingga tanggal pelaporan belum disetorkan ke RKUD, dengan ketentuan bendahara penerimaan tersebut merupakan bagian dari BUD.

- b. Pendapatan kas yang diterima SKPD dan digunakan langsung tanpa disetor ke RKUD, dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan negara/daerah.
- c. Pendapatan kas yang berasal dari hibah langsung dalam/luar negeri yang digunakan untuk mendanai pengeluaran entitas dengan syarat entitas penerima wajib melaporkannya kepada BUD untuk diakui sebagai pendapatan daerah
- d. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan. Pendapatan kas yang diterima entitas lain di luar entitas pemerintah daerah berdasarkan otoritas yang diberikan oleh BUD, dan BUD mengakuinya sebagai pendapatan.

Pendapatan-LRA diukur sebesar nilai nominal bukti penerimaan dan dicatat berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pengukuran pendapatan- LRA menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai rupiah yang diterima.

Pendapatan-LRA dikelompokkan atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD),
- b. Pendapatan Transfer,
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan-LRA disajikan dalam laporan realisasi anggaran dengan basis kas. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pendapatan-LRA, antara lain:

- a. Penerimaan pendapatan-LRA tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai pendapatan yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus;
- c. Penjelasan sebab-sebab tidak tercapainya target penerimaan pendapatan-LRA.
- d. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.2 Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas Umum Daerah.

Koreksi atas pengeluaran belanja (penerimaan kembali belanja) yang terjadi pada periode pengeluaran belanja dibukukan sebagai pengurang belanja dan akun terkait pada periode yang sama. Apabila diterima pada periode berikutnya koreksi atas pengeluaran belanja dibukukan dalam pos lain-lain pendapatan daerah yang sah-LRA dan lain-lain pendapatan daerah yang sah-LO.

Belanja diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen sumber pengeluaran yang sah. Suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja modal (nantinya akan menjadi aset tetap) jika memenuhi seluruh kriteria sebagai berikut:

- a. Umur pemakaian (manfaat ekonomi) barang yang dibeli lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Barang yang dibeli merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara.

- c. Perolehan barang tersebut untuk digunakan dan dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/ dihibahkan/ disumbangkan/ diserahkan kepada pihak ketiga; dan
- d. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan dalam Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Nilai Batasan Minimal Kapitalisasi Belanja Modal menjadi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan *)	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/ Olahraga	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
a.	Hewan	300.000
b.	Ternak	300.000
c.	Tumbuhan Pohon	300.000
d.	Tumbuhan Tanaman Hias	ekstrakomtabel
5.4	Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Jika tidak memenuhi seluruh kriteria di atas, suatu pengeluaran belanja akan diperlakukan sebagai belanja barang dan jasa.

Suatu pengeluaran belanja pemeliharaan akan diperlakukan sebagai belanja modal (dikapitalisasi menjadi aset tetap) jika pemeliharaan tersebut bukan merupakan pemeliharaan rutin tetapi merupakan rehab berat yang memenuhi seluruh kriteriahuruf a, b dan c sebagai berikut:

- a. Manfaat ekonomi atas barang/aset tetap yang dipelihara:
 - 1) bertambah ekonomis/efisien, dan/atau
 - 2) bertambah umur ekonomis, dan/atau
 - 3) bertambah volume, dan/atau
 - 4) bertambah kapasitas produktivitas.
- b. Ada perubahan bentuk fisik semula dan secara pengelolaan barang milik daerah tidak ada proses penghapusan; dan
- c. Nilai rupiah pengeluaran belanja atas pemeliharaan barang/aset tetap tersebut material/melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap sebagaimana ketentuan batasan minimal kapitalisasi aset tetap yang dijelaskan di Kebijakan Akuntansi Aset tetap sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Nilai Batasan Minimal Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan menjadi Aset Tetap

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
1	Tanah	1
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	10.000.000
2.2	Alat-alat Angkutan:	1.750.000
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	750.000
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	1.000.000
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	
	- Alat-alat Kantor	750.000
	- Alat-alat Rumah Tangga	500.000
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	1.000.000
2.7	Alat-alat Kedokteran	5.000.000
2.8	Alat-alat Laboratorium	2.500.000
2.9	Alat Keamanan	1.000.000
2.10	Alat Olahraga	250.000
3	Gedung dan Bangunan , yang terdiri atas:	

No.	Uraian	Jumlah Harga Lusin/Set/Satuan (Rp)
3.1	Bangunan Gedung	15.000.000
3.2	Bangunan Monumen	15.000.000
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , yg terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	50.000.000
4.2	Bangunan Air/Irigasi	50.000.000
4.3	Instalasi	50.000.000
4.4	Jaringan	50.000.000
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	100.000
5.2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	250.000
5.3	Hewan/Ternak dan Tumbuhan	
	a. Hewan	300.000
	b. Ternak	300.000
	Tumbuhan Pohon Tumbuhan Tanaman Hias	300.000 ekstra komtabel
5.4	d. Aset Tetap Renovasi	15.000.000
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	1

Aset tetap yang mengalami *overhaul/renovasi*/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi menjadi aset tetap, masa manfaat aset bertambah sesuai dengan tabel berikut:

Tabel 3. 3
Pertambahan Masa Manfaat Aset yang Mengalami overhaul/renovasi/perbaikan

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin			
Alat-alat Berat	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Angkutan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	2
		>25% s.d 50%	4
		>50% s.d 75%	6
		>75% s.d.100%	7
Alat-alat Pertanian/Peternakan	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	<i>Overhaul</i>	>0% s.d. 25%	1
		>25% s.d 50%	2

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kantor	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Rumah Tangga	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Studi dan Alat Komunikasi	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Kedokteran	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat-alat Laboratorium	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Keamanan	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Alat Olahraga	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d.100%	4
Gedung dan Bangunan			
Bangunan Gedung	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Bangunan Monumen	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20
Jalan, Irigasi dan Jaringan			
Jalan/Jembatan	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d.100%	20

Uraian	Jenis	Persentase Renovasi/Restorasi/Overhaul dari Nilai Perolehan (Diluar Penyusutan)	Penambahan Masa Manfaat (Tahun)
Bangunan Air/Irigasi	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Instalasi	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Jaringan	Overhaul	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
ASET TETAP DALAM RENOVASI			
Peralatan dan Mesin dalam renovasi	Overhaul	>0% s.d 25%	1
		>25% s.d 50%	2
		>50% s.d 75%	3
		>75% s.d 100%	4
Gedung dan Bangunan dalam renovasi	Renovasi	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20
Jaringan Irigasi dan Jaringan dalam renovasi	Renovasi/Overhaul	>0% s.d 25%	5
		>25% s.d 50%	10
		>50% s.d 75%	15
		>75% s.d 100%	20

Penambahan masa manfaat karena overhaul/renovasi/perbaikan yang sifatnya dapat dikapitalisasi, maksimal sesuai dengan masa manfaat ekonomi aset.

Barang yang memiliki kriteria barang “pecah belah” seperti gelas dan piring tidak diperlakukan sebagai persediaan pakai habis, tetapi dicatat sebagai barang ekstrakomptabel dengan pertimbangan barang tersebut relatif mudah tidak berfungsi karena mudah pecah atau rusak. Barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang peruntukannya dimaksudkan untuk pencadangan penggantian yang rusak (untuk pemeliharaan) diakui sebagai persediaan pakai habis (dianggarkan

sebagai belanja pakai habis). Pengadaan baru barang berupa tirai/gorden/vertical blind/sejenis yang memenuhi batas kapitalisasi diperlakukan sebagai aset tetap (dianggarkan sebagai belanja modal). Barang berupa flashdisk/usb/sejenis yang belum digunakan diperlakukan sebagai persediaan pakai habis (belanja bahan pakai habis), dengan pertimbangan bahwa barang tersebut relatif mudah hilang. Tumbuhan/tanaman hias yang dicadangkan untuk pemeliharaan taman diperlakukan sebagai persediaan (belanja barang dan jasa).

3.3.3 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait atau pada saat pendapatan terealisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO diklasifikasikan menurut sumber pendapatan dan dikelompokkan menurut asal dan jenis pendapatan, yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD)-LO, Pendapatan Transfer- LO, Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO, Surplus Non Operasional- LO, dan Pendapatan Luar Biasa-LO.

Pendapatan-LO berbasis akrual diakui pada saat:

- a. Timbulnya hak atas pendapatan, yaitu saat diterbitkannya Surat Ketetapan atas pendapatan terkait;
- b. Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.

Pendapatan-LO secara umum dicatat:

- a. Sebesar nilai nominal pada Bukti Penerimaan atau SKPD atau dokumen ketetapan lainnya yang belum dilunasi pada saat penyusunan laporan keuangan;

- b. Sebesar estimasi nilai wajar barang/jasa yang diterima untuk pendapatan-LO yang diperoleh dari hibah.

Pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan pendapatan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Dalam hal besaran pengurang terhadap pendapatan-LO bruto (biaya) bersifat variabel terhadap pendapatan dimaksud dan tidak dapat diestimasi terlebih dahulu dikarenakan proses belum selesai, maka asas bruto dapat dikecualikan. Pendapatan yang diakui setelah diterbitkannya surat ketetapan akan dicatat sebesar nilai nominal yang tercantum di dalam surat ketetapan dimaksud. Surat ketetapan sebagaimana dimaksud dapat berupa ketetapan pajak/retribusi, Perpres tentang DAU, SK Menteri Keuangan tentang Dana Bagi Hasil, SK Gubernur tentang Bagi Hasil ke Kabupaten/Kota dan sebagainya. Pendapatan - LO disajikan dalam Laporan Operasional (LO) sesuai dengan klasifikasi dalam Bagan Akun Standar (BAS). Rincian dari Pendapatan dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan klasifikasi sumber pendapatan.

Hal-hal yang harus diungkapkan dalam CaLK terkait dengan Pendapatan-LO adalah:

- a. Penerimaan Pendapatan-LO tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran.
- b. Penjelasan mengenai Pendapatan-LO yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus.
- c. Informasi lainnya yang dianggap perlu.

3.3.4 Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas. Beban dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban diakui pada saat:

- a. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat terdapat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan, berlalunya waktu. Contohnya adalah penyisihan piutang, penyusutan aset tetap, dan amortisasi aset tidak berwujud.
- b. Terjadinya konsumsi aset, yaitu:
- 1) pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban (Contohnya pembayaran gaji pegawai, pembayaran perjalanan dinas, pembayaran hibah); dan/atau
 - 2) konsumsi aset nonkas dalam kegiatan operasional pemerintah daerah (Contohnya penggunaan persediaan).
- c. Timbulnya kewajiban, yaitu saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tanpa diikutikeluarnya kas dari kas umum daerah. Timbulnya kewajiban antara lain diakibatkan penerimaan manfaat ekonomi dari pihak lain yang belum dibayarkan atau akibat perjanjian dengan pihak lain atau karena ketentuan peraturan perundang-undangan. Contohnya adalah diterimanya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi dan dikelompokkan berdasarkan jenis beban yang terdiri dari Beban Operasi-LO: Beban Pegawai, Beban Barang Dan Jasa, Beban Bunga, Beban Subsidi, Beban Hibah, Beban Bantuan Sosial, Beban Penyisihan Piutang, Dan Beban Lain-Lain; Beban Penyusutan Dan Amortisasi.
- Beban disajikan dalam Laporan Operasional (LO). Rincian dari Beban dijelaskan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menerapkan penyusutan aset dan amortisasi aset tidak berwujud sejak Tahun 2015, dengan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016

tentang Penyusutan Aset Tetap Pertama Kali dan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud.

Koreksi atas beban, termasuk penerimaan kembali beban, yang terjadi pada periode beban dibukukan sebagai pengurang beban pada periode yang sama. Apabila koreksi terjadi pada periode berikutnya, setelah laporan keuangan audited terbit, koreksi atas beban dibukukan sebagai pendapatan lain-lain. Dalam hal mengakibatkan penambahan beban dilakukan dengan pembetulan pada akun ekuitas.

Beban yang sifatnya tidak rutin dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional. Termasuk dalam beban dari kegiatan non operasional antara lain beban penjualan aset non lancar, beban penyelesaian kewajiban jangka panjang, dan beban dari kegiatan non operasional lainnya. Sedangkan pengeluaran yang terjadi akibat pembelian barang yang tidak dikapitalisasi sebagai aset tetap diakui sebagai beban barang.

3.3.5 Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh DKI Jakarta maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum.

Aset diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, atau pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah. Pengukuran aset adalah sebagai berikut:

- a. Kas dicatat sebesar nilai nominal;
- b. Piutang dicatat sebesar nilai nominal;

c. Persediaan dicatat sebesar:

- 1) Biaya Perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Harga Pokok Produksi apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar dan Aset Nonlancar, dengan penjelasan sebagai berikut:

3.3.5.1 Aset Lancar

a. Aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika:

1. diharapkan segera direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan, atau
2. berupa kas dan setara kas.

Semua aset selain yang termasuk dalam (a) dan (b), diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

b. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Pada pos kas dan setara kas berdasarkan peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2017, kas di kas daerah sekurang-kurangnya harus mengungkapkan saldo kas di rekening penampungan. Saldo rekening penampungan merupakan jumlah belanja yang sudah dipertanggungjawabkan namun belum dilakukan pemindahbukuan ke rekening pihak ketiga (outstanding check). Informasi tentang hal tersebut cukup diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Pos-pos investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka 3 (tiga) sampai 2 (dua belas) bulan, surat berharga yang mudah diperjualbelikan. Pos-pos piutang antara lain piutang pajak, retribusi, denda,

- bagian lancar penjualan angsuran, bagian lancar tuntutan gantirugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
- c. Kas adalah uang tunai yang setiap saat dapat ditarik dan digunakan untuk melakukan pembayaran dan membiayai kegiatan pemerintah daerah. Kas juga dapat berupa saldo simpanan di bank yang sangat likuid yang siap dijabarkan/dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan.
- d. Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Dinas Sosial dan/atau hak Dinas Sosial yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan Perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
- Piutang diakui pada saat timbulnya hak tagih antara lain karena adanya tunggakan pungutan pendapatan, dan perikatan serta transaksi lainnya yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan. Secara umum, pengukuran piutang dicatat sebesar nilai nominal atas SKPD/dokumen ketetapan lainnya/naskah perjanjian yang belum dibayar sampai dengan akhir tahun berjalan.
- e. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud mendukung kegiatan operasional Dinas Sosial atau

diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan dalam kondisi sudah tidak layak pakai/usang/rusak/ sejenisnya tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, persediaan juga diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaan berpindah. Pada akhir periode akuntansi, persediaan diakui sebesar jumlah persediaan yang ada di gudang Dinas Sosial dan catatan persediaan disesuaikan dengan hasil inventarisasi fisik (stock opname).

Barang persediaan yang ada pada unit pengguna (bidang, bagian, sub bidang, sub bagian) dengan pertimbangan jumlahnya tidak material diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan, kecuali jika jumlahnya material diakui sebagai persediaan.

Persediaan dicatat di neraca berdasarkan:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;
- 2) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

Persediaan dicatat dengan menggunakan metode

perpetual. Pada akhir periode pelaporan, jika terdapat perbedaan/selisih kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik, disesuaikan sebagai pengurang persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Inventarisasi fisik atas pencatatan dengan metode perpetual dilakukan untuk menilai keandalan sistem pengendalian internal atas persediaan, dan tidak dimaksudkan untuk menentukan jumlah persediaan pada akhir tahun. Contohnya adalah persediaan *bufferstock* bencana. Dalam metode perpetual, pengukuran pemakaian persediaan dihitung berdasarkan catatan jumlah unit yang dipakai dikalikan dengan nilai per unit sesuai metode penilaian yang digunakan. Persediaan dicatat dengan menggunakan metode perpetual.

Dalam pencatatan dengan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dinilai:

- 1) Persediaan dinilai dengan menggunakan metode sistematis FIFO untuk persediaan yang memiliki nilai satuan yang material, seperti aki kendaraan dan ban kendaraan.
- 2) Persediaan dapat dinilai dengan menggunakan harga pembelian terakhir apabila setiap unit persediaan nilainya tidak material dan bermacam-macam jenis, seperti ATK.

3.3.5.2 Aset Tetap

- a. Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan serta tidak untuk dijual/dihibahkan/disumbangkan/ diserahkan kepada

pihak ketiga dan/atau merupakan objek pemeliharaan atau barang tersebut memerlukan ongkos/biaya untuk dipelihara.

b. Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaandalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan meliputi:

1) Tanah

2) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri atas:

- alat-alat berat
- alat-alat angkutan
- alat-alat bengkel dan alat ukur
- alat-alat pertanian/peternakan
- alat-alat kantor dan rumah tangga
- alat studio dan alat komunikasi
- alat-alat kedokteran
- alat-alat laboratorium
- alat keamanan

3) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri atas:

- bangunan gedung
- bangunan monumen

4) Jalan, irigasi dan jaringan, yang antara lain terdiri atas:

- jalan dan jembatan
- bangunan air/irigasi
- instalasi
- jaringan

5) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri atas:

- buku dan perpustakaan
- barang bercorak kesenian/kebudayaan
- hewan/ternak dan tumbuhan

- aset tetap-renovasi

6) konstruksi dalam pengerjaan

b. Penilaian Aset Tetap

Barang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya diukur berdasarkan biaya perolehan. Bila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset tersebut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh, dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Komponen biaya Aset Tetap yang dinilai berdasarkan biaya perolehan yang terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan;
- 2) Biaya yang dapat diatribusikan langsung dan dibutuhkan seperti biaya perencanaan, biaya lelang, biaya pengawasan dan/atau biaya lainnya, yang diperoleh secara gabungan untuk beberapa unit aset tetap induk, maka dilakukan kapitalisasi dengan diatribusikan secara proporsional berdasarkan nilai beli atau konstruksi masing-masing aset tetap induk atau dengan metode teknik lain yang andal berupa identifikasi langsung ke aset tetap induk berdasarkan data/perhitungan teknis;
- 3) Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan,

pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut, jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan;

- 4) Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan;
- 5) Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak;
- 6) Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai;
- 7) Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai;

- 8) Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya aset tetap sepanjang biaya tersebut, tidak dapat didistribusikan secara langsung pada biaya perolehan aset atau membawa aset ke kondisi kerjanya. Demikian pula biaya permulaan (start-up cost) dan pra-produksi serupa tidak merupakan bagian biaya suatu aset kecuali biaya tersebut perlu untuk membawa aset ke kondisi kerjanya;
- 9) Biaya perolehan suatu aset yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli;
- 10) Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian.

Jika suatu belanja modal/aset tetap tidak memenuhi batas kapitalisasi dicatat sebagai ekstrakomtabel dan diungkapkan dalam CaLK.

3.3.5.3 Konstruksi Dalam Pengerjaan

- a. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, serta aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu tertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari satu periode akuntansi.

b. Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung satu sama lain dalam hal rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. Kontrak seperti ini misalnya konstruksi jaringan irigasi. Kontrak konstruksi dapat meliputi:

- 1) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;
- 2) Kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;
- 3) Kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung dengan pengawasan konstruksi aset yang meliputi manajemen konstruksi dan *value engineering*;
- 4) Kontrak untuk membongkar atau merestorasi aset dan restorasi lingkungan.

c. Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan, suatu bendaberwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masayang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan
- 3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan

untuk operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atau dimanfaatkan oleh Masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut initerpenuhi:

- 1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan
- 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehannya.

d. Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi:

- 1) Rincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya;
- 2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya.
- 3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan;
- 4) Uang muka kerja yang diberikan;
- 5) Uang Jaminan/Retensi;
- 6) KDP yang dihentikan pembangunannya secara sementara atau permanen.

3.3.5.4 Penyusutan Aset

- a. Penyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan dapat menggambarkan manfaat ekonomik atau

kemungkinan jasa (service potensial) yang akan mengalir ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Nilai Penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai beban penyusutan dan dicatat pada Akumulasi Penyusutan Aset Tetap sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap. Penyusutan diperlakukan sebagai beban operasional/beban penyusutan dan dilaporkan dalam Laporan Operasional.

- b. Perhitungan penyusutan menggunakan pendekatan tahunan. Penyusutan dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (straight line method).

- c. Tabel Masa Manfaat (umur ekonomis) Aset tetap:

Tabel 3. 4
Masa Manfaat Aset Tetap

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	Tanah	Tidak Disusutkan
2	Peralatan dan Mesin , terdiri atas:	
2.1	Alat-alat Berat	8
2.2	Alat-alat Angkutan	8
2.3	Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	8
2.4	Alat-alat Pertanian/Peternakan	5
2.5	Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	5
2.6	Alat Studio dan Alat Komunikasi	5
2.7	Alat-alat Kedokteran	5
2.8	Alat-alat Laboratorium	5
2.9	Alat Keamanan	5
2.10	Alat Olahraga	5
3	Gedung dan Bangunan , yg terdiri atas:	
3.1	Bangunan Gedung	20
3.2	Bangunan Monumen	20
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan , terdiri atas:	
4.1	Jalan dan Jembatan	20
4.2	Bangunan Air/Irigasi	20
4.3	Instalasi	20
4.4	Jaringan	20
5	Aset Tetap Lainnya , yang terdiri atas:	
5.1	Buku dan Perpustakaan	Tidak disusutkan
5.2	Alat Peraga Pendidikan	5
5.3	Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/Olahraga	5

No.	Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
5.4	Hewan/Ternak dan Tumbuhan a. Hewan b. Ternak c. Tumbuhan Pohon d. Tumbuhan Tanaman Hias	Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan Tidak Disusutkan
5.5	Aset tetap - renovasi	Masa kerjasama atau masa umur ekonomis, mana yang lebih pendek
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Tidak Disusutkan

- d. Untuk penyusutan atas Aset Tetap-Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*whichever is shorter*) antara masa manfaat aset dengan masa pinjaman/sewa
- e. Penyusutan atas aset tetap mulai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2015.
- f. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
- g. Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya dalam neraca berupa Aset Kemitraan Dengan Pihak Ketiga dan aset yg sementara waktu tidak dimanfaatkan (Aset Idle) disusutkan sebagaimana layaknya Aset Tetap.
- h. Penyusutan tidak dilakukan terhadap Aset Tetap yang direklasifikasikan sebagai Aset Lainnya berupa:
 - 1) Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber yang sah dan telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusannya; dan
 - 2) Aset Tetap dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola

Barang untuk dilakukan penghapusan.

3.3.5.5 Amortisasi Aset

- a. Amortisasi adalah penyusutan terhadap aset tidak berwujud yang dialokasikan secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi dilakukan untuk ATB yang memiliki masa manfaat terbatas.
- b. Aset Tidak Berwujud diamortisasi dengan metode garis lurus dengan masa manfaat 5 (lima) tahun, kecuali masa manfaat aset tidak berwujud ditetapkan dalam dokumen perolehan aset tidak berwujud. Perhitungan amortisasi menggunakan pendekatan tahunan. Amortisasi dapat dihitung satu tahun penuh meskipun baru diperoleh satu atau dua bulan atau bahkan dua hari.
- c. Amortisasi dilakukan pada tahun diperolehnya aset tak berwujud. Aset Tidak Berwujud dengan masa manfaat tidak terbatas tidak boleh diamortisasi. Masa manfaat suatu aset tidak berwujud yang tidak diamortisasi harus ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah kejadian atau keadaan dapat terus mendukung masa manfaat aset tetap tak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat yang muncul dari tak terbatas menjadi terbatas harus dibukukan dan nilai aset tak berwujud tersebut harus disesuaikan nilainya untuk mencerminkan perubahan tersebut.
- d. Aset Tidak Berwujud disajikan di neraca berdasarkan nilai bruto setelah dikurangi amortisasi.
- e. Kebijakan ini hanya menyajikan masa manfaat Aset Tidak Berwujud berupa software dengan masa

manfaat 5 Tahun. Apabila di kemudian hari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki aset tidak berwujud selain software, akan diatur kemudian oleh PPKD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

3.3.5.6 Aset Lainnya

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Termasuk dalam aset lainnya adalah:

- a. Tagihan tuntutan ganti kerugian daerah;
- b. Kemitraan dengan pihak ketiga;
- c. Aset tidak berwujud;
- d. Aset lain-lain.

3.3.5.7 Pengakuan Penghentian/Penghapusan Aset

- a. Aset tetap yang dilepaskan melalui penjualan, dikeluarkan dari neraca pada saat diterbitkan risalah lelang dan SK Penghapusan atau dokumen penjualan sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan.
- b. Apabila aset tetap yang dihentikan dari penggunaannya dan tidak memenuhi definisi aset tetap, maka harus dipindahkan ke pos aset lain-lain sesuai dengan nilai yang tercatat, misalnya aset rusak berat.
- c. Untuk pelepasan semua peralatan pertanian, rumah tangga, alat studio dan komunikasi serta kedokteran dapat dilakukan penghapusan secara berkala setelah 5 tahun dari sejak diperoleh.
- d. Peralatan yang rusak/hilang dapat dilakukan pelepasan setelah dilakukan pemeriksaan fisik dengan berita acara dan pada saat diterbitkan SK Penghapusan.

- e. Pelepasan untuk hewan dapat dilakukan jika hewan tersebut mati, dijual, tukar menukar dan hilang yang disertai berita acara.
- f. Item persediaan tertentu yang masa manfaatnya kadaluarsa dihapus.

3.3.6. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, kewajiban kepada masyarakat luas yaitu kewajiban tunjangan, kompensasi, ganti rugi, kelebihan setoran pajak dari wajib pajak, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan Perundang-undangan.

Kewajiban diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

1. Kewajiban Jangka Pendek

- a. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Kewajiban jangka pendek dapat dikategorikan dengan cara yang sama seperti aset lancar. Beberapa kewajiban jangka pendek,

seperti utang bunga, utang belanja, pendapatan diterima di muka, utang kepada pegawai dan Kewajiban jangka pendek lainnya Misalnya kewajiban lancar lainnya merupakan kewajiban lancar yang tidak termasuk dalam kategori yang ada. Utang Jangka Pendek Lainnya meliputi antara lain Utang Kelebihan Pembayaran PAD, Utang Kelebihan Pembayaran Transfer, Utang Kelebihan Pembayaran Lain-Lain Pendapatan yang Sah, Utang Transfer dan Utang JangkaPendek Lainnya.

2. Kewajiban Jangka Panjang

- a. Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12(dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- b. Kewajiban jangka panjang pemerintah daerah terdiri dari utang luar negeri, utang dalam negeri dan utang jangka panjang lainnya.

3. Pengukuran Kewajiban

- a. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya, seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian dikarenakan perubahan kurs valuta asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.
- b. Utang kepada Pihak Ketiga terjadi pada saat pemerintah menerima hak atas barang dalam perjalanan yang telah menjadi haknya, pemerintah harus mengakui kewajiban atas jumlah yang belum dibayarkan untuk barang tersebut. Jumlah kewajiban yang disebabkan transaksi antar unit pemerintahan harus dipisahkan dengan kewajiban kepada unit non pemerintahan.
- c. Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

- d. Utang Pajak dicatat sebesar saldo penerimaan pajak oleh Bendahara Pengeluaran di SKPD/UKPD yang belum disetorkan ke Kas Negara sampai akhir periode pelaporan.
- e. Utang telepon, air, listrik dan Internet (TALI) dicatat berdasarkan laporan tagihan dari pihak pengelola TALI kepada SKPD/UKPD.
- f. Bagian Lancar Hutang Jangka Panjang dicatat sebesar jumlah yang akan jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- g. Utang Jangka Pendek Lainnya dicatat sesuai dengan karakteristik masing-masing pos tersebut.

3.3.7. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos- pos:

- a. Ekuitas awal;
- b. Surplus/defisit-LO pada periode bersangkutan;
- c. Koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan oleh perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan mendasar, misalnya:
 - 1) koreksi kesalahan mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya;
 - 2) perubahan nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap.
 - 3) Ekuitas Akhir.

3.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Penyusunan pos-pos laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Semester I tahun 2025 menggunakan basis akrual yang mengacu kepada kebijakan akuntansi berdasarkan ketentuan yang diatur Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Penyajian informasi pada laporan keuangan ini tentunya belum sempurna, namun dicoba untuk disajikan dengan hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan peraturan Perundang-undangan, dengan tujuan untuk memenuhi pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan daerah sesuai dengan amanat yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka dilakukan perbaikan melalui media "*adjustment*" atau jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan "*auditable*" sehingga dapat dilakukan pemeriksaan mengenai kewajaran laporan keuangan.



BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

BAB IV

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

Penyajian laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Semester I tahun 2025 mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah konsolidasi dari laporan keuangan UKPD dan UPT sebagai entitas akuntansi, sebagaimana diatur dalam Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 810 Tahun 2024 tentang Entitas Akuntansi dan Entitas Akuntansi Penggabung. Penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sepenuhnya disajikan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

4.1. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Unsur Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan yang dicatat berdasarkan basis kas.

4.1.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi pendapatan daerah Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp310.000.000,00 dengan realisasi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp387.550.000,00 atau 125,02% dari target. Rincian pendapatan daerah pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1
Rincian Realisasi Pendapatan Daerah
per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Target Tahun 2025	Realisasi 31 Desember 2025	%	Realisasi 31 Desember 2024
1	Pendapatan Daerah	310.000.000,00	387.550.000,00	125,02%	53.150.000,00
	Pendapatan Asli Daerah	310.000.000,00	387.550.000,00	125,02%	53.150.000,00

4.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah per 31 Desember 2025 bersumber dari pendapatan retribusi sebesar Rp387.550.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 2
Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Target Tahun 2025	Realisasi per 31 Desember 2025	%	Realisasi 31 Desember 2024
	Pendapatan Retribusi Daerah	310.000.000,00	387.550.000,00	125,02%	53.150.000,00
1	Penggunaan Ruang pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	130.000.000,00	141.050.000,00	108,50%	21.650.000,00
2	Penggunaan Ruang pada Sekretariat Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari	180.000.000,00	246.500.000,00	136,94%	31.500.000,00

Pendapatan retribusi pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta merupakan pendapatan atas penggunaan ruang pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Sekretariat Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari.

4.1.2 Belanja

Belanja Dinas Sosial Provinsi dan Jajarannya tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp1.528.262.711.913,00 Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.410.162.375.009,00 atau 92,27% dengan demikian sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp118.100.336.904,00 atau 7,73%. Apabila persentase realisasi belanja per 31 Desember 2025 tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 95,75%, maka realisasi per 31 Desember 2025 mengalami penurunan sebesar 3,48%. Realisasi belanja Dinas Sosial dan Jajaran per 31 Desember 2025 dan 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 3
Rincian Realisasi Belanja Dinas Sosial dan Jajaran per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Anggaran Tahun 2025	Realisasi 31 Desember 2025	%	Realisasi 31 Desember 2024
1	2	3	4	5 (4:3)	6
1	BELANJA	1.528.262.711.913,00	1.410.162.375.009,00	92,27%	1.398.601.193.107,00
1.1	Belanja Operasi	1.493.345.653.034,00	1.378.419.911.893,00	92,30%	1.354.713.466.538,00
1.1.1	Belanja Pegawai	285.952.032.643,00	232.982.751.678,00	81,48%	241.813.652.444,00
1.1.2	Belanja Barang dan Jasa	517.204.706.306,00	480.833.838.261,00	92,97%	440.827.344.094,00
1.1.3	Belanja Hibah	2.880.000.000,00	2.780.000.000,00	96,53%	1.300.000.000,00
1.1.4	Belanja Bantuan Sosial	687.308.914.085,00	661.823.321.954,00	96,29%	670.772.470.000,00
1.2	Belanja Modal	34.917.058.879,00	31.742.463.116,00	90,91%	43.887.726.569,00
1.2.1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.695.288.116,00	9.977.696.280,00	93,29%	3.461.169.726,00
1.2.2	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	18.949.050.914,00	16.706.642.925,00	88,17%	40.112.964.343,00
1.2.3	Belanja Modal Jalan dan Irigasi	5.087.635.841,00	4.893.369.161,00	96,18%	313.592.500,00
1.2.4	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	29.728.814,00	28.554.750,00	96,05%	0,00
1.2.5	Belanja Modal Aset Lainnya	155.355.194,00	136.200.000,00	87,67%	0,00

Realisasi belanja per 31 Desember 2025, dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.1.2.1 Belanja Operasi

Belanja operasi Dinas Sosial dan Jajarannya meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja operasi tahun anggaran 2025 dianggarkan Rp1.493.345.653.034,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp1.378.419.911.893,00 atau sebesar 92,30% dengan demikian sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp114.925.741.141,00 atau 7,70%. Apabila persentase realisasi belanja operasi per 31 Desember 2025 tersebut dibandingkan dengan persentase realisasi belanja operasi per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 96,02%, maka terdapat penurunan realisasi sebesar 3,72%.

Penjelasan lebih lanjut realisasi belanja operasi per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp285.952.032.642,00. realisasi belanja pegawai sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp232.982.751.678,00 atau 81,48%. Anggaran belanja pegawai belum terealisasi sebesar Rp52.969.280.965,00 atau 18,52% dikarenakan pada tahun 2025 telah dialokasikan anggaran untuk kenaikan tunjangan tambahan penghasilan pegawai, namun hingga akhir tahun 2025 kenaikan tersebut tidak terealisasi. Apabila persentase realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 tersebut dibandingkan dengan persentase realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 96,15%, terdapat penurunan realisasi 14,68%. Rincian realisasi belanja pegawai per 31 Desember 2025 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. 4
Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	283.659.934.556,00	231.611.709.806,00	81,65%
	Belanja Gaji Pokok PNS	33.673.834.128,00	30.434.994.720,00	90,38%
	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	3.204.000.612,00	2.574.758.541,00	80,36%
	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	1.143.121.000,00	704.480.000,00	61,63%
	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	628.155.875,00	567.150.000,00	90,29%
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	1.232.403.625,00	1.133.975.000,00	92,01%
	Belanja Tunjangan Beras PNS	1.943.364.945,00	1.512.636.540,00	77,84%
	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	32.602.308.546,00	25.852.836.295,00	79,30%
	Belanja Pembulatan Gaji PNS	762.484,00	334.665,00	43,89%
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	10.237.509.174,00	3.788.152.212,00	37,00%
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS	198.994.474.167,00	165.042.391.833,00	82,94%
2	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	2.292.098.087,00	1.371.041.872,00	59,82%
	Belanja Gaji Pokok PPPK	541.263.140,00	362.062.831,00	66,89%
	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	79.384.359,00	30.928.995,00	38,96%
	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	50.799.000,00	46.147.357,00	90,84%
	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	13.407.000,00	4.777.643,00	35,64%
	Belanja Tunjangan Beras PPPK	29.243.373,00	22.757.985,00	77,82%
	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	40.215,00	5.338,00	13,27%
	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PPPK	1.577.961.000,00	904.361.723,00	57,31%
	Jumlah	285.952.032.643,00	232.982.751.678,00	81,48%

b. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja barang dan jasa tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp517.204.706.306,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp480.833.838.261,00 atau 92,97%.

Anggaran belanja barang dan jasa belum terealisasi sebesar Rp36.370.868.045,00 atau 7,03% dikarenakan adanya keterlambatan pengajuan berkas pembayaran persediaan kebencanaan, pelaksanaan kegiatan dapur umum bencana yang tidak maksimal karena bencana yang terjadi tidak dapat diprediksi, dan pelaksanaan perancangan *Detail Engineering Design* (DED) Gedung Unit Informasi Layanan Sosial (UILS) dan Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) yang tidak direalisasikan.

Apabila persentase realisasi belanja barang dan jasa per 31 Desember 2025 tersebut dibandingkan dengan persentase realisasi belanja barang dan jasa per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 96,21%, maka terdapat penurunan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar 3,24%.

Rincian realisasi belanja barang dan jasa per 31 Desember 2025 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. 5
Realisasi Belanja Barang dan Jasa per 31 Desember 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Barang	250.335.940.985,00	228.017.725.156,00	91,08%
2	Belanja Jasa	241.078.760.949,00	229.246.140.295,00	95,09%
3	Belanja Pemeliharaan	11.437.716.572,00	10.220.390.010,00	89,36%
4	Belanja Barang dan/ atau Jasa untuk Diserahkan/Dijual/ Diberikan kepada Masyarakat/Pihak Ketiga	14.352.287.800,00	13.349.582.800,00	93,01%
Total		517.204.706.306,00	480.833.838.261,00	92,97%

c. Belanja Hibah

Belanja hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya. Pemberian belanja hibah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, bahwa pemberian hibah tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Belanja hibah tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp2.880.000.000,00. Realisasi belanja hibah sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp2.780.000.000,00 atau 96,53%. Anggaran belanja hibah belum terealisasi sebesar Rp100.000.000 dikarenakan terdapat 4 yayasan penerima hibah yang tidak memenuhi syarat kelengkapan dokumen untuk diproses pembayarannya. Terdapat 82 Yayasan/Lembaga yang diberikan hibah oleh Dinas Sosial pada tahun 2025 dengan rincian pada Lampiran 1. Apabila persentase realisasi belanja hibah per 31 Desember 2025 tersebut dibandingkan dengan persentase realisasi belanja hibah per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 98,11%, maka terdapat penurunan atas realisasi belanja hibah sebesar 1,58%.

Rincian realisasi belanja hibah per 31 Desember 2025 tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. 6
Rincian Realisasi Belanja Hibah per 31 Desember 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	2.880.000.000,00	2.780.000.000,00	96,53%

d. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial adalah pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada kelompok/anggota masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 27 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial, bantuan ini tidak dapat diberikan secara terus menerus/tidak berulang, selektif dan memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya.

Belanja bantuan sosial tahun anggaran 2025 dianggarkan sebesar Rp687.308.914.085,00. Realisasi per 31 Desember 2025 sebesar Rp661.823.321.954,00 atau 96,29%. Anggaran belanja bantuan sosial belum terealisasi sebesar Rp25.485.592.131,00 atau sebesar 3,71% dikarenakan Dinas Sosial tidak merealisasikan dana bantuan sosial kepada penerima yang tidak memenuhi kriteria berdasarkan data penerima yang telah dipadankan bersama Dinas Dukcapil dan Bank DKI. Apabila persentase realisasi belanja bantuan sosial per 31 Desember 2025 tersebut dibandingkan dengan persentase realisasi belanja bantuan sosial per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 95,85%, terdapat kenaikan realisasi per 31 Desember 2025 sebesar 0,44%.

Rincian realisasi belanja bantuan sosial pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Lampiran 2.

4.1.2.2 Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya. Belanja modal Dinas

Sosial dan Jajarannya meliputi belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya. Belanja modal tahun anggaran 2025 dianggarkan Rp34.917.058.879,00. Realisasi sampai dengan 31 Desember 2025 mencapai Rp31.742.463.116,00 atau sebesar 90,91% dengan demikian sisa anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp3.174.595.763,00 atau 9,09%. Penjelasan lebih lanjut realisasi belanja modal per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja modal peralatan dan mesin tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp10.695.288.116,00, dengan realisasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp9.977.696.280,00 atau 93,29%. Anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp717.591.836,00 atau 6,71% merupakan hasil penawaran harga. Apabila persentase realisasi belanja bantuan sosial per 31 Desember 2025 tersebut dibandingkan dengan persentase realisasi belanja bantuan sosial per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 58,53%, maka terjadi kenaikan sebesar 34,76%. Rincian realisasi belanja modal peralatan dan mesin per 31 Desember 2025 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4. 7
Rincian Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	50.919.047,00	48.630.245,00	95,51%
2	Belanja Modal Alat Besar	160.974.606,00	152.131.050,00	94,51%
3	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	6.208.931.657,00	5.743.977.337,00	92,51%
4	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	96.852.552,00	93.691.090,00	96,74%
5	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	222.774.180,00	210.082.000,00	94,30%
6	Belanja Modal Alat Laboratorium	54.328.783,00	50.505.000,00	92,96%
7	Belanja Modal Alat Pertanian	66.513.794,00	56.804.250,00	85,40%
8	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.303.290.820,00	1.193.616.867,00	91,58%
9	Belanja Modal Komputer	2.458.544.267,00	2.372.758.441,00	96,51%
10	Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi	72.158.410,00	55.500.000,00	76,91%
Total		10.695.288.116,00	9.977.696.280,00	93,29%

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin 31 Desember 2025 dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran 3.

b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja modal gedung dan bangunan tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp18.949.050.914,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp16.706.642.925,00 atau 88,17%. Anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp2.242.407.989,00 atau 11,83% merupakan sisa anggaran hasil negosiasi pelaksanaan rehabilitasi Gedung Sasana Krida Karang Taruna (SKKT) pada Suku Dinas Sosial serta pembangunan pagar di Sekretariat Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari. Apabila persentase realisasi belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan persentase realisasi belanja bantuan sosial per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 91,87%, maka terdapat penurunan atas persentase realisasi belanja modal gedung dan bangunan sebesar 3,7%. Rincian realisasi belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4. 8
Rincian Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	15.657.202.914,00	13.814.004.495,00	88,23%
2	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	3.291.848.000,00	2.892.638.430,00	87,87%
Total		18.949.050.914,00	16.706.642.925,00	88,17%

Realisasi belanja modal gedung dan bangunan 31 Desember 2025 dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran 4.

c. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja modal jalan, jaringan dan irigasi tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp5.087.635.841,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp4.893.369.161,00 atau 96,18%. Anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp194.266.680,00 atau 3,82% merupakan sisa hasil penawaran harga. Apabila

persentase realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan persentase realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 99,03%, maka terdapat penurunan sebesar 2,85%. Rincian realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2025 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4. 9
Rincian Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Instalasi	5.087.635.841,00	4.893.369.161,00	96,18%

Realisasi belanja modal jalan, jaringan dan irigasi per 31 Desember 2025 dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran 5.

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja modal aset tetap lainnya tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp29.728.814,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp28.554.750,00 atau 96,05%. Anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp1.174.064,00 atau 3,95% merupakan sisa hasil penawaran harga. Apabila persentase realisasi belanja modal aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan persentase realisasi belanja modal aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 0,00%, maka terdapat kenaikan atas realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar 96,05%. Rincian realisasi belanja modal aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4. 10
Rincian Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian / Kebudayaan / Olahraga	29.728.814,00	28.554.750,00	96,05%

Realisasi belanja modal aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 dijelaskan lebih lanjut pada Lampiran 6.

e. Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja modal aset lainnya tahun 2025 dianggarkan sebesar Rp155.355.194,00 dengan realisasi per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp136.200.000,00 atau 87,67%. Anggaran yang belum terealisasi sebesar Rp19.155.194,00 atau 12,33% merupakan sisa hasil penawaran harga pengadaan *lisensi software* pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial. Jika persentase realisasi belanja aset lainnya per 31 Desember 2025 dibandingkan dengan persentase realisasi realisasi belanja aset lainnya per 31 Desember 2024 yang tercatat sebesar 0,00%, maka terdapat kenaikan atas realisasi belanja modal aset tetap lainnya sebesar 87,67%. Rincian realisasi belanja modal aset lainnya per 31 Desember 2025 tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 4. 11
Rincian realisasi belanja modal aset lainnya per 31 Desember 2025

No	Uraian	Anggaran	Realisasi	%
1	Belanja Modal Aset Lainnya	155.355.194,00	136.200.000,00	87,67%

4.2 Penjelasan Akun-Akun Neraca

4.2.1. Aset

Aset Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan ajarannya terdiri dari aset lancar, aset tetap dan aset lainnya, rincian setiap dijelaskan sebagai berikut:

4.2.1.1 Aset Lancar

Aset lancar Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Jajarannya terdiri dari kas dan setara kas, piutang lain-lain pad yang sah, beban dibayar dimuka dan persediaan. Saldo aset lancar Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 4. 12
Aset Lancar Dinas Sosial 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Kas dan Setara Kas	-	-
- Kas di Bendahara Pengeluaran	-	-
Piutang Pendapatan	188.554.600,00	172.967.951,00
- Piutang Lain-lain PAD yang Sah	188.554.600,00	172.967.951,00
Belanja Dibayar Dimuka	2.780.037.396,00	2.394.482.353,00
- Belanja Barang Dibayar Dimuka	2.741.903.963,00	2.359.150.153,00
- Belanja Jasa Dibayar Dimuka	38.133.433,00	35.332.200,00
Persediaan	40.870.564.601,00	22.167.240.159,00
- Barang Pakai Habis	40.847.193.709,00	22.166.894.727,00
- Barang Tak Habis Pakai	23.370.892,00	-
- Barang Bekas Dipakai	-	345.432,00
Jumlah	43.839.156.597,00	24.734.690.463,00

4.2.1.1.1 Kas dan Setara Kas

a. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di bendahara pengeluaran per 31 Desember 2025 dan per 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Sisa kas di bendahara pengeluaran terdiri dari kas pada rekening bendahara pengeluaran, bendahara penerimaan pembantu, dan rekening penampungan bantuan sosial pemenuhan kebutuhan dasar dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 13
Rekening Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 31 Desember 2025 dan 2024

Rekening	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	%
Bendahara pengeluaran dan Bendahara pengeluaran pembantu	-	-	-	0%
Rekening penampungan Bantuan Sosial Kartu Anak Jakarta	-	-	-	0%
Rekening penampungan Bantuan Sosial Kartu Lansia Jakarta	-	-	-	0%
Rekening penampungan Bantuan Sosial Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta	-	-	-	0%
Total	-	-	-	0%

4.2.1.1.2 Piutang

a. Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-Lain PAD yang Sah pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp188.554.600,00 dan Rp172.967.951,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 14
Piutang lain-lain PAD yang sah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024	Kenaikan / Penurunan	%
Piutang lain-lain PAD yang sah	188.554.600,00	172.967.951,00	15.586.649,00	9,01%

Piutang lain-lain PAD yang sah pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 senilai Rp188.554.600,00 merupakan nilai pengembalian atas kemahalan harga pengadaan gas pada Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1 dan Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 15
Rincian Pengembalian Pengadaan Gas Tahun 2025

No	Uraian	Nilai Pengembalian
1	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	181.844.800,00
2	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	6.709.800,00
Total		188.554.600,00

Piutang lain-lain PAD yang sah pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2024 senilai Rp172.967.951,00 merupakan nilai pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan pengadaan belanja modal gedung dan bangunan dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 16
Rincian Pengembalian Kurang Volume Rehab Gedung Tahun 2024

No	Uraian	Nilai Pengembalian
1	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan rehab total gedung Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1 Cengkareng	40.777.207,00
2	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan pemeliharaan gedung A dan B Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	22.292.044,00

No	Uraian	Nilai Pengembalian
3	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan lanjutan pelaksanaan pemeliharaan gedung A dan B Kantor Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	18.182.521,00
4	Pengembalian atas kekurangan volume pekerjaan perawatan dan pemeliharaan Gedung Eks. LBK Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 2	29.472.820,00
5	Pengembalian atas kekurangan volume pelaksanaan 5 paket pekerjaan Belanja Modal Gedung dan Bangunan pada Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Timur	62.243.359,00
Total		172.967.951,00

4.2.1.1.3 Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta masing-masing sebesar Rp2.780.037.396,00 dan Rp2.394.482.353,00. Rincian saldo beban dibayar dimuka Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta terdiri dari :

Tabel 4. 17
Beban Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Beban Barang Dibayar	2.741.903.963,00	2.359.150.153,00
Beban Jasa Dibayar Dimuka	38.133.433,00	35.332.200,00
Jumlah	2.780.037.396,00	2.394.482.353,00

- a. Beban barang dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.741.903.963,00 dan Rp2.359.150.153,00. Beban barang dibayar dimuka adalah sisa bahan bakar minyak yang masih ada pada RFID dengan rincian:

Tabel 4. 18
Rincian saldo Beban Barang Dibayar Dimuka 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	SKPD/UKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Dinas Sosial	665.797.264,00	461.348.283,00
2	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	120.797.605,00	81.311.082,00
3	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	58.771.395,00	20.140.433,00
4	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3	71.576.067,00	49.688.023,00
5	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	26.606.979,00	15.266.119,00

NO	SKPD/UKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
6	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1	76.265.141,00	33.907.520,00
7	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	10.069.423,00	128.623,00
8	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2	23.915.897,00	430,00
9	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	96.200.103,00	89.442.752,00
10	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	10.723.337,00	840.612,00
11	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	54.601.869,00	44.859.680,00
12	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	29.426.252,00	40.301.288,00
13	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	14.826.847,00	14.643.777,00
14	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	54.223.100,00	55.405.520,00
15	Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Bathin	6.206.121,00	20.789.547,00
16	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	8.239.013,00	22.364.223,00
17	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	6.200.627,00	8.718.917,00
18	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	88.149.441,00	46.242.393,00
19	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	4,00	15.258.406,00
20	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4	3.618.430,00	19.673.882,00
21	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	11.946.746,00	8.814.445,00
22	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	193.286.064,00	162.451.915,00
23	Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia	28.975.048,00	10.278.846,00
24	Sekretariat Masjid Raya KH Hasyim Asy'hari	-	1.039.178,00
25	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	-	-
26	Pusat Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial	-	-
27	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	78.329.185,00	86.166.917,00
28	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	469.400.123,00	432.600.922,00
29	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	163.168.842,00	138.855.601,00
30	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	325.236.622,00	306.308.675,00
31	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	45.346.418,00	172.302.144,00
JUMLAH		2.741.903.963,00	2.359.150.153,00

- b. Beban jasa dibayar dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp38.133.433,00 dan Rp35.332.200,00. Beban jasa dibayar dimuka adalah sisa saldo pada kartu e-money (uang elektronik) dan sisa masa langganan perangkat lunak Canva, Stata, dan *Google Workspace* pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta. Rincian beban jasa dibayar dimuka adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 19
Rincian saldo Beban Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	SKPD/UKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1	2.557.100,00	-
2	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	6.893.000,00	-
3	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	28.683.333,00	
4	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Utara	-	35.332.200,00
	JUMLAH	38.133.433,00	35.332.200,00

4.2.1.1.4 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp40.870.564.601,00 dan Rp22.167.240.159,00. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Penilaian persediaan pada SKPD diperoleh berdasarkan hasil pemeriksaan fisik barang (stock opname) per 31 Desember 2024 dengan menggunakan metode *First in First Out* (FIFO). Rincian persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 20
Persediaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

NO	SKPD/UKPD	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
PERSEDIAAN BARANG BEKAS DIPAKAI			
1	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	-	345.432,00
	JUMLAH PERSEDIAAN BARANG BEKAS DIPAKAI	-	345.432,00
PERSEDIAAN BARANG TAK HABIS PAKAI			
1	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	577.200,00	-
2	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4	691.530,00	-
3	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	8.348.739,00	-
4	Sekretariat Masjid Raya KH Hasyim Asy'hari	395.000,00	-
5	Pusat Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial	13.358.423,00	-
	JUMLAH PERSEDIAAN BARANG BEKAS DIPAKAI	23.370.892,00	-

NO	SKPD/UKPD	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
BARANG PAKAI HABIS			
1	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	20.578.271.983,00	9.263.532.350,00
2	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	190.193.074,00	163.416.430,00
3	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	53.640.950,00	234.394.765,00
4	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3	183.460.523,00	137.369.655,00
5	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	366.542.866,00	128.073.022,00
6	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1	280.911.994,00	219.623.085,00
7	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	822.311.196,00	163.768.511,00
8	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2	294.477.752,00	136.605.474,00
9	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	632.012.421,00	839.372.498,00
10	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	354.291.304,00	98.764.071,00
11	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	1.587.394.843,00	235.894.050,00
12	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	800.635.233,00	98.997.095,00
13	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	437.497.119,00	890.838.963,00
14	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	2.296.553.870,00	1.500.091.806,00
15	Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Bathin	40.292.489,00	38.009.946,00
16	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	604.225.688,00	429.195.000,00
17	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	174.264.152,00	193.760.200,00
18	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	2.223.254.570,00	997.715.945,00
19	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	626.416.316,00	189.667.134,00
20	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4	233.773.488,00	648.625.581,00
21	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	838.997.468,00	466.742.613,00
22	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	431.846.212,00	445.494.870,00
23	Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia	912.897.037,00	1.038.931.257,00
24	Sekretariat Masjid Raya KH Hasyim Asy'hari	9.733.985,00	87.021.894,00
25	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	299.827.436,00	71.010.797,00
26	Pusat Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial	261.671.101,00	211.139.980,00
27	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	712.044.000,00	641.813.730,00
28	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	1.207.349.578,00	491.446.379,00
29	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	843.988.843,00	921.236.898,00
30	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	763.633.171,00	625.654.193,00
31	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	1.784.783.047,00	558.686.535,00
JUMLAH PERSEDIAAN BARANG PAKAI HABIS		40.847.193.709,00	22.166.894.727,00

Pada periode Januari s.d. Desember 2025, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta menerima hibah barang-barang Persediaan sebesar Rp5.635.800,00. Hibah persediaan tersebut diterima oleh Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya dari Bank Indonesia berupa alat-alat olahraga dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 21
Pendapatan Hibah Persediaan Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya

No	Jenis Barang	Nilai
1	Shuttle Cock	525.000,00
2	Bola Voli	382.500,00
3	Jack	400.000,00
4	Ember Plastik	1.234.800,00
5	Net Tennis Meja	47.000,00
6	Bola Futsal	379.500,00
7	Senar	1.650.000,00
8	Senar	900.000,00
9	Net Bola Volly	117.000,00
Total		5.635.800,00

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta tidak memiliki persediaan dalam kondisi rusak/usang/tidak layak pakai per 31 Desember 2025.

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta memiliki persediaan yang belum dilakukan pembayaran dan belum dilakukan pencatatan persediaan per 31 Desember 2025 berupa barang persediaan kebencanaan senilai Rp3.897.795.265,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 22
Rincian Barang Persediaan yang Belum Dibayar dan Dicatat

No	Nama Paket	Nilai	Jenis Barang
1	Penyediaan Paket Keluarga (<i>Family Kit</i>)	3.262.490.650,00	Sabun Cair, Tas Punggung, Sikat Gigi, Pasta Gigi, <i>shampoo</i> , lampu emergency, pembalut wanita, sisir, pakaian muslim pria dan wanita, pakaian anak laki-laki dan perempuan, daster
2	Penyediaan Paket Anak (<i>Kids Ware</i>)	290.649.615,00	<i>Goodie Bag</i> , <i>Diapers</i> , Selimut Bayi, Handuk, <i>Shampoo</i> , Sabun Bayi, <i>Baby Oil</i> , Minyak Telon, Pakaian Bayi
3	Penyediaan Paket Makanan Anak Tanggap Bencana	344.655.000,00	Biskuit dan Tas packing
Total		3.897.795.265,00	

4.2.1.2 Aset Tetap

Aset Tetap mencakup seluruh aset yang dimanfaatkan oleh pemerintah daerah untuk keperluan operasional maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, aset tetap diklasifikasikan ke dalam enam bidang/golongan termasuk Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). Saldo aset tetap Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 sebesar Rp2.498.597.098.182,00 dan Rp2.454.266.323.665,00. Rekapitulasi Aset Tetap tersebut tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 4. 23
Rincian Mutasi Aset Tetap

No	Uraian	31 Desember 2024 (Rp)	Mutasi Tambah (Rp)	Mutasi Kurang (Rp)	31 Desember 2025 (Rp)
1	Tanah	966.664.501.364,00	30.298.600.000,00	18.317.024.000,00	978.646.077.364,00
2	Peralatan dan Mesin	133.001.892.436,00	21.636.014.800,00	6.871.655.859,00	147.766.251.377,00
3	Gedung dan Bangunan	1.337.431.264.617,00	33.347.348.767,00	7.722.566.894,00	1.363.056.046.490,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.225.962.594,00	4.947.429.761,00	4.910.433.461,00	3.262.958.894,00
5	Aset Tetap Lainnya	2.641.394.120,00	47.204.750,00	-	2.688.598.870,00
6	Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.301.308.534,00	1.465.963.125,00	9.590.106.472,00	3.177.165.187,00
	Jumlah	2.454.266.323.665,00	91.742.561.203,00	47.411.786.686,00	2.498.597.098.182,00

Penjelasan Aset Tetap dari uraian tersebut di atas adalah sebagai berikut :

4.2.1.2.1 Tanah

Saldo aset tetap tanah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp978.646.077.364,00 dan Rp966.664.501.364,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp30.298.600.000,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp18.317.024.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 24
Rincian Mutasi Aset Tetap – Tanah

Saldo Awal	966.664.501.364,00
A Mutasi Penambahan	
1) Transfer Masuk dari SKPD Lain	30.298.600.000,00
Jumlah Penambahan	30.298.600.000,00
B Mutasi Pengurangan	
1) Transfer Keluar ke SKPD Lain	12.074.164.000,00
2) Koreksi Lebih Catat Barang	6.242.860.000,00
Jumlah Pengurangan	18.317.024.000,00
Saldo Akhir	978.646.077.364,00

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan tanah dapat disajikan sebagai berikut :

a. Mutasi Penambahan

- 1) Penambahan aset tetap tanah dari transfer masuk SKPD lain sebesar Rp30.298.600.000,00 terdapat pada beberapa unit kerja Dinas Sosial dengan rincian:

Tabel 4. 25
Rincian Penambahan Aset Tetap Tanah - Transfer Masuk dari SKPD Lain

No	Unit Kerja	Nilai
1	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	29.406.520.000,00
2	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	892.080.000,00
Jumlah		30.298.600.000,00

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Pengurangan Aset Tetap Tanah dari transfer keluar ke SKPD lain sebesar Rp12.074.164.000,00 terdapat pada beberapa unit kerja Dinas Sosial dengan rincian:

Tabel 4. 26
Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah - Transfer Keluar ke SKPD Lain

No	Unit Kerja	Nilai
1	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	1.693.684.000,00
2	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	10.380.480.000,00
Jumlah		12.074.164.000,00

- 2) Penambahan aset tetap tanah dari koreksi lebih catat barang sebesar Rp6.242.860.000,00 terdapat pada beberapa unit kerja Dinas Sosial

dengan rincian:

Tabel 4. 27
Rincian Pengurangan Aset Tetap Tanah - Koreksi Lebih Catat Barang

No	Unit Kerja	Nilai
1	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	4.844.460.000,00
2	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	450.000.000,00
3	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	38.400.000,00
4	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	910.000.000,00
Jumlah		6.242.860.000,00

4.2.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Saldo aset tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp147.766.251.377,00 dan Rp133.001.892.436,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp21.636.014.800,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp6.871.655.859,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 28
Rincian Mutasi Aset Tetap – Peralatan dan Mesin

Saldo Awal		133.001.892.436,00
A. Mutasi Penambahan		
1)	Belanja Modal	9.977.696.280,00
2)	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	351.619.810,00
3)	Transfer Masuk dari SKPD Lain	4.618.655.023,00
4)	Reklasifikasi Antar Aset Tetap	4.896.638.111,00
5)	Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	5.000.000,00
6)	Kapitalisasi dari Beban Persediaan	360.870.000,00
7)	Kapitalisasi dari Beban Barang	1.246.015.276,00
8)	Kapitalisasi dari Beban Jasa	172.416.300,00
9)	Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	7.104.000,00
Jumlah Penambahan		21.636.014.800,00
B. Mutasi Pengurangan		
1)	Diserahkan ke Pihak Lain di luar SKPD dari Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2025)	6.988.000,00
2)	Transfer Keluar ke SKPD Lain	2.625.591.827,00
3)	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	3.215.583.842,00
4)	Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	232.261.521,00

5)	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Barang Tak Habis Pakai	15.536.340,00
6)	Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)	66.568.574,00
7)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2025) ke Beban Barang Tak Habis Pakai	22.495.755,00
8)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal 2025) ke Beban Jasa	22.150.000,00
9)	Reklasifikasi Aset Tetap (Selain Belanja Modal Tahun 2025) menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)	664.480.000,00
Jumlah Pengurangan		6.871.655.859,00
Saldo Akhir		147.766.251.377,00

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin dapat disajikan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp9.977.696.280,00 terdapat pada beberapa unit kerja Dinas Sosial dengan rincian pada lampiran 3.
- 2) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari donasi/hibah dari luar Provinsi DKI sebesar Rp351.619.810,00 merupakan pendapatan hibah yang diperoleh Dinas Sosial dari pihak diluar Provinsi DKI Jakarta dengan rincian pada Lampiran 9.
- 3) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dari transfer masuk dari SKPD lain sebesar Rp4.618.655.023,00 dengan rincian:

Tabel 4. 29
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Transfer Masuk

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Dinas Sosial	1.960.276.002,00
2	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	13.860.000,00
3	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	255.000.900,00
4	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	165.000.900,00
5	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	356.786.500,00

No	Nama Unit Kerja	Nilai
6	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	87.834.036,00
7	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	30.388.000,00
8	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	766.623.259,00
9	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	463.031.524,00
10	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	2.800.000,00
11	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	24.980.302,00
12	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4	66.229.516,00
13	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	48.733.400,00
14	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	108.904.970,00
15	Sekretariat Masjid Raya K.H Hasyim Asy'ari	10.147.000,00
16	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	202.000.000,00
17	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Utara	56.058.714,00
Total		4.618.655.023,00

- 4) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dikarenakan reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp4.896.638.111,00, terdapat pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3 dengan rincian :

Tabel 4. 30
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin – reklasifikasi antar aset tetap

No	Unit Kerja	Nilai
1	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	4.856.372.861,00
2	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	40.265.250,00
Total		4.896.638.111,00

Penambahan pada Dinas Sosial berupa 6 unit AC sentral dan pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa berupa 5 unit pompa air.

- 5) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dikarenakan reklasifikasi aset rusak berat menjadi aset tetap sebesar Rp5.000.000,00 terdapat pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4 berupa tempat cuci perabot.
- 6) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dikarenakan kapitalisasi dari beban persediaan

sebesar Rp360.870.000,00 terdapat pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3 dan Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4 berupa tempat tidur besi, kasur/spring bed, kompor gas dan dispenser dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 31
Penambahan aset tetap peralatan dan mesin – kapitalisasi dari beban persediaan

No	Unit Kerja	Nilai
1	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	184.500.000,00
2	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4	176.370.000,00
Total		360.870.000,00

7) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dikarenakan kapitalisasi dari beban barang sebesar Rp1.246.015.276,00 terdapat pada beberapa unit kerja pada Dinas Sosial dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 32
Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Kapitalisasi dari Beban Barang

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	165.288.550,00
2	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	22.951.460,00
3	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	10.650.000,00
4	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	67.994.546,00
5	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2	4.260.000,00
6	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	150.000.000,00
7	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	150.345.060,00
8	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	26.233.300,00
9	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	2.387.610,00
10	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	433.788.000,00
11	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	5.772.000,00
12	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4	156.716.300,00
13	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	16.330.000,00
14	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	804.750,00
15	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	10.545.000,00
16	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	11.544.000,00
17	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	10.404.700,00
Total		1.246.015.276,00

- 8) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dikarenakan kapitalisasi dari beban jasa sebesar Rp172.416.300,00 terdapat pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 33
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Kapitalisasi
dari Beban Jasa

No	Uraian	Nilai
1	Jasa Konsultansi Perencanaan AC Sentral Gedung Dinas Sosial	76.562.250,00
2	Jasa Konsultansi Pengawasan AC Sentral Gedung Dinas Sosial	95.854.050,00
Total		172.416.300,00

- 9) Penambahan aset tetap peralatan dan mesin dikarenakan kapitalisasi dari beban pemeliharaan sebesar Rp7.104.000,00 terdapat pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3.

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin dikarenakan penyerahan ke pihak lain di luar SKPD dari aset tetap (selain belanja modal tahun 2025) sebesar Rp6.988.000,00 terdapat merupakan pengurangan atas pemberian hibah 2 tablet *personal computer* (PC) dari Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat ke Kementerian Sosial Republik Indonesia.
- 2) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas transfer keluar ke SKPD lain sebesar Rp2.625.591.827,00 terdapat pada beberapa unit kerja Dinas Sosial dengan rincian:

Tabel 4. 34
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Transfer
Keluar ke SKPD lain

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Dinas Sosial	1.013.692.642,00
2	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1	645.359.850,00
3	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	205.000.900,00
4	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2	100.847.539,00
5	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	255.000.900,00
6	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	102.644.996,00
7	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	303.045.000,00
Total		2.625.591.827,00

- 3) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin dari reklasifikasi aset tetap menjadi aset rusak berat sebesar Rp3.215.583.842,00 dengan rincian:

Tabel 4. 35
Pengurangan Peralatan dan Mesin – Reklas Aset Tetap
Menjadi Aset Rusak Berat

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	1.889.891.180,00
2	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	9.735.300,00
3	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1	465.420.112,00
4	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	2.475.000,00
5	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	5.850.000,00
6	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	38.979.600,00
7	Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin	36.463.200,00
8	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	23.025.000,00
9	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	5.984.000,00
10	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	47.322.000,00
11	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	15.235.000,00
12	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	189.069.900,00
13	Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia	2.722.500,00
14	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	14.482.000,00
15	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	17.180.000,00
16	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	332.968.400,00
17	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	57.315.300,00
18	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	61.465.350,00
Total		3.215.583.842,00

- 4) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas reklasifikasi aset tetap menjadi aset dalam proses penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset adalah sebesar Rp232.261.521,00 dengan rincian:

Tabel 4. 36
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Reklasifikasi
Aset Tetap menjadi Aset dalam Proses Penyelesaian MPSA

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	30.000.000,00
2	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	3.110.800,00
3	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	81.510.000,00
4	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	41.343.000,00
5	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	75.097.721,00
6	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	1.200.000,00
Total		232.261.521,00

- 5) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas reklasifikasi belanja modal tahun 2025 ke beban barang tak habis pakai sebesar Rp15.536.340,00 terdapat pada beberapa unit kerja dengan rincian:

Tabel 4. 37
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Reklasifikasi
Belanja Modal tahun 2025 ke Beban Barang Tak Habis Pakai

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	6.450.000,00
2	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	909.090,00
3	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	5.328.000,00
4	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	495.495,00
5	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	1.343.100,00
6	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta	1.010.655,00
Total		15.536.340,00

- 6) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas reklasifikasi belanja modal tahun 2025 menjadi barang pakai habis sebesar Rp66.568.574,00 terdapat pada beberapa unit kerja dengan rincian :

Tabel 4. 38
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Reklasifikasi
Belanja Modal 2025 menjadi Barang Pakai Habis

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	35.956.039,00
2	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	28.043.995,00
3	Suku Dina Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	2.568.540,00
Total		66.568.574,00

- 7) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas reklasifikasi aset tetap (selain belanja modal 2025) ke beban barang tak habis pakai sebesar Rp22.495.755,00 terdapat pada beberapa unit kerja dengan rincian :

Tabel 4. 39
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Reklasifikasi Aset Tetap (selain belanja modal 2025) ke Beban Barang Tak Habis Pakai

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	10.781.875,00
2	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	6.930.000,00
3	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	2.841.600,00
4	Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia	557.000,00
5	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.385.280,00
Total		22.495.755,00

- 8) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas reklasifikasi aset tetap (selain belanja modal tahun 2025) ke beban jasa sebesar Rp22.150.000,00 terdapat pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat. Pengurangan aset tersebut berupa 10 unit Lisensi Windows 98.

- 9) Pengurangan aset tetap peralatan dan mesin atas reklasifikasi aset tetap (selain belanja modal tahun 2025) menjadi barang pakai habis (persediaan) sebesar Rp664.480.000,00 terdapat pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan mulia dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 40
Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin - Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Barang Pakai Habis

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	663.040.000,00
2	Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia	1.440.000,00
Total		664.480.000,00

4.2.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Saldo aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp1.363.056.046.490,00 dan Rp1.337.431.264.617,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp33.347.348.767,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp7.722.566.894,00 dengan rincian :

Tabel 4. 41
Rincian Mutasi Aset Tetap – Gedung dan Bangunan

Saldo Awal	1.337.431.264.617,00
A. Mutasi Penambahan	
1) Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	16.706.642.925,00
2) Transfer Masuk dari SKPD Lain	3.868.728.352,00
3) Penambahan dari Saldo Kas yang Dibatasi	277.286.859,00
4) Reklasifikasi Antar Aset Tetap	127.468.000,00
5) Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	9.462.638.472,00
6) Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	764.630.000,00
7) Kapitalisasi dari Beban Jasa	1.160.238.456,00
8) Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan	747.203.703,00
8) Koreksi Kurang Catat Barang	232.512.000,00
Jumlah Penambahan	33.347.348.767,00
B. Mutasi Pengurangan	
1) Transfer Keluar ke SKPD Lain	4.460.177.295,00
2) Reklasifikasi Antar Aset Tetap	40.265.250,00
3) Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	2.622.674.566,00
4) Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 menjadi Barang Pakai Habis (Persediaan)	2.864.799,00
5) Belanja Modal sebelum Tahun 2025 (Temuan)	44.859.153,00
6) Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui	551.725.831,00
Jumlah Pengeluaran	7.722.566.894,00

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan Peralatan dan Mesin dapat disajikan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari belanja modal sebesar Rp16.706.642.925,00 terdapat pada beberapa

unit kerja Dinas Sosial dengan rincian pada lampiran 4.

- 2) Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari transfer masuk dari SKPD lain sebesar Rp3.868.728.352,00 terdapat pada unit kerja Dinas Sosial dengan rincian:

Tabel 4. 42
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Transfer
Masuk dari SKPD lain

No	Unit Kerja	Nilai
1	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	3.741.260.352,00
2	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	127.468.000,00
Total		3.868.728.352,00

- 3) Penambahan aset tetap gedung dan bangunan dari penambahan dari saldo kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp277.286.859,00 merupakan sisa pembayaran pelaksanaan rehab gedung Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 menggunakan Rekening Penampungan Batas Akhir Tahun Anggaran (RPBATA) yang dibayarkan per 6 Januari 2025 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 43
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Saldo Kas
yang Dibatasi Penggunaannya

No	Uraian	Nilai Total
1	Nilai Kontrak	7.693.864.000,00
2	Nilai realisasi pada Tahun 2024	5.897.543.780,00
3	Sisa Kontrak yang belum dibayarkan (3-2)	1.796.320.220,00
4	Nilai yang diakui sebagai utang belanja per 31 Desember 2024	1.519.033.361,00
5	Nilai pekerjaan 1 s.d 6 Januari 2025 yang telah dibayarkan dengan RPBATA	277.286.859,00
6	Bobot Pekerjaan per 30 Juni 2025	100,00%

- 4) Penambahan aset tetap gedung dan bangunan atas reklasifikasi antar aset tetap senilai Rp127.468.000,00 terdapat pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan rincian :

Tabel 4. 44
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Reklasifikasi antar Aset Tetap

No	Uraian	Nilai
1	Detail Engineering Design (DED) Pusdatin Kesejahteraan Sosial	91.960.000,00
2	Review Perencanaan PSBD BB 1 Cengkareng	35.508.000,00
Total		127.468.000,00

- 5) Penambahan aset tetap gedung dan bangunan atas reklasifikasi ke-5 bidang aset tetap dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) senilai Rp9.462.638.472,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 45
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Reklas ke-5 Bidang Aset Tetap dari KDP

No	Uraian	Nilai
Dinas Sosial		
1	Pembayaran Termin III Pelaksanaan Rehab Berat Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 Ciracas tahun 2024	551.725.831,00
2	Pembayaran Termin I dan II Pelaksanaan Rehab Berat Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 Ciracas tahun 2024	717.203.000,00
3	Pembayaran Perencanaan Rehab Berat Gedung Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 Ciracas tahun 2024	22.588.500,00
4	Pembayaran Bulan I dan II Pengawasan Rehab Berat Gedung Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 Ciracas	129.453.750,00
Total Dinas Sosial		1.420.971.081,00
Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1		
1	Perencanaan Rehab Berat Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Cengkareng tahun	27.300.450,00
2	Pengawasan Rehab Berat Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Cengkareng tahun	409.789.800,00
3	Pelaksanaan Rehab Berat Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Cengkareng tahun	7.416.577.141,00
Total Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1		7.853.667.391,00
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat		
1	Detail Engineering Design (DED) 4 SKKT	188.000.000,00
Total Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat		188.000.000,00
Total		9.462.638.472,00

6) Penambahan aset tetap gedung dan bangunan atas reklasifikasi aset rusak berat menjadi aset tetap sebesar Rp764.630.000,00 terdapat pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3.

7) Penambahan aset tetap gedung dan bangunan atas kapitalisasi dari beban jasa sebesar Rp1.160.238.456,00 terdapat pada beberapa unit kerja pada Dinas Sosial dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 46
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Kapitalisasi dari Beban Jasa

No	Unit Kerja	Nilai
1	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	148.584.600,00
2	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	48.440.400,00
3	Panti Sosial Trena Werdha Budi Mulia 4	83.760.600,00
4	Sekretariat Masjid Raya K.H Hasyim Asy'ari	198.214.920,00
5	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	282.936.636,00
6	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	266.200.200,00
7	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	132.101.100,00
Total		1.160.238.456,00

8) Penambahan aset tetap gedung dan bangunan atas kapitalisasi dari beban pemeliharaan sebesar Rp747.203.703.000,00 terdapat pada Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa dan Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 47
Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Kapitalisasi dari Beban Pemeliharaan

No	Unit Kerja	Nilai
1	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	97.690.592,00
2	Panti Sosial Trena Werdha Budi Mulia 4	649.513.111,00
Total		747.203.703,00

- 9) Penambahan aset tetap gedung dan bangunan atas koreksi kurang catat barang sebesar Rp232.512.000,00 terdapat pada Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan.

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dari transfer keluar ke SKPD lain sebesar Rp4.460.177.295,00 terdapat beberapa unit kerja pada Dinas Sosial dengan rincian:

Tabel 4. 48
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Transfer
Keluar ke SKPD Lain

No	Unit Kerja	Nilai
1	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	127.468.000,00
2	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	3.741.260.352,00
3	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	591.448.943,00
Total		4.460.177.295,00

- 2) Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp40.265.250,00 terdapat merupakan reklasifikasi atas 5 unit pompa air pada pada Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3.
- 3) Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi aset tetap menjadi aset rusak berat sebesar Rp2.622.674.566,00 terdapat pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3.
- 4) Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dari reklasifikasi belanja modal tahun 2025 menjadi barang pakai habis (persediaan) sebesar Rp2.864.799,00 terdapat pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

- 5) Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dari belanja modal tahun 2025 (temuan) sebesar Rp44.859.153,00 merupakan pengembalian atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait kekurangan volume pekerjaan rehab berat gedung Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Cengkareng tahun 2024.
- 6) Pengurangan aset tetap gedung dan bangunan dari pembayaran utang belanja modal yang aset telah diakui sebesar Rp551.725.831,00 merupakan pembayaran utang pelaksanaan rehab gedung pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 tahun 2024 dengan rincian :

Tabel 4. 49
Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan - Pembayaran Utang Belanja Modal yang Aset Telah Diakui

No	Uraian	Nilai Total
1	Nilai Kontrak	1.426.885.000,00
2	Nilai realisasi pada Tahun 2024	717.203.000,00
3	Bobot Pekerjaan per 31 Desember 2024	88,93%
4	Nilai Pekerjaan per 31 Desember 2024	1.268.928.831,00
5	Nilai Utang per 31 Desember 2024	551.725.831,00

4.2.1.2.4 Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.262.958.894,00 dan Rp3.225.962.594,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp4.947.429.761,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp4.910.433.461,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 50
Rincian Mutasi Aset Tetap – Jalan, Jaringan dan Irigasi

Saldo Awal	3.225.962.594,00
A. Mutasi Penambahan	
1) Belanja Modal	4.893.369.161,00
2) Transfer Masuk dari SKPD Lain	54.060.600,00
Jumlah Penambahan	4.947.429.761,00
B. Mutasi Pengurangan	
1) Transfer Keluar ke SKPD Lain	54.060.600,00
2) Reklasifikasi Antar Aset Tetap	4.856.372.861,00
Jumlah Pengeluaran	4.910.433.461,00
Saldo Akhir	3.262.958.894,00

Adapun rincian dari penambahan dan pengurangan jalan, jaringan, dan irigasi dapat disajikan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Penambahan aset jalan, jaringan, dan irigasi atas belanja modal sebesar Rp4.893.369.161,00 terdapat pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan rincian pada lampiran 5.
- 2) Penambahan aset jalan, jaringan, dan irigasi atas transfer masuk dari SKPD lain sebesar R54.060.600,00 merupakan transfer aset berupa bak penampung/kolam/menara penampungan dari Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 ke Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa.

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi atas reklasifikasi antar aset tetap sebesar Rp4.856.372.861,00 terdapat pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan rincian:

Tabel 4. 51
Pengurangan Aset Tetap Jalan, Jaringan, dan Irigasi -
Reklasifikasi Antar Aset Tetap

No	Jenis Barang	Qty	Harga Satuan	Nilai Total
1	A.C. Sentral	1	1.005.644.386,00	1.005.644.386,00
2	A.C. Sentral	5	770.145.695,00	3.850.728.475,00
Total				4.856.372.861,00

- 2) Pengurangan aset jalan, jaringan, dan irigasi atas transfer masuk dari SKPD lain sebesar R54.060.600,00 merupakan transfer aset berupa bak penampung/kolam/menara penampungan dari Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 ke Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa.

4.2.1.2.5 Aset Tetap Lainnya

Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp2.688.598.870,00 dan Rp2.641.394.120,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp47.204.750,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 52
Rincian Mutasi Aset Tetap - Aset Tetap Lainnya

Saldo Awal		2.641.394.120,00
A. Mutasi Penambahan		
1)	Belanja Modal	28.554.750,00
2)	Donasi/Hibah Dari Luar Provinsi DKI Jakarta	18.650.000,00
Jumlah Penambahan		47.204.750,00
Saldo Akhir		2.688.598.870,00

Adapun rincian dari penambahan aset tetap lainnya dapat disajikan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Penambahan aset tetap lainnya atas belanja modal sebesar Rp28.554.750,00 terdapat pada Dinas

Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan rincian pada lampiran 6.

- 2) Penambahan aset tetap lainnya atas donasi/hibah dari luar Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp18.650.000,00 terdapat pada Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya berupa 1 buah alat musik (Drum).

4.2.1.2.6 Kontruksi Dalam Pengerjaan

Saldo konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp3.177.165.187,00 dan Rp11.301.308.534,00. Selama 31 Desember 2025 terdapat mutasi penambahan senilai Rp1.465.963.125,00 dan mutasi pengurangan senilai Rp9.590.106.472,00 pada konstruksi dalam pengerjaan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 53
Rincian Mutasi Aset Tetap - Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo Awal	11.301.308.534,00
A. Mutasi Penambahan	
1) Kapitalisasi dari Beban Jasa	1.465.963.125,00
Jumlah Penambahan	1.465.963.125,00
B. Mutasi Pengurangan	
1) Reklasifikasi Antar Aset Tetap	127.468.000,00
2) Reklasifikasi Ke-5 Bidang Aset Tetap Dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan)	9.462.638.472,00
Jumlah Pengeluaran	9.590.106.472,00
Saldo Akhir	3.177.165.187,00

Adapun rincian dari pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan dapat disajikan sebagai berikut:

a. Mutasi Penambahan

- 1) Penambahan konstruksi dalam pengerjaan berupa kapitalisasi dari beban jasa senilai Rp1.465.963.125,00 terdapat pada beberapa

unit kerja Dinas Sosial dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 54
Penambahan Konstruksi Dalam Pengerjaan - Kapitalisasi dari Beban Jasa

No	Unit Kerja	Nilai
1	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	701.894.625,00
2	Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin	178.377.000,00
3	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	182.400.750,00
4	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	179.536.950,00
5	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	134.976.000,00
6	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	88.777.800,00
Total		1.465.963.125,00

b. Mutasi Pengurangan

- 1) Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan berupa reklasifikasi antar aset tetap senilai Rp127.468.000,00 terdapat pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 55
Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan - Reklasifikasi antar Aset Tetap

No	Uraian	Nilai
1	Detail Engineering Design (DED) Pusdatin Kesejahteraan Sosial	91.960.000,00
2	Review Perencanaan PSBD BB 1 Cengkareng	35.508.000,00
Total		127.468.000,00

- 2) Pengurangan konstruksi dalam pengerjaan berupa reklasifikasi ke-5 bidang aset tetap dari KDP (KDP sudah selesai dikerjakan) senilai Rp9.462.638.472,00 terdapat pada beberapa unit kerja Dinas Sosial dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 56
Pengurangan Konstruksi Dalam Pengerjaan – reklasifikasi ke-5
bidang aset tetap dari KDP

No	Uraian	Nilai
Dinas Sosial		
1	Pembayaran Termin III Pelaksanaan Rehab Berat Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 Ciracas tahun 2024	551.725.831,00
2	Pembayaran Termin I dan II Pelaksanaan Rehab Berat Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 Ciracas tahun 2024	717.203.000,00
3	Pembayaran Perencanaan Rehab Berat Gedung Panti Sosial Tresna Wedha Budi Mulia 4 Ciracas tahun 2024	22.588.500,00
4	Pembayaran Bulan I dan II Pengawasan Rehab Berat Gedung Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4 Ciracas	129.453.750,00
Total Dinas Sosial		1.420.971.081,00
Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1		
1	Perencanaan Rehab Berat Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Cengkareng tahun 2024	27.300.450,00
2	Pengawasan Rehab Berat Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Cengkareng tahun 2024	409.789.800,00
3	Pelaksanaan Rehab Berat Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1 Cengkareng tahun 2024	7.416.577.141,00
Total Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1		7.853.667.391,00
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat		
1	Detail Engineering Design (DED) 4 SKKT	188.000.000,00
Total Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat		188.000.000,00
Total		9.462.638.472,00

4.2.1.2.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai melakukan perhitungan penyusutan aset tetap pada tahun 2015 dengan mekanisme perhitungan penyusutan sesuai dengan Buletin Teknis SAP Nomor 18 tentang Akuntansi Penyusutan Berbasis Akrual dan Instruksi Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang penyusutan aset tetap. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode Garis Lurus (*Straight Line Method*) dengan masa manfaat aset tetap yang diatur berdasarkan Peraturan Gubernur Kebijakan Akuntansi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Pergub Nomor 27 Tahun 2019.

Nilai buku aset tetap per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar

Rp1.506.962.960.939,00 dan Rp1.520.611.319.088,00
dengan pada tabel berikut :

Tabel 4. 57
Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2024

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2024		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	966.664.501.364,00	-	966.664.501.364,00
Peralatan dan Mesin	133.001.892.436,00	(121.902.355.448,00)	11.099.536.988,00
Gedung dan Bangunan	1.337.431.264.617,00	(807.641.509.752,00)	529.789.754.865,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.225.962.594,00	(1.553.229.681,00)	1.672.732.913,00
Aset Tetap Lainnya	2.641.394.120,00	(2.557.909.696,00)	83.484.424,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	11.301.308.534,00	-	11.301.308.534,00
Jumlah	2.454.266.323.665,00	(933.655.004.577,00)	1.520.611.319.088,00

Tabel 4. 58
Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2025

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2025		
	Harga Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	978.646.077.364,00	-	978.646.077.364,00
Peralatan dan Mesin	147.766.251.377,00	(127.703.487.944,00)	20.062.763.433,00
Gedung dan Bangunan	1.363.056.046.490,00	(859.849.731.106,00)	503.206.315.384,00
Jalan, Irigasi dan Jaringan	3.262.958.894,00	(1.707.544.604,00)	1.555.414.290,00
Aset Tetap Lainnya	2.688.598.870,00	(2.410.273.589,00)	278.325.281,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	3.177.165.187,00	-	3.177.165.187,00
Jumlah	2.498.597.098.182,00	(991.671.037.243,00)	1.506.926.060.939,00

4.2.1.3 Aset Lainnya

Saldo aset lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp6.834.523.225,00 dan Rp7.553.448.410,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 59
Rincian Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Tidak Berwujud	-	-
Lisensi dan franchise	136.200.000,00	-
Aset Tidak Berwujud Lainnya	(136.200.000,00)	-
Aset Lain-lain	6.834.523.225,00	7.553.448.410,00
Aset Rusak Berat/Usang	4.677.758.553,00	5.377.362.290,00
Aset Dalam Proses Penyelesaian	2.156.764.672,00	2.176.086.120,00
Majelis Penetapan Status Aset	-	-
Nilai Buku Aset Lainnya	6.834.523.225,00	7.553.448.410,00

4.2.1.3.1 Aset Tidak Berwujud

Saldo aset tidak berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat mutasi penambahan aset tidak berwujud sebesar Rp136.200.000,00 mutasi pengurangan aset tidak berwujud sebesar Rp136.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 60
Aset Tidak Berwujud 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2025

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Lisensi dan Franchise	136.200.000,00	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud- Lisensi dan Franchise	-	-
Aset Tidak Berwujud Lainnya	(136.200.000,00)	-
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud Lainnya	-	-
Nilai Buku Aset Lainnya	-	-

Penjelasan mengenai aset tidak berwujud adalah sebagai berikut:

- a. Lisensi dan Franchise per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp136.200.000,00 dan Rp0,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp136.200.000,00 dengan rincian:

Tabel 4. 61
Rincian Lisensi dan Franchise

Saldo Awal	-
A. Mutasi Penambahan	
1) Belanja Modal Tahun Anggaran 2025	136.200.000,00
Jumlah Penambahan	136.200.000,00
Saldo Akhir	136.200.000,00

Penambahan aset tidak berwujud berupa belanja modal merupakan pembelian lisensi aplikasi desain grafis Canva dan perangkat lunak statistik Stata pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial.

- b. Aset tidak berwujud lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp136.200.000,00) dan Rp0,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat mutasi pengurangan sebesar Rp136.200.000,00 dengan rincian:

Tabel 4. 62
Rincian Aset Tidak Berwujud Lainnya

Saldo Awal	-
A. Mutasi Pengurangan	
1) Reklasifikasi Belanja Modal Tahun 2025 ke Beban Jasa	136.200.000,00
Jumlah Penambahan	136.200.000,00

Pengurangan aset tidak berwujud lainnya merupakan reklasifikasi atas lisensi aplikasi desain grafis Canva dan perangkat lunak statistik Stata pada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial adalah reklasifikasi kategori dari lisensi dan franchise menjadi beban jasa karena masa langganan lisensi tersebut hanya 12 bulan, sehingga tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset.

Nilai akumulasi amortisasi aset tidak berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp0,00) dan (Rp0,00). Nilai buku aset tidak berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 63
Nilai Buku Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Harga Perolehan	-	-
Akumulasi Penyusutan	-	-
Nilai Buku per	-	-

4.2.1.3.2 Aset Lain-Lain

Saldo aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp77.230.763.104,00 dan Rp76.580.471.535,00 dengan nilai akumulasi penyusutan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar (Rp70.396.239.879,00) dan (Rp69.027.023.125,00), sehingga nilai buku aset lain-lain per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp6.834.523.225,00 dan Rp7.553.448.410,00. Rincian tersebut dapat dilihat pada tabel:

Tabel 4. 64
Aset Lainnya per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Aset Rusak Berat/Usang	69.621.434.120,00	66.977.369.978,00
Akumulasi Penyusutan Aset Rusak Berat/Usang	(64.943.675.567,00)	(61.600.007.688,00)
Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Perubahan Status Aset	7.609.328.984,00	9.603.101.557,00
Akumulasi Penyusutan Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Perubahan Status Aset	(5.452.564.312,00)	(7.427.015.437,00)
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	-
Nilai Buku Aset Lainnya	6.834.523.225,00	7.553.448.410,00

Penjelasan mengenai aset lain-lain adalah sebagai berikut:

- Aset rusak berat/usang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp69.621.434.120,00 dan Rp66.977.369.978,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp5.974.751.658,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp3.330.687.516,00 dengan rincian :

Tabel 4. 65
Rincian Mutasi Aset Lainnya – Aset Rusak Berat

Saldo Awal	66.977.369.978,00
A. Mutasi Penambahan	
1) Transfer Masuk dari SKPD Lain	135.093.250,00
2) Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Rusak Berat	5.838.258.408,00
3) Koreksi Kurang Catat Barang	1.400.000,00
Jumlah Penambahan	5.974.751.658,00
B. Mutasi Pengurangan	
1) Penghapusan	2.383.028.016,00
2) Transfer Keluar ke SKPD Lain	5.400.000,00
3) Reklasifikasi Aset Rusak Berat Menjadi Aset Tetap	769.630.000,00
4) Koreksi Lebih Catat Barang	172.629.500,00
Jumlah Pengurangan	3.330.687.516,00
Saldo Akhir	69.621.434.120,00

- 1) Penambahan aset rusak berat/usang dari transfer masuk dari SKPD lain senilai Rp135.093.250,00 terdapat pada beberapa unit kerja pada Dinas Sosial dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 66
Penambahan Aset Rusak Berat/Usang - Transfer Masuk dari SKPD Lain

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	400.000,00
2	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhaki 2	129.693.250,00
3	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4	5.000.000,00
Total		135.093.250,00

- 2) Penambahan aset rusak berat/usang dari reklasifikasi aset tetap menjadi aset rusak berat sebesar Rp5.838.258.408,00 terdapat pada beberapa Unit Kerja dengan rincian:

Tabel 4. 67
Penambahan Aset Rusak Berat/Usang - Reklasifikasi Aset Tetap

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	1.889.891.180,00
2	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	9.735.300,00
3	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1	465.420.112,00
4	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	2.475.000,00
5	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	2.628.524.566,00
6	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	38.979.600,00
7	Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin	36.463.200,00
8	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	23.025.000,00

No	Nama Unit Kerja	Nilai
9	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	5.984.000,00
10	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	47.322.000,00
11	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	15.235.000,00
12	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	189.069.900,00
13	Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia	2.722.500,00
14	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	14.482.000,00
15	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	17.180.000,00
16	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	332.968.400,00
17	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	57.315.300,00
18	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	61.465.350,00
Total		5.838.258.408,00

- 3) Penambahan aset rusak berat/usang dari koreksi kurang catat barang senilai Rp1.400.000,00 terdapat pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1.
- 4) Pengurangan aset rusak berat/usang dari penghapusan aset sebesar Rp2.383.028.016,00 terdapat pada beberapa Unit Kerja dengan rincian :

Tabel 4. 68
Pengurangan Aset Rusak Berat/Usang - Penghapusan

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	129.981.551,00
2	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1	223.228.100,00
3	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	431.073.550,00
4	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	272.718.400,00
5	Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia	112.000.000,00
6	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	10.890.000,00
7	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	1.203.136.415,00
Total		2.383.028.016,00

- 5) Pengurangan aset rusak berat/usang dari transfer keluar SKPD lain sebesar Rp5.400.000,00 terdapat pada Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1.
- 6) Pengurangan aset rusak berat/usang dari reklasifikasi aset rusak berat menjadi aset tetap sebesar Rp769.630.000,00 terdapat pada Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3.

7) Pengurangan aset rusak berat/usang dari koreksi lebih catat barang sebesar Rp172.629.500,00 terdapat pada beberapa Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Nilai akumulasi penyusutan aset rusak berat/usang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp64.943.675.567,00) dan (Rp61.600.007.688,00). Nilai buku aset rusak berat/usang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 69
Nilai Buku Aset Rusak Berat/Usang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Harga Perolehan	69.621.434.120,00	66.977.369.978,00
Akumulasi Penyusutan	(64.943.675.567,00)	(61.600.007.688,00)
Nilai Buku per	4.677.758.553,00	5.377.362.290,00

b. Aset dalam proses penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar Rp7.609.328.984,00 dan Rp9.603.101.557,00. Sampai dengan 31 Desember 2025 terdapat mutasi penambahan sebesar Rp232.261.521,00 dan mutasi pengurangan sebesar Rp2.226.034.094,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 70
Rincian Aset MPSA

Saldo Awal	9.603.101.557,00
A. Mutasi Penambahan	
1) Reklasifikasi Aset Tetap Menjadi Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset	232.261.521,00
Jumlah Penambahan	232.261.521,00
B. Mutasi Pengurangan	
1) Penghapusan	2.226.034.094,00
Jumlah Pengurangan	2.226.034.094,00
Saldo Akhir	7.609.328.984,00

- 1) Penambahan aset dalam proses penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset senilai Rp232.261.521,00 dari reklasifikasi aset tetap menjadi aset dalam proses MPSA terdapat pada beberapa Unit Kerja dengan rincian :

Tabel 4. 71
Penambahan Aset MPSA - Reklasifikasi Aset Tetap menjadi Aset dalam Proses MPSA

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	30.000.000,00
2	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	3.110.800,00
3	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	81.510.000,00
4	Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial	41.343.000,00
5	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Pusat	75.097.721,00
6	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Barat	1.200.000,00
Total		232.261.521,00

- 2) Penghapusan aset dalam proses penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset sebesar Rp2.226.034.094,00 terdapat pada beberapa Unit Kerja dengan rincian:

Tabel 4. 72
Mutasi Penambahan - Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset

No	Nama Unit Kerja	Nilai
1	Dinas Sosial	214.714.230,00
2	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	983.309.022,00
3	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	107.751.131,00
4	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	13.398.295,00
5	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Selatan	330.743.946,00
6	Suku Dinas Sosial Kota Adm. Jakarta Timur	576.117.470,00
Total		2.226.034.094,00

Nilai akumulasi penyusutan aset dalam proses penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing adalah sebesar (Rp5.452.564.312,00) dan (Rp7.427.015.437,00). Nilai buku Aset Dalam Proses Penyelesaian Majelis Penetapan Status Aset per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 73
 Nilai buku Aset Dalam Proses Penyelesaian MPSA per 31 Desember
 2025 dan 31 Desember 2024

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
Harga Perolehan	7.609.328.984,00	9.603.101.557,00
Akumulasi Penyusutan	(5.452.564.312,00)	(7.427.015.437,00)
Nilai Buku	2.156.764.672,00	2.176.086.120,00

4.2.2. Kewajiban

4.2.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Saldo kewajiban pada neraca gabungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta merupakan saldo kewajiban jangka pendek berupa utang belanja. Saldo kewajiban per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing berjumlah Rp16.966.291.997,00 dan Rp19.241.582.112,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 74
 Rincian Utang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Utang Belanja	16.966.291.997,00	19.241.582.112,00
Jumlah		16.966.291.997,00	19.241.582.112,00

Penjelasan atas akun Utang adalah sebagai berikut:

4.2.2.1.1 Utang Belanja

Utang belanja Dinas Sosial merupakan utang atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal gedung dan bangunan dengan rincian utang belanja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Lampiran 7 dengan ringkasan sebagai berikut:

Tabel 4. 75
 Rincian Utang Belanja per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Utang Belanja Pegawai	12.327.958.652,00	12.307.596.080,00
2	Utang Belanja Barang	3.897.795.267,00	165.906.250,00
3	Utang Belanja Jasa	740.538.078,00	1.318.680.227,00
4	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	5.449.399.555,00
Jumlah		16.966.291.997,00	19.241.582.112,00

Penjelasan atas akun Utang Belanja adalah sebagai berikut:

a. Utang Belanja Pegawai

Belanja Pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.327.958.652,00 dan Rp12.307.596.080,00. Rincian utang belanja pegawai per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

- Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS Bulan Desember 2025 senilai Rp403.975.000,00
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi kerja PPPK bulan Desember 2025 senilai Rp139.519.102,00.
- Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS bulan Desember 2025 senilai Rp11.784.464.550,00

b. Utang Belanja Barang

Belanja Barang yang belum terbayarkan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp3.897.795.267,00 dan Rp165.906.250,00 yang merupakan utang atas pengadaan barang terkait penanganan bencana yang belum terbayarkan dengan rincian pada Lampiran 8.

c. Utang Belanja Jasa

Saldo Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp740.538.078,00 dan Rp1.318.680.227,00. Utang Belanja Jasa pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta

terdiri dari Utang Belanja Jasa TALI (Telepon, Air, Listrik dan Internet) dan Utang Belanja Jasa Non TALI (Telepon, Air, Listrik dan Internet) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 76
Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Utang Belanja Jasa Non TALI	-	498.687.500,00
2	Utang Belanja Jasa TALI	740.538.078,00	819.992.727,00
Jumlah		740.538.078,00	1.318.680.227,00

Penjelasan atas akun Utang Belanja Modal adalah sebagai berikut:

- Utang Belanja TALI

Saldo Utang Belanja Jasa TALI per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp740.538.078,00 dan Rp819.992.727,00. Utang Belanja Jasa TALI pada Tahun 2024 merupakan saldo atas pemakaian Telepon, Air, dan Listrik pada bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025. Berikut rincian nilai utang belanja jasa TALI pada Dinas Sosial dan UKPD dibawahnya :

Tabel 4. 77
Rincian Utang Belanja Jasa TALI 31 Desember 2024

NO	SKPD/UKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	175.930.639,00	133.682.143,00
2	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	17.833.282,00	10.167.490,00
3	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	39.620.356,00	21.963.614,00
4	Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3	13.875.229,00	16.776.402,00
5	Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	33.822.721,00	30.967.138,00
6	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1	24.273.584,00	15.823.816,00
7	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	-	15.548.230,00
8	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2	29.299.754,00	31.662.764,00
9	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	22.160.865,00	22.595.673,00
10	Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	12.821.977,00	13.339.600,00
11	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	18.798.434,00	17.711.711,00
12	Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	53.912.827,00	28.970.239,00
13	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	24.942.021,00	23.115.218,00
14	Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	28.128.110,00	28.267.994,00
15	Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Bathin	-	15.520.196,00

NO	SKPD/UKPD	31 Desember 2025	31 Desember 2024
16	Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	-	27.211.728,00
17	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	12.649.137,00	14.028.603,00
18	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	-	-
19	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	33.230.924,00	28.611.137,00
20	Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4	22.025.502,00	21.758.124,00
21	Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	17.073.263,00	8.119.645,00
22	Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	15.749.083,00	14.703.318,00
23	Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia	15.578.536,00	10.190.608,00
24	Sekretariat Masjid Raya KH Hasyim Asy'hari	73.727.588,00	-
25	Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	-	221.301.354,00
26	Pusat Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial	193.034,00	246.812,00
27	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	8.280.971,00	6.177.574,00
28	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	8.443.768,00	9.304.174,00
29	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	6.364.260,00	5.312.578,00
30	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	11.069,00	-
31	Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	31.791.144,00	26.914.844,00
TOTAL		740.538.078,00	819.992.727,00

- Utang Belanja Non TALI

Saldo Utang Belanja Jasa Non TALI per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp498.687.500,00.

Utang belanja jasa Non TALI Dinas Sosial pada tahun 2024 merupakan saldo Utang atas pemeliharaan gedung A dan B Dinas Sosial, perencanaan dan pengawasan rehab gedung Panti Sosial yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 78
Rincian Utang Belanja Jasa Non TALI Tahun 2024

No	Uraian	Nilai
1	Jasa Pemeliharaan Instalasi Air Gedung A dan B Dinas Sosial	20.000.000,00
2	Pengawasan Rehab Berat Gedung Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1 Cengkareng	48.995.400,00
3	Pengawasan Rehab Total Gedung Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1 Cengkareng	215.878.350,00
4	Perencanaan Pemeliharaan Instalasi Air Gedung A dan B Dinas Sosial	84.360.000,00
5	Pengawasan Rehab Berat Gedung Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 4 Ciracas	129.453.750,00
Total		498.687.500,00

d. Utang Belanja Modal

Saldo Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp5.449.399.555,00. Utang belanja merupakan utang atas pelaksanaan rehab berat gedung Panti Sosial dan utang atas pengadaan belanja modal peralatan dan mesin dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 79
Utang Belanja Modal per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024

No	Jenis	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	-	704.735.800,00
2	Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	4.674.663.755,00
3	Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	-	70.000.000,00
Jumlah		Rp -	Rp 5.449.399.555

Penjelasan atas akun Utang Belanja Modal adalah sebagai berikut:

- Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Utang belanja peralatan dan mesin pada Dinas Sosial pada per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp,00 dan Rp704.735.800,00. Utang belanja peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 merupakan utang atas pelaksanaan pemeliharaan gedung A dan B Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 80
Rincian Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31 Desember 2024

Uraian	Nilai
Pembayaran Termin II Pelaksanaan Pemeliharaan Gedung A dan B Dinas Sosial	610.796.500,00
Pembayaran Termin II Pengawasan Pemeliharaan Gedung A dan B Dinas Sosial	93.939.300,00
Total	704.735.800,00

- Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Utang belanja modal gedung dan bangunan pada Dinas Sosial pada per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp4.674.663.755,00.

Utang belanja modal gedung dan bangunan per 31 Desember 2024 merupakan utang atas pelaksanaan rehab gedung Panti Sosial dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 81
Rincian Utang Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024

No	Uraian	Nilai
1	Pembayaran Termin IV Rehab Berat Gedung Panti Sosial Bina Daksa (PSBD) Budi Bhakti 1 Cengkareng	1.519.033.361,00
2	Pembayaran Termin III Pelaksanaan Rehab Berat Gedung Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 4 Ciracas	551.725.831,00
3	Pembayaran Termin III dan Termin IV Rehab Total Gedung Panti Sosial Bina Insan (PSBI) Bangun Daya 1 Cengkareng	2.603.904.563,00
Total		4.674.663.755,00

- Utang Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi
Utang belanja modal jalan, jaringan dan irigasi pada Dinas Sosial pada per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00 dan Rp70.000.000,00. Utang belanja peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 merupakan utang atas belanja modal instalasi air kotor pekerjaan pemeliharaan gedung A dan B Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta.

4.2.3 Ekuitas

Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.540.670.348.764,00 dan Rp1.533.657.875.849,00. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2025 merupakan nilai ekuitas akhir yang tersaji dalam laporan perubahan ekuitas (LPE).

4.3 Laporan Operasional

Penyajian laporan operasional Dinas Sosial dan Jajarannya menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.

Laporan operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga penyusunan laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, dan neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam laporan operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa.

4.3.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan tanggung jawab dan wewenang entitas pemerintah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas pemerintah daerah. Pendapatan-LO per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp725.014.760,00 dan Rp563.588.153,00 dengan rincian pada tabel berikut:

Tabel 4. 82
Pendapatan LO per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Pendapatan-LO	
		31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Pendapatan Asli Daerah - LO	387.550.000,00	53.150.000,00
2	Lain-lain Pendapatan yang Sah	337.464.760,00	510.438.153,00
Total		725.014.760,00	563.588.153,00

4.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah-LO Dinas Sosial merupakan pendapatan retribusi atas penggunaan ruang unit pada kerja Dinas Sosial. Rincian Pendapatan Asli Daerah-LO per 31

Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah:

Tabel 4. 83
Rincian Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah
per 31 Desember 2025 dan Tahun 2024

No	Uraian	Target Tahun 2025	Realisasi per 31 Desember 2025	%	Realisasi 31 Desember 2024
	Pendapatan Retribusi Daerah	310.000.000,00	387.550.000,00	125,02%	53.150.000,00
1	Penggunaan Ruang pada Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta	130.000.000,00	141.050.000,00	108,50%	21.650.000,00
2	Penggunaan Ruang pada Sekretariat Masjid Raya K.H. Hasyim Asy'ari	180.000.000,00	246.500.000,00	136,94%	31.500.000,00

4.3.1.2 Lain-Lain PAD yang Sah-LO

Kelompok penerimaan Lain-lain PAD yang sah-LO merupakan komponen penerimaan yang tidak termasuk pada kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Lain-lain PAD yang Sah-LO secara umum dapat diakui apabila telah ditetapkan jumlahnya, yang ditandai dengan terbitnya dokumen penagihan atau ketetapan. Dalam hal hak atas pendapatan diterima atau direalisasi tanpa penetapan, maka pendapatan LO diakui ketika hak diterima atau direalisasi. Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah senilai Rp337.464.760,00 dan Rp510.438.153,00. Rincian lain-lain PAD yang sah dapat dilihat pada Lampiran 10.

4.3.2 Beban

Beban disajikan dengan prinsip akrual yang disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.

Rekapitulasi beban gabungan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah masing-masing sebesar Rp1.420.730.301.715,00 dan Rp1.409.964.300.623,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 4. 84
Rekapitulasi Beban Dinas Sosial dan Jajaran

AKUN	31 DESEMBER 2025	31 DESEMBER 2024
BEBAN		
BEBAN OPERASI		
Beban Pegawai	233.003.114.250,00	239.486.400.810,00
Beban Barang	211.073.891.809,00	200.507.177.961,00
Beban Jasa	226.372.012.782,00	212.944.986.062,00
Beban Perjalanan Dinas	403.295.000,00	-
Beban Pemeliharaan	9.466.082.307,00	9.525.153.481,00
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	12.946.287.800,00	15.644.416.300,00
Beban Hibah	2.780.000.000,00	1.300.000.000,00
Beban Bantuan Sosial	661.823.321.954,00	671.984.890.000,00
BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI	62.862.295.813,00	58.571.276.009,00
JUMLAH BEBAN	1.420.730.301.715,00	1.409.964.300.623,00

4.3.2.1 Beban Operasi

Beban operasi tahun 2025 dicatat berdasarkan nilai nominal yang terdapat dalam dokumen sumber seperti daftar gaji pegawai, tagihan pihak ketiga, nota perjanjian hibah, dan dokumen keputusan pemberian bantuan sosial.

Beban operasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing-masing sebesar Rp1.357.868.005.902,00 dan Rp1.351.393.024.614,00 terdiri dari:

a. Beban Pegawai

Beban pegawai per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing sebesar Rp233.003.114.250,00 dan Rp239.486.400.810,00. Beban Pegawai per 31 Desember 2025 disajikan berdasarkan nilai belanja pegawai per 31 Desember 2025 dikurangi utang belanja pegawai per 31 Desember 2024. Rincian perhitungan beban pegawai per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 85
Perhitungan Beban Pegawai per 31 Desember 2025

Nilai Belanja Pegawai pada LRA	232.982.751.678,00
Ditambah	
1) Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2025	12.327.958.652,00
Jumlah Penambahan	12.327.958.652,00
Dikurang	
1) Utang Belanja Pegawai per 31 Desember 2024	12.307.596.080,00
Jumlah Pengurangan	12.307.596.080,00
Nilai Beban Pegawai	233.003.114.250,00

b. Beban Barang

Beban barang per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing sebesar Rp211.073.891.809,00 dan Rp200.507.177.961,00. Beban barang diakui pada saat terjadinya konsumsi aset yakni pengeluaran kas terhadap pihak lain dan penggunaan barang-barang yang bukan merupakan aset tetap selama tahun anggaran 2025. Nilai tersebut dicatat sebesar nominal yang tertera dalam dokumen sumber dan telah memperhitungkan persediaan awal tahun 2025, pembelian atau perolehan persediaan selama Tahun 2025, persediaan akhir per 31 Desember 2025, belanja barang dibayar di muka dan transaksi-transaksi penambahan/pengurangan persediaan dan barang lainnya. Rincian perhitungan beban barang per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 86
Perhitungan Beban Barang per 31 Desember 2025

Nilai Belanja Barang pada LRA	228.017.725.156
Persediaan per 31 Desember 2024	22.167.240.159
Ditambah	
1) Belanja Barang Dibayar di Muka per 31 Desember 2024	2.359.150.153,00
2) Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-lain ke Barang Persediaan	531.296.000,00
3) Utang Belanja Barang per 31 Desember 2024	3.897.795.267,00
4) Reklasifikasi Aset Tetap/Lain-Lain ke Ekstrakomtabel	29.965.455,00
5) Reklasifikasi Belanja Modal ke Barang Persediaan	69.433.373,00
6) Donasi/Hibah Persediaan dari Luar Provinsi DKI Jakarta	5.635.800,00
7) Transfer Masuk Persediaan dari SKPD Lain	6.245.380,00
8) Kurang Catat Persediaan Awal	61.223.939,00
Jumlah Penambahan	6.960.745.367,00

Dikurang		
1)	Kapitalisasi Belanja Barang ke Aset Tetap/Lain-lain	1.399.172.016,00
2)	Reklasifikasi Persediaan Awal ke Aset Tetap/ Lain-lain	141.096.000,00
3)	Utang Belanja Barang per 31 Desember 2024	165.906.250,00
4)	Belanja Barang Dibayar di Muka per 31 Desember 2025	2.741.903.963,00
5)	Lebih Catat Persediaan Awal	564.621.443,00
6)	Koreksi Pengembalian Belanja yang Kas Diterima di Tahun Berikutnya	188.554.600,00
Jumlah Pengurangan		5.201.254.272,00
Persediaan per 31 Desember 2025		40.870.564.601,00
Nilai Beban Barang		211.073.891.809,00

c. Beban Jasa

Beban jasa per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing sebesar Rp226.372.012.782,00 dan Rp212.944.986.062,00. Beban jasa diantaranya terdiri dari gaji PJLP, sewa mesin fotocopy, dan tenaga ahli. Rincian perhitungan beban jasa per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. 87
Perhitungan Beban Jasa per 31 Desember 2025

Nilai Belanja Jasa pada LRA		229.246.140.295
Ditambah		
1)	Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2024	35.332.200,00
2)	Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2025	740.538.078,00
3)	Reklasifikasi dari Aset Tetap ke Beban Jasa	136.200.000,00
Jumlah Penambahan		912.070.278,00
Dikurang		
1)	Utang Belanja Jasa per 31 Desember 2024	949.446.477,00
2)	Belanja Jasa Dibayar Dimuka per 31 Desember 2025	38.133.433,00
3)	Kapitalisasi Belanja Jasa ke Aset Tetap	2.798.617.881,00
Jumlah Pengurangan		3.786.197.791,00
Nilai Beban Jasa		226.372.012.782,00

d. Beban Pemeliharaan

Beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp9.466.082.307,00 dan Rp9.525.153.481,00. Beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 adalah realisasi belanja pemeliharaan diantaranya belanja pemeliharaan kendaraan dinas operasional, komputer, alat pendingin, dan bangunan gedung dikurangi dengan kapitalisasi

belanja pemeliharaan ke aset tetap. Rincian perhitungan beban pemeliharaan per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 88
Perhitungan Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2025

Nilai Belanja Pemeliharaan pada LRA	10.220.390.010
Dikurang	
1) Kapitalisasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap	754.307.703,00
Jumlah Pengurangan	754.307.703,00
Nilai Beban Pemeliharaan	9.466.082.307,00

e. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp403.295.000,00 dan Rp0,00. Beban perjalanan dinas per 31 Desember 2025 adalah realisasi atas kegiatan pemberian layanan rujukan kepada orang terlantar yang merupakan kegiatan pemulangan orang terlantar per 31 Desember 2025.

f. Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.

Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp12.946.287.800,00 dan Rp15.644.416.300,00. Beban uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat per 31 Desember 2025 adalah realisasi atas belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat per.

g. Beban Hibah

Beban Hibah per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp 2.780.000.000,00 dan Rp1.300.000.000,00. Beban hibah per 31 Desember 2025

ada nilai realisasi belanja hibah per 31 Desember 2025.

h. Beban Bantuan Sosial

Beban Bantuan Sosial per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing – masing sebesar Rp661.823.321.954,00 dan Rp671.984.890.000,00. Beban bantuan sosial per 31 Desember 2025 adalah nilai realisasi belanja bantuan sosial per 31 Desember 2025.

4.3.2.2 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Beban Amortisasi adalah alokasi nilai Aset Tidak Berwujud secara sistematis dan rasional selama masa manfaatnya. Amortisasi Aset Tidak Berwujud pada Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mulai dilakukan pada tahun 2016 berdasarkan Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 23 tahun 2016 tentang Amortisasi Aset Tidak Berwujud. Beban Penyusutan dan Amortisasi per 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 masing masing sebesar Rp62.862.295.813,00 dan Rp58.571.276.009,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 4. 89
Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2025 dan 2024

No	Beban Penyusutan dan Amortisasi	31 Desember 2025	31 Desember 2024
1	Peralatan dan Mesin	7.729.033.328,00	4.506.738.601,00
2	Gedung dan Bangunan	54.592.067.068,00	53.415.713.431,00
3	Jalan, Irigasi dan Jaringan	153.537.144,00	150.909.551,00
4	Aset Tetap Lainnya	13.440.950,00	4.000.000,00
5	Aset Tidak Berwujud	43.373.333,00	-
6	Aset Lainnya	330.843.990,00	493.914.426,00
Jumlah		62.862.295.813,00	58.571.276.009,00

4.4 Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. Nilai Ekuitas per 31 Desember 2025 berasal dari Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 ditambah/dikurang dengan Surplus/Defisit LO dan perubahan ekuitas lainnya pada tahun 2025. Nilai Ekuitas Akhir yang tersaji pada Laporan Perubahan Ekuitas 31 Desember 2025 dan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.540.710.558.764,00 Rp1.533.657.875.849,00.

Tabel 4. 90
Laporan Perubahan Ekuitas

Uraian	31 Desember 2025	31 Desember 2024
EKUITAS AWAL		
Ekuitas - LO per 31 Desember 2025 dan 2024	138.684.244.513,00	16.749.003.371,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	1.400.344.857.718,00	1.543.010.941.511,00
Koreksi Perubahan Struktur Organisasi	-	-
Ekuitas - LO per 1 Januari 2025	1.539.029.102.231,00	1.559.759.944.882,00
RK PPKD		
RK PPKD per 31 Desember 2025 dan 2024	1.394.973.631.336,00	1.555.439.131.405,00
Penyesuaian RK PPKD Awal Tahun	(1.400.344.857.718,00)	(1.543.010.941.511,00)
RK PPKD per 1 Januari 2025 dan 2024	(5.371.226.382,00)	12.428.189.894,00
JUMLAH EKUITAS AWAL	1.533.657.875.849,00	1.572.188.134.776,00
PERUBAHAN EKUITAS		
- SURPLUS/DEFISIT LO	(1.420.005.286.955,00)	(1.409.400.712.470,00)
- Mutasi RK PPKD	1.433.234.393.942,00	1.382.545.441.442,00
- KOREKSI EKUITAS	(6.176.424.072,00)	(11.674.987.899,00)
JUMLAH PERUBAHAN EKUITAS	7.052.682.915,00	(38.530.258.927,00)
EKUITAS AKHIR		
- EKUITAS - LO	112.847.391.204,00	138.684.244.513,00
- RK PPKD	1.427.863.167.560,00	1.394.973.631.336,00
JUMLAH EKUITAS AKHIR	1.540.710.558.764,00	1.533.657.875.849,00

Komponen perhitungan Ekuitas dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Ekuitas Awal

Ekuitas awal per 1 Januari 2025 adalah Rp1.533.657.875.849,00.

b. Perubahan Ekuitas

Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2025 adalah sebesar Rp7.052.682.915,00 yang terdiri dari :

- Defisit LO sebesar (Rp1.420.005.286.955,00);
- Mutasi RK PPKD sebesar Rp1.433.234.393.942,00;
- Koreksi Ekuitas sebesar (Rp6.176.424.072,00).

c. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir 31 Desember 2025 adalah Rp1.540.710.558.764,00.



BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI- INFORMASI NON KEUANGAN

BAB V

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

5.1 Struktur Organisasi

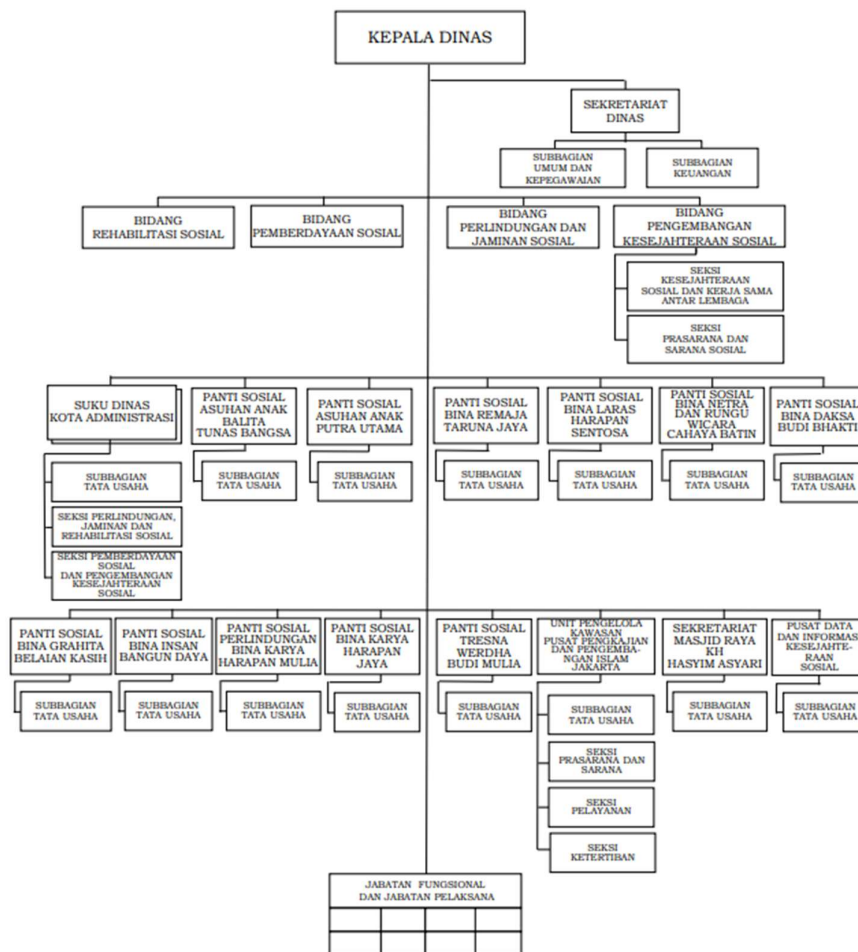
Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut:

- a. Sekretariat, terdiri dari
 - 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Subbagian Keuangan
 - 3) Subkelompok Program dan Pelaporan
- b. Bidang Rehabilitasi Sosial, terdiri dari :
 - 3) Subkelompok Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia
 - 4) Subkelompok Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas
 - 5) Subkelompok Rehabilitasi Tuna Sosial, Korban Perdagangan Orang dan Korban Tindak Kekerasan
- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Subkelompok Pemberdayaan Sosial Perorangan dan Kelembagaan Masyarakat
 - 2) Subkelompok Pemberdayaan Peran Serta Dunia Usaha dan Bina Undian
 - 3) Subkelompok Kepahlawanan, Keperintisan, Kesetiakawanan dan Restorasi Sosial
- d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Subkelompok Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial
 - 2) Subkelompok Jaminan Sosial Keluarga
 - 3) Subkelompok Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam
- e. Bidang Pengembangan Kesejahteraan Sosial, terdiri dari :
 - 1) Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kerja Sama Antar Lembaga
 - 2) Seksi Prasarana dan Sarana Sosial
 - 3) Subkelompok Penanganan Fakir Miskin

- f. Suku Dinas Kota Administrasi, terdiri dari :
 - 1) Subbagian Tata Usaha
 - 2) Seksi Perlindungan, Jaminan dan Rehabilitasi Sosial
 - 3) Seksi Pemberdayaan Sosial dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial
- g. Unit Pelaksana Teknis, terdiri dari :
 - 1) Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 2) Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 3) Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 4) Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 5) Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 6) Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 7) Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 8) Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 9) Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 10) Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 11) Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha;
 - 12) Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta, yang terdiri dari:
 - a). Subbagian Tata Usaha;

- b). Seksi Prasarana dan Sarana;
 c). Seksi Pelayanan; dan d) Seksi Ketertiban.
- 13) Sekretariat Masjid Raya KH Hasyim Asy'ari, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha; dan
- 14) Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial, yang terdiri dari Subbagian Tata Usaha
- h. Jabatan Fungsional

Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta



5.2 Visi dan Misi

Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai Visi yaitu Masyarakat Jakarta yang mandiri dan Sejahtera. Sementara Misi yang diemban oleh Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan harkat, martabat serta kualitas hidup manusia.
2. Mengembangkan prakarsa serta peran aktif masyarakat dalam pembangunan.
3. Mencegah dan mengendalikan serta mengatasi masalah sosial.
4. Meningkatkan ketahanan dan pemberdayaan sosial masyarakat.
5. Meningkatkan pelayanan dan rehabilitasi sosial.
6. Mengembangkan sistem perlindungan dan jaminan sosial.
7. Mengembangkan sistem dan sarana serta prasarana UKS

5.3 Tugas dan Fungsi SKPD

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Dinas Sosial mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial yang menjadi kewenangan daerah.

Dinas Sosial Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempunyai fungsi :

1. penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial;
2. pelaksanaan Rencana Strategis dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Sosial;
3. perumusan dan pelaksanaan kebijakan, proses bisnis, standar, dan prosedur Dinas Sosial;
4. perumusan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
5. pelaksanaan dan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di bidang sosial;
6. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial;

7. pelaksanaan kerja sama dan koordinasi dengan PD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta/organisasi dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang sosial;
8. pengelolaan data dan sistem informasi serta transformasi digital di bidang sosial;
9. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian perizinan dan nonperizinan di bidang sosial;
10. pengawasan dan penindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang sosial;
11. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan perangkat daerah di bidang sosial;
12. pengembangan peran serta masyarakat dalam Pemberdayaan Sosial dan penggalangan peran aktif serta kemitraan masyarakat dan dunia usaha;
13. pengelolaan panti sosial;
14. pengelolaan prasarana dan sarana Pusat Pengkajian dan Pengembangan Islam Jakarta dan Masjid milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
15. pelaksanaan kesekretariatan Dinas Sosial;
16. pelaksanaan pengelolaan prasarana dan sarana di bidang sosial;
17. pelaksanaan perencanaan, pembangunan baru/rehab total/rehab berat/rehab sedang/rehab ringan sarana dan prasarana sosial;
18. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan Dinas Sosial;
19. pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Sosial;
20. pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah.

5.4 Tujuan dan Sasaran Strategis SKPD

Tujuan Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif. Sasaran Strategis Dinas Sosial adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial;
2. Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial

5.5 Target Kinerja Strategis SKPD

Target Kinerja Strategis Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut :

Tabel 5. 1
Target Kinerja Strategis Dinas Sosial Tahun 2025

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata Indikator	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan	Capaian	Kualitas IKU		Nilai Bobot Kualitas IKU	Bobot IKU Tertimbang	Nilai Kinerja Peringkat Daerah Tertimbang	Nilai Kinerja Peringkat Daerah	Tipe Cascading* (***)
								Validitas	Kendali					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1	Peningkatan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial untuk Mewujudkan Kota yang Inklusif	INDEKS KEPUASAN PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	Survei Kepuasan terhadap Kepuasan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dengan nilai persepsi sesuai Permenpan 14 Tahun 2017 yaitu : a. Nilai 1= 25,00 - 64,99 (tidak baik); b. Nilai 2 = 65,00 - 76,60 (kurang baik); c. Nilai 3 =	4	4	Indeks	100.00 %	Exact (E)	Moderate (M)	21,00 %	100,00%	100,00%	100,00 %	Non Cascading - Indirect

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata Indikator	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan	Capaian	Kualitas IKU		Nilai Bobot Kualitas IKU	Bobot IKU Tertimbang	Nilai Kinerja Perangkat Daerah Tertimbang	Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Tipe Cascading* (***)
								Validitas	Kendali					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			76,61 - 88,30 (baik); d. Nilai 4 = 88,31 - 100,00 (sangat baik)											
2	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	INDEKS PARTISIPASI SOSIAL SDM PENYELENGGARA KESEJAHTERAAN SOSIAL	Rata-rata hitung indeks partisipasi setiap unsur SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial = $(1/n \times (i1 + i2 + i3 + i4))$. n = jumlah jenis SDM Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (Karang Taruna, Lembaga Kesejahteraan Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat, dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kelurahan. i = capaian masing-masing SDM Penyelenggara	0,9	0,92	Indeks	102.22 %	Proxy (P)	High (H)	11,00 %	100,00%	102,22%	102,22 %	Non Cascading - Indirect

No	Tujuan/Sasaran	Indikator Kinerja	Metadata Indikator	Target Tahunan	Realisasi Tahunan	Satuan	Capaian	Kualitas IKU		Nilai Bobot Kualitas IKU	Bobot IKU Tertimbang	Nilai Kinerja Perangkat Daerah Tertimbang	Nilai Kinerja Perangkat Daerah	Tipe Cascading* (***)
								Validitas	Kendali					
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
			a Kesejahteraan Sosial.											
3	Membangun Layanan Kesejahteraan Sosial yang Terintegrasi bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial	PERSENTASE PEMERLU PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL YANG BERFUNGSI SOSIAL	Jumlah PPKS yang Berfungsi Sosial dibagi dengan Jumlah PPKS yang Terdata x 100%	100	100	Persen	100.00 %	Proxy (P)	Moderate (M)	14,00 %	100,00%	100,00%	100,00 %	Non Cascading - Indirect
Capaian Kinerja Perangkat Daerah													100,00 %	
Predikat Kinerja													Sangat Tinggi	

5.6 Mekanisme Pembayaran Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2024

Berdasarkan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 31/SE/2024 tentang Pedoman Penerimaan Dan Pengeluaran Daerah Serta Penyelesaian Pekerjaan yang Tidak terselesaikan pada Akhir Tahun Anggaran 2024 Tanggal 3 Desember 2024 dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 33/SE/2024 tentang Pembayaran Pekerjaan Yang Tidak terselesaikan Pada Akhir Tahun Anggaran 2024 dan Dilanjutkan Pada Tahun Anggaran 2025 Tanggal 16 Desember 2024, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerapkan mekanisme pembayaran menggunakan Rekening Penampungan Batas Akhir Tahun Anggaran pada Tahun 2024. Rekening Penampungan Belanja Akhir Tahun Anggaran yang selanjutnya disingkat RPBATA adalah rekening khusus milik BUD untuk menampung dana atas penyelesaian pekerjaan yang direncanakan untuk diserahkan di antara batas akhir pengajuan SPM kepada Kuasa BUD sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran 2024 dan pekerjaan yang tidak terselesaikan sampai dengan tahun anggaran 2024 dan diberikan kesempatan untuk dilanjutkan pada tahun anggaran 2025. Pembayaran menggunakan RPBATA dijelaskan sebagai berikut:

- Mekanisme RPBATA diterapkan untuk pekerjaan Kontraktual umum yang serah terima pekerjaannya melalui BAST pada tanggal 20 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2025, maka pengajuan SPM-LS kontraktual ke SBPKD diajukan sebesar nilai kontrak dengan memperhitungkan penyelesaian uang muka dan/atau pembayaran tagihan/termin sebelumnya.
- Untuk melaksanakan pembayaran pekerjaan pada akhir tahun anggaran, PA/KPA/PPK menghitung sisa pekerjaan yang belum diselesaikan atau perkiraan pekerjaan yang akan diselesaikan, di antara batas akhir pengajuan SPM-LS Kontraktual kepada Kuasa BUD sampai dengan tanggal 31 Desember tahun anggaran 2024, sebagai dasar perhitungan potongan jaminan pembayaran melalui RPBATA.

- Atas sisa pekerjaan yang belum terselesaikan tersebut dihitung sebagai nilai potongan jaminan pembayaran dalam potongan SPM-LS kontraktual.
- Potongan jaminan pembayaran dalam potongan SPM-LS kontraktual sebagaimana dimaksud ditampung dalam RPBATA yang dikelola oleh SBPKD selaku Kuasa BUD sesuai lingkup wilayah kerjanya.



BAB VI

PENUTUP

BAB VI

PENUTUP

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2007, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diwajibkan menyusun Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengguna anggaran.

Laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Jajarannya per 31 Desember 2025 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005, tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 25 tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Pergub 161 Tahun 2017 tentang Kebijakan Akuntansi.

Ikhtisar laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 adalah sebagai berikut:

1. Anggaran pendapatan per 31 Desember 2025 ditetapkan sebesar Rp310.000.000,00. Realisasi pendapatan sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp387.550.000,00 atau sebesar 125,02%. Anggaran belanja per 31 Desember 2025 ditetapkan sebesar Rp1.528.262.711.913,00. Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2025 sebesar Rp1.410.162.375.009,00 atau sebesar atau 92,27%. Sehingga posisi SiKPA per 31 Desember 2025 tercatat sebesar (Rp1.409.774.825.009,00.)
2. Berdasarkan laporan operasional per 31 Desember 2025, Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta dan Unit Kerja dibawahnya memperoleh pendapatan sebesar Rp725.014.760,00 dan beban sebesar Rp1.420.730.301.715,00 sehingga defisit-LO per 31 Desember 2025 adalah sebesar

(Rp1.420.005.286.955,00).

3. Laporan perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir per 31 Desember 2025 menunjukkan ekuitas awal tahun 2025 sebesar Rp1.533.657.875.849,00, defisit-LO per 31 Desember 2025 sebesar (Rp1.420.005.286.955,00), Mutasi RK PPKD Rp1.433.234.393.942,00 dan koreksi ekuitas sebesar (Rp6.176.424.072,00) sehingga ekuitas akhir sebesar Rp1.540.710.558.764,00
4. Neraca Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025 menyajikan jumlah aset sebesar Rp1.557.636.640.761,00, kewajiban sebesar Rp16.966.291.997,00, dan ekuitas sebesar Rp1.504.655.295.656,00

Demikian laporan keuangan Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta Semester II tahun 2025 yang disusun dalam rangka pemenuhan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Jakarta, 22 Mei 2026
Kepala Dinas Sosial
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

Iqbal Akbarudin
NIP 197301151998031003



LAMPIRAN

**CATATAN ATAS LAPORAN
KEUANGAN
SEMESTER II TAHUN 2025
*AUDITED***

Lampiran 1 : Rincian Realisasi Belanja Hibah Per 31 Desember 2025

No	Nama Organisasi	Anggaran	Realisasi
1	Badan Koordinasi Dan Kegiatan Kesejahteraan Sosial	200.000.000,00	200.000.000,00
2	Forum Koordinasi Tagana Provinsi DKI Jakarta	200.000.000,00	200.000.000,00
3	Karang Taruna Provinsi DKI Jakarta	200.000.000,00	200.000.000,00
4	Forum Komunikasi Pusaka Provinsi DKI Jakarta	50.000.000,00	50.000.000,00
5	Forum Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Provinsi DKI Jakarta	200.000.000,00	200.000.000,00
6	Ikatan Pekerja Sosial Masyarakat	125.000.000,00	125.000.000,00
7	IKPNI (Ikatan Keluarga Pahlawan Nasional Indonesia)	30.000.000,00	30.000.000,00
8	Forum Koordinasi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Provinsi Dki Jakarta	25.000.000,00	25.000.000,00
9	Yayasan Cahaya Keluarga Fitrah - Rumah Autis Tanjung Priok	25.000.000,00	25.000.000,00
10	Yayasan Pelayanan Anak Dan Keluarga (Layak)	25.000.000,00	25.000.000,00
11	Yayasan Pembina Sekolah Luar Biasa Frobel Montessori	25.000.000,00	25.000.000,00
12	Yayasan Lebah Kreatif	25.000.000,00	25.000.000,00
13	Yayasan Sanggar Alquran Mardani Lima	25.000.000,00	25.000.000,00
14	Yayasan Mustika Rizqiyatul Aliyah	25.000.000,00	25.000.000,00
15	Yayasan Ummi Nurul Hasanah	25.000.000,00	25.000.000,00
16	Yayasan Bintang Pancasila	25.000.000,00	25.000.000,00
17	Yayasan Pendidikan Islam Sirojul Mubtadiin Al Fikri	25.000.000,00	25.000.000,00
18	Yayasan Insan Amalia	25.000.000,00	25.000.000,00
19	Yayasan Darussalam Al Khair	25.000.000,00	25.000.000,00
20	Yayasan Baitul Ilmi Al Falah	25.000.000,00	25.000.000,00
21	Yayasan Global Edutama Adonai	25.000.000,00	25.000.000,00
22	Yayasan Bhakti Nurul Iman	25.000.000,00	25.000.000,00
23	Yayasan Kesuma	25.000.000,00	25.000.000,00
24	Yayasan Sejahtera Insani Pejaten	25.000.000,00	25.000.000,00
25	Yayasan Pendidikan Islam Al Mubasyirin	25.000.000,00	25.000.000,00
26	Yayasan Pusaka XXXIX	25.000.000,00	25.000.000,00
27	Yayasan Pitrah Sejahtera	25.000.000,00	-
28	Yayasan Panti Asuhan Kampung Melayu	25.000.000,00	25.000.000,00
29	Yayasan Bunda Lestari	25.000.000,00	25.000.000,00
30	Yayasan Cahaya An Nadzar	25.000.000,00	25.000.000,00
31	Yayasan Syuhadah Aisyah Humaira	25.000.000,00	25.000.000,00
32	Yayasan Nur Hidayah Ulujami	25.000.000,00	25.000.000,00
33	Yayasan Daarul Berkah Rahman	25.000.000,00	-
34	Yayasan Pelita Dhuafa	25.000.000,00	25.000.000,00
35	Yayasan Al-Ikhlas Bintra	25.000.000,00	25.000.000,00
36	Yayasan Kasih Penerus Transformasi	25.000.000,00	25.000.000,00

No	Nama Organisasi	Anggaran	Realisasi
37	Yayasan Islam Al-Mubarakah Tanah Kusir	25.000.000,00	25.000.000,00
38	Yayasan Amal Saya Peduli	25.000.000,00	25.000.000,00
39	Yayasan Pendidikan Islam Yatim Piatu Darul Aitam Pondok Pinang	25.000.000,00	25.000.000,00
40	Yayasan Aksi Mata Pena	25.000.000,00	25.000.000,00
41	Yayasan Nurul Komar Jakarta Timur	25.000.000,00	25.000.000,00
42	Yayasan Pengembangan Sumber Daya Manusia Sulawesi	25.000.000,00	-
43	Yayasan Nurul Fajri Habib Abdurrahman Assegaf	25.000.000,00	25.000.000,00
44	Yayasan Minhaju Salam Al Manshurin	25.000.000,00	25.000.000,00
45	Yayasan Adz Dziki Qolbun Salim Bintaro	25.000.000,00	25.000.000,00
46	Yayasan Lembaga Prikemanusiaan Nasional Massal Ampera Penggali Api Islam Penegak Pancasila (YPAIPP)	25.000.000,00	25.000.000,00
47	Yayasan Pantu Nugraha	25.000.000,00	25.000.000,00
48	Yayasan Bersinar Tunas Bangsa	25.000.000,00	25.000.000,00
49	Yayasan Nuansa Jakarta	25.000.000,00	25.000.000,00
50	Yayasan Sedayu	25.000.000,00	25.000.000,00
51	Yayasan Abdul Assalam	25.000.000,00	25.000.000,00
52	Yayasan Perguruan Islam Al-Khairiyah	25.000.000,00	-
53	Yayasan Minhajul Muttaqin	25.000.000,00	25.000.000,00
54	Yayasan Amal Sholih Insan Harmoni (Asah)	25.000.000,00	25.000.000,00
55	Yayasan Rodhotul Azzahra	25.000.000,00	25.000.000,00
56	Yayasan Peduli Yasin Abadi	25.000.000,00	25.000.000,00
57	Yayasan Majelis Dzikir Al Qurbah	25.000.000,00	25.000.000,00
58	Yayasan Al Hidayah Darussalam	25.000.000,00	25.000.000,00
59	Yayasan Al Khoir Pondok Kelapa	25.000.000,00	25.000.000,00
60	Yayasan Nara Kreatif	25.000.000,00	25.000.000,00
61	Yayasan Barokah Dania Telasih	25.000.000,00	25.000.000,00
62	Yayasan Yatim Al Abror Palmerah	25.000.000,00	25.000.000,00
63	Yayasan Al-Gufon Jakarta	25.000.000,00	25.000.000,00
64	Yayasan Kemanggisan	25.000.000,00	25.000.000,00
65	Yayasan Lubna Azizah Ulumuha	25.000.000,00	25.000.000,00
66	Yayasan Annasiriyah Jglo	25.000.000,00	25.000.000,00
67	Yayasan Darur Rosyid Tegal Alur	25.000.000,00	25.000.000,00
68	Yayasan Arrohmah Hardi Amanah Penggilingan	25.000.000,00	25.000.000,00
69	Yayasan Sosial Alfian	25.000.000,00	25.000.000,00
70	Hibah Yayasan Pembantu Kesejahteraan Anak Yatim	25.000.000,00	25.000.000,00
71	Yayasan Al-Ittihad Harapan Jaya	25.000.000,00	25.000.000,00
72	Yayasan Al Wardah Mubarakah	25.000.000,00	25.000.000,00
73	Yayasan Maulana Yusuf	25.000.000,00	25.000.000,00
74	Yayasan Al Haq Thoriqul Jannah Cakung	25.000.000,00	25.000.000,00
75	Yayasan Pendidikan Raudatu Al-Jannah	25.000.000,00	25.000.000,00
76	Yayasan Pendidikan Pinus Blok	25.000.000,00	25.000.000,00
77	Yayasan Annur Jakarta	25.000.000,00	25.000.000,00
78	Yayasan Al Muanah Paskam	25.000.000,00	25.000.000,00
79	Yayasan Pendidikan Islam Al-Husna Rawa Buaya	25.000.000,00	25.000.000,00
80	Yayasan Iman Jelita	25.000.000,00	25.000.000,00
81	Yayasan Nurul Huda Lil Muttaqien	25.000.000,00	25.000.000,00
82	Hibah Yayasan Al Falah Kemayoran	25.000.000,00	25.000.000,00
Total		2.880.000.000,00	2.780.000.000,00

Lampiran 2 : Rincian Realisasi Belanja Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar per 31 Desember 2025

No	Jenis PKD	Alokasi		APBD-P		SP2D		Kepgub 270 th.2025	Kepgub 541 th.2025	Kepgub 1032 th.2025	Jumlah Penerima	Realisasi		Pengembalian Kasda (April 2025)	Sisa	%	Tahap	Keterangan
		Penerima Manfaat	Biaya Admin	Penerima Manfaat	Biaya Admin	Penerima Manfaat	Biaya Admin					Penerima Manfaat	Biaya Admin					
1	Kartu Lansia Jakarta (KLJ)	615.636.000.000	10.260.600.000	517.694.400.000	8.628.240.000	504.518.400.000	8.366.485.000	120.293 (Terbit 18 Maret 2025)	165.949 (Terbit 22 Juli 2025)	171.010 (Terbit 21 Nov 2025)	117.784	106.005.600.000	1.766.760.000	2.258.100.000	271.500.000	97%	1	25 Maret 2025
											114.918	34.475.400.000	574.590.000				2	25 April 2025
											114.121	34.236.300.000	570.605.000				3	23 Mei 2025
											115.662	35.976.600.000	599.610.000				4	25 Juni 2025
											160.108	48.046.200.000	800.770.000				5	25 Juli 2025
											124.188	37.267.200.000	621.120.000				6	25 Agustus 2025
											157.755	57.558.900.000	959.320.000				7	26 September 2025
											157.100	47.469.600.000	791.160.000				8	24 Oktober 2025
											168.690	50.607.000.000	843.450.000				9	25 November 2025
											167.820	50.346.000.000	839.100.000				10	24 Desember 2025
Total KLJ		625.896.600.000		526.322.640.000		512.884.885.000					501.988.800.000	8.366.485.000	2.258.100.000	271.500.000	97%			

No	Jenis PKD	Alokasi		APBD-P		SP2D		Kepgub 270 th.2025	Kepgub 541 th.2025	Kepgub 1032 th.2025	Jumlah Penerima	Realisasi		Pengembalian Kasda (April 2025)	Sisa	%	Tahap	Keterangan
		Penerima Manfaat	Biaya Admin	Penerima Manfaat	Biaya Admin	Penerima Manfaat	Biaya Admin					Penerima Manfaat	Biaya Admin					
2	Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ)	75.204.000.000	1.253.400.000	64.018.800.000	1.066.980.000	62.022.300.000	1.020.335.000	15.172 (Terbit 18 Maret 2025)	20.065 (Terbit 22 Juli 2025)	20.890 (Terbit 21 Nov 2025)	14.317	12.885.300.000	214.755.000	769.500.000	32.700.000	96%	1	25 Maret 2025
											14.023	4.206.900.000	70.115.000				2	25 April 2025
											13.950	4.185.000.000	69.750.000				3	23 Mei 2025
											14.134	4.385.700.000	73.095.000				4	25 Juni 2025
											19.516	5.857.200.000	97.620.000				5	25 Juli 2025
											18.555	5.567.100.000	92.785.000				6	25 Agustus 2025
											19.222	5.992.500.000	99.875.000				7	26 September 2025
											19.193	5.806.800.000	96.780.000				8	24 Oktober 2025
											20.593	6.177.900.000	102.965.000				9	25 November 2025
											20.519	6.155.700.000	102.595.000				10	24 Desember 2025
Total		76.457.400.000		65.085.780.000		63.042.635.000					61.220.100.000	1.020.335.000	769.500.000	32.700.000	96%			

No	Jenis PKD	Alokasi		APBD-P		SP2D		Kepgub 270 th.2025	Kepgub 541 th.2025	Kepgub 1032 th.2025	Jumlah Penerima	Realisasi		Pengembalian Kasda (April 2025)	Sisa	%	Tahap	Keterangan
		Penerima Manfaat	Biaya Admin	Penerima Manfaat	Biaya Admin	Penerima Manfaat	Biaya Admin					Penerima Manfaat	Biaya Admin					
3	Kartu Anak Jakarta (KAJ)	98.467.200.000	1.641.120.000	75.546.000.000	1.259.100.000	71.374.200.000	1.158.400.000	17.289 (Terbit 18 Maret 2025)	27.352 (Terbit 22 Juli 2025)	27.352 (Terbit 21 Nov 2025)	15.203	13.253.700.000	220.895.000	1.824.000.000	46.200.000	92%	1	25 Maret 2025
											13.468	4.040.400.000	67.340.000				2	25 April 2025
											12.848	3.854.400.000	64.240.000				3	23 Mei 2025
											12.405	3.865.200.000	64.420.000				4	25 Juni 2025
											25.519	7.657.500.000	127.625.000				5	25 Juli 2025
											22.632	6.790.200.000	113.170.000				6	25 Agustus 2025
											23.707	7.731.300.000	128.855.000				7	26 September 2025
											22.469	6.743.400.000	112.390.000				8	24 Oktober 2025
											26.443	7.932.900.000	132.215.000				9	25 November 2025
											25.450	7.635.000.000	127.250.000				10	24 Desember 2025
Total		100.108.320.000		76.805.100.000		72.532.600.000					69.504.000.000	1.158.400.000	1.824.000.000	46.200.000	92%			

Lampiran 3 : Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2025

Nama Unit Kerja	Kegiatan	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
DINAS SOSIAL	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.581.600,00	2.331.000,00	90,29%
DINAS SOSIAL	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	28.812.226,00	28.527.000,00	99,01%
DINAS SOSIAL	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	3.330.697.146,00	3.241.889.851,00	97,33%
DINAS SOSIAL	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	406.729.178,00	397.380.000,00	97,70%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	240.955.918,00	220.691.000,00	91,59%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	14.469.701,00	14.292.000,00	98,77%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.216.575,00	5.146.360,00	98,65%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	155.676.556,00	148.209.200,00	95,20%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.433.149,00	8.436.000,00	80,86%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	23.260.339,00	21.894.750,00	94,13%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	27.883.860,00	25.405.000,00	91,11%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	120.274.518,00	110.000.001,00	91,46%
PANTI SOSIAL BINA DAKSA BUDI BHAKTI 2	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	17.785.284,00	17.538.000,00	98,61%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAH KASIH	Administrasi Umum Perangkat Daerah	7.824.862,00	5.328.000,00	68,09%
PANTI SOSIAL BINA GRAHITA BELAIAH KASIH	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	300.752.818,00	260.200.650,00	86,52%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	101.468.725,00	92.640.600,00	91,30%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di dalam Panti	55.618.210,00	50.524.789,00	90,84%
PANTI SOSIAL BINA INSAN BANGUN DAYA 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	123.256.125,00	84.260.333,00	68,36%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	21.618.572,00	21.058.000,00	97,41%
PANTI SOSIAL BINA KARYA HARAPAN JAYA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	302.759.917,00	283.205.000,00	93,54%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	4.116.753,00	3.862.800,00	93,83%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	12.316.351,00	11.544.000,00	93,73%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	224.442.110,00	178.642.385,00	79,59%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	74.475.393,00	64.713.000,00	86,89%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	188.511.112,00	176.190.000,00	93,46%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	55.830.192,00	52.392.000,00	93,84%

Nama Unit Kerja	Kegiatan	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
PANTI SOSIAL BINA NETRA DAN RUNGU WICARA CAHAYA BATIN	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti	35.703.915,00	30.996.750,00	86,82%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	143.285.892,00	133.567.410,00	93,22%
PANTI SOSIAL BINA REMAJA TARUNA JAYA 2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti	34.749.909,00	32.865.990,00	94,58%
PANTI SOSIAL PERLINDUNGAN BINA KARYA HARAPAN MULIA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	225.764.365,00	174.020.250,00	77,08%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	383.447.805,00	376.031.370,00	98,07%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti	728.477.417,00	717.285.996,00	98,46%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	38.976.858,00	38.406.000,00	98,54%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-	0,00%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	0,00%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 3	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	260.626.331,00	253.801.500,00	97,38%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	20.252.638,00	19.758.000,00	97,56%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 4	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	456.699.984,00	441.532.279,00	96,68%
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	388.382.902,00	382.477.271,00	98,48%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIMASYARI	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	555.022.155,00	440.570.100,00	79,38%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2.390.420,00	1.580.640,00	66,12%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	320.585.080,00	253.133.037,00	78,96%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	13.401.297,00	9.546.000,00	71,23%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	168.724.438,00	163.225.500,00	96,74%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	295.591.940,00	277.486.125,00	93,87%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	0,00%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	674.101.524,00	625.294.283,00	92,76%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi	10.374.954,00	6.200.860,00	59,77%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	Administrasi Umum Perangkat Daerah	16.648.558,00	13.120.200,00	78,81%
UNIT PENGELOLA KAWASAN PUSAT PENGAJIAN DAN PENGEMBANGAN ISLAM JAKARTA	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	64.312.544,00	60.495.000,00	94,06%
Total		10.695.288.116,00	9.977.696.280,00	93,29%

Lampiran 4 : Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2025

Nama Unit Kerja	Kegiatan	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
DINAS SOSIAL	Pembayaran Utang Rehab Berat Gedung Panti Sosial Tresna Werdha (PSTW) Budi Mulia 4 Ciracas	709.682.000,00	709.682.000,00	100,00%
PANTI SOSIAL ASUHAN ANAK PUTRA UTAMA 1	Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Ruang Makan dan Dapur WBSPSAA Putra Utama 1	308.996.800,00	305.873.458,00	98,99%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA 3	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.338.746,00	40.265.250,00	97,40%
PUSAT DATA DAN INFORMASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	2.890.608,00	2.864.799,00	99,11%
SEKRETARIAT MASJID RAYA KH HASYIM ASY'ARI	Pemagaran Gedung Kantor Masjid Raya KH. Hasyim Asy'ari	3.291.848.000,00	2.892.638.430,00	87,87%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor SKKT Kelurahan Cengkareng Barat	1.682.209.850,00	1.569.711.553,00	93,31%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor SKKT Kelurahan Cengkareng Timur	1.382.632.250,00	1.291.255.739,00	93,39%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor SKKT Kelurahan Kalideres	1.415.918.650,00	1.322.851.504,00	93,43%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	Perawatan dan Pemeliharaan Gedung Kantor SKKT Kelurahan Srengseng	1.357.667.450,00	1.265.443.760,00	93,21%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	Pemeliharaan/ Rehab Gedung SKKT Kelurahan Kramat Pela	973.627.200,00	694.570.529,00	71,34%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	Pemeliharaan/ Rehab Gedung SKKT Kelurahan Pondok Pinang	848.803.200,00	762.097.558,00	89,78%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	Pemeliharaan/ Rehab Gedung SKKT Kelurahan Rawajati	1.323.134.400,00	1.024.908.265,00	77,46%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN	Pemeliharaan/ Rehab Gedung SKKT Kelurahan Tanjung Barat	965.305.600,00	782.533.750,00	81,07%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Rehabilitasi Gedung SKKT Kelurahan Cijantung	1.479.240.000,00	1.327.297.127,00	89,73%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR	Rehabilitasi Gedung SKKT Kelurahan Pulo Gebang	1.472.665.600,00	1.361.374.590,00	92,44%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	Rehab Pagar SKKT Tanjung Priok	378.210.560,00	303.173.813,00	80,16%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA UTARA	Rehab Sedang Gedung ULS Koja	1.314.880.000,00	1.050.100.800,00	79,86%
Total		18.949.050.914,00	16.706.642.925,00	88,17%

Lampiran 5 : Realisasi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi per 31 Desember 2025

Nama Unit Kerja	Kegiatan	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
DINASSOSIAL	Pengadaan penggantian AC Sentral Gedung Dinas Sosial	5.050.167.285,00	4.856.372.861,00	96,16%
PANTI SOSIAL BINA LARAS HARAPAN SENTOSA.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	37.468.556,00	36.996.300,00	98,74%
Total		5.087.635.841,00	4.893.369.161,00	96,18%

Lampiran 6 : Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2025

Nama Unit Kerja	Kegiatan	Anggaran Tahun 2025	Realisasi Tahun 2025	%
SUKU DINAS SOSIAL KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial UILSMERUYA	8.536.550,00	7.686.750,00	90,05%
PANTI SOSIAL TRESNA WERDHA BUDI MULIA 1	Pemberian Bimbingan Kesenian bagi WBS Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	21.192.264,00	20.868.000,00	98,47%
Total		29.728.814,00	28.554.750,00	96,05%

Lampiran 7 : Daftar Utang Belanja Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta per 31 Desember 2025

Nama UKPD	Jenis UtangBelanja	Utang per 31 Desember 2024 (Audited)	Mutasi UtangAudited 31 Desember 2024			Saldo Utang 2024 per 31 Desember	Penambahan Utang Tahun 2025	Saldo Utang Per 31 Desember 2025
			Penambahan	Pengurangan				
				Koreksi	Pembayaran			
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4-5-6)	8	9 = (7+8)
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Utang Belanja Pegawai	12.307.596.080,00	-	-	12.307.596.080,00	-	12.327.958.652,00	12.327.958.652,00
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Utang Belanja Barang	165.906.250,00	-	-	165.906.250,00	-	3.897.795.267,00	3.897.795.267,00
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Utang Belanja Jasa	632.369.643,00	-	-	632.369.643,00	-	175.930.639,00	175.930.639,00
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Utang Belanja Modal Peralatan dan Mesin	704.735.800,00	-	-	704.735.800,00	-	-	-
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Utang Belanja Modal Gedung dan	4.674.663.755,00	-	-	4.674.663.755,00	-	-	-
Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta	Utang Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	70.000.000,00	-	-	70.000.000,00	-	-	-
Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa	Utang Belanja Jasa	30.967.138,00	-	-	30.967.138,00	-	33.822.721,00	33.822.721,00
Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 1	Utang Belanja Jasa	10.167.490,00	-	-	10.167.490,00	-	17.833.282,00	17.833.282,00
Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 2	Utang Belanja Jasa	21.963.614,00	-	-	21.963.614,00	-	39.620.356,00	39.620.356,00
Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3	Utang Belanja Jasa	16.776.402,00	-	-	16.776.402,00	-	13.875.229,00	13.875.229,00
Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 1	Utang Belanja Jasa	23.115.218,00	-	-	23.115.218,00	-	24.942.021,00	24.942.021,00
Panti Sosial Bina Daksa Budi Bhakti 2	Utang Belanja Jasa	28.267.994,00	-	-	28.267.994,00	-	28.128.110,00	28.128.110,00
Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih	Utang Belanja Jasa	27.211.728,00	-	-	27.211.728,00	-	-	-

Nama UKPD	Jenis Utang Belanja	Utang per 31 Desember 2024 (Audited)	Mutasi Utang Audited 31 Desember 2024			Saldo Utang 2024 per 31 Desember	Penambahan Utang Tahun 2025	Saldo Utang Per 31 Desember 2025
			Penambahan	Pengurangan				
				Koreksi	Pembayaran			
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4-5-6)	8	9 = (7+8)
Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 1	Utang Belanja Jasa	17.711.711,00	-	-	17.711.711,00	-	18.798.434,00	18.798.434,00
Panti Sosial Bina Insan Bangun Daya 2	Utang Belanja Jasa	28.970.239,00	-	-	28.970.239,00	-	53.912.827,00	53.912.827,00
Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya	Utang Belanja Jasa	8.119.645,00	-	-	8.119.645,00	-	17.073.263,00	17.073.263,00
Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 1	Utang Belanja Jasa	14.028.603,00	-	-	14.028.603,00	-	12.649.137,00	12.649.137,00
Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2	Utang Belanja Jasa	-	-	-	-	-	-	-
Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 3	Utang Belanja Jasa	28.611.137,00	-	-	28.611.137,00	-	33.230.924,00	33.230.924,00
Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 4	Utang Belanja Jasa	21.758.124,00	-	-	21.758.124,00	-	22.025.502,00	22.025.502,00
Panti Sosial Bina Netra Dan Rungu Wicara Cahaya Batin	Utang Belanja Jasa	15.520.196,00	-	-	15.520.196,00	-	-	-
Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 1	Utang Belanja Jasa	15.823.816,00	-	-	15.823.816,00	-	24.273.584,00	24.273.584,00
Panti Sosial Bina Remaja Taruna Jaya 2	Utang Belanja Jasa	14.703.318,00	-	-	14.703.318,00	-	15.749.083,00	15.749.083,00
Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia	Utang Belanja Jasa	10.190.608,00	-	-	10.190.608,00	-	15.578.536,00	15.578.536,00
Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 1	Utang Belanja Jasa	15.548.230,00	-	-	15.548.230,00	-	-	-
Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 2	Utang Belanja Jasa	31.662.764,00	-	-	31.662.764,00	-	29.299.754,00	29.299.754,00

Nama UKPD	Jenis Utang Belanja	Utang per 31 Desember 2024 (Audited)	Mutasi Utang Audited 31 Desember 2024			Saldo Utang 2024 per 31 Desember	Penambahan Utang Tahun 2025	Saldo Utang Per 31 Desember 2025
			Penambahan	Pengurangan				
				Koreksi	Pembayaran			
1	2	3	4	5	6	7 = (3+4-5-6)	8	9 = (7+8)
Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 3	Utang Belanja Jasa	22.595.673,00	-	-	22.595.673,00	-	22.160.865,00	22.160.865,00
Panti Sosial Tresna Werdha Budi Mulia 4	Utang Belanja Jasa	13.339.600,00	-	-	13.339.600,00	-	12.821.977,00	12.821.977,00
Pusat Data Dan Informasi Kesejahteraan Sosial	Utang Belanja Jasa	246.812,00	-	-	246.812,00	-	193.034,00	193.034,00
Sekretariat Masjid Raya Kh Hasyim Asy'Ari	Utang Belanja Jasa	-	-	-	-	-	73.727.588,00	73.727.588,00
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Barat	Utang Belanja Jasa	5.312.578,00	-	-	5.312.578,00	-	6.364.260,00	6.364.260,00
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Pusat	Utang Belanja Jasa	6.177.574,00	-	-	6.177.574,00	-	8.280.971,00	8.280.971,00
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Selatan	Utang Belanja Jasa	-	-	-	-	-	11.069,00	11.069,00
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Timur	Utang Belanja Jasa	26.914.844,00	-	-	26.914.844,00	-	31.791.144,00	31.791.144,00
Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Jakarta Utara	Utang Belanja Jasa	9.304.174,00	-	-	9.304.174,00	-	8.443.768,00	8.443.768,00
Unit Pengelola Kawasan Pusat Pengkajian Dan Pengembangan Islam Jakarta	Utang Belanja Jasa	221.301.354,00	-	-	221.301.354,00	-	-	-
Total		19.241.582.112,00	-	-	19.241.582.112,00	-	16.966.291.997,00	16.966.291.997,00

Lampiran 8 : Rincian Utang Belanja Barang Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta 31 Desember 2025 dan 2024

No	Uraian	Nama Pihak Ketiga	Saldo Utang per 31 Desember 2024	Saldo Utang per 31 Desember 2025
1	Penyediaan Paket Keluarga (<i>Family Kit</i>)	Anugrah Moura Raya	-	653.110.376,00
2	Penyediaan Paket Keluarga (<i>Family Kit</i>)	Arjjana Dolok Rau	-	816.390.505,00
3	Penyediaan Paket Keluarga (<i>Family Kit</i>)	Hanastha Karya Mandiri	-	489.840.003,00
4	Penyediaan Paket Keluarga (<i>Family Kit</i>)	Jrdy Lam Jaya	-	816.400.005,00
5	Penyediaan Paket Keluarga (<i>Family Kit</i>)	Mavijoel Mulia Persada	-	486.749.763,00
6	Penyediaan Paket Anak (<i>Kids Ware</i>)	Leon Putra Fandos	-	290.649.615,00
7	Penyediaan Paket Makanan Anak Tanggap Bencana	Andhika Masrina Jaya	-	344.655.000,00
8	Penyediaan Bahan Pangan Kampung Siaga Bencana	CV Rumbi Multi Karya	165.906.250,00	-
Total			165.906.250,00	3.897.795.267,00

Lampiran 9 : Pendapatan Hibah dari Pihak Diluar Provinsi DKI Jakarta

No	Pihak Pemberi Hibah	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai
1. Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa					47.900.000,00
	Para Dermawan Charity Halim	Lemari Es	1	8.600.000,00	8.600.000,00
		A.C. Split	2	6.200.000,00	12.400.000,00
		Televisi	3	1.550.000,00	4.650.000,00
		Sound System	1	20.100.000,00	20.100.000,00
		Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	1	2.150.000,00	2.150.000,00
2. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3					10.149.000,00
	Ikatan Apoteker Indonesia Jakarta Pusat	Mesin Pengering (Dryer Machine) 10 Kg, Merk Samsung, Tipe Dv10Bb9440G/Wh Sebanyak 1 Unit	1	10.149.000,00	10.149.000,00
3. Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih					54.944.375,00
	Bapak Suarno	Trolly Car/Lori	1	2.199.000,00	2.199.000,00
	Bapak Okto	Mesin Pompa air PMK	1	1.595.000,00	1.595.000,00
	Bapak Saiful Azhhar	Alat Penghancur Kertas	1	1.688.500,00	1.688.500,00
	Bapak Mariono Wadi	Tempat Tidur Besi	2	6.125.000,00	12.250.000,00
	Ibu Megi	A.C. Split	1	3.800.000,00	3.800.000,00
	PT. Permata Hijau Sawit	Televisi	1	16.380.000,00	16.380.000,00
	Ibu Ingri	Lemari Obat (Kaca)	1	7.845.000,00	7.845.000,00
	Komunitas Chinese	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	5	1.095.000,00	5.475.000,00
	Ibu Dian	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	1	3.000.000,00	3.000.000,00
	Ibu Stasia Febiany	Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain)	1	711.875,00	711.875,00
4. Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin					108.990.000,00
	Bank Indonesia	Laptop ASUS/Vivobook 14	10	10.899.000,00	108.990.000,00
5. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2					47.009.000,00
		Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	1	1.120.000,00	1.120.000,00
		Televisi	1	6.275.000,00	6.275.000,00
		A.C. Split	1	5.897.000,00	5.897.000,00
		Mesin Cuci	1	4.250.000,00	4.250.000,00
		Televisi	1	7.190.000,00	7.190.000,00
		Mesin Cuci	1	4.809.000,00	4.809.000,00
		Mesin Pompa Air PMK	1	2.250.000,00	2.250.000,00
		A.C. Split	1	5.681.000,00	5.681.000,00
		A.C. Split	1	4.750.000,00	4.750.000,00
		A.C. Split	1	4.787.000,00	4.787.000,00

No	Pihak Pemberi Hibah	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai
6. Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia					5.642.000,00
		Mic Wireless, merk Shure	1	557.000,00	557.000,00
		Tablet Android, merk Infinix	1	2.452.500,00	2.452.500,00
		Televisi, merk Coocaa	1	2.632.500,00	2.632.500,00
7. Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya					76.985.435,00
	Bank Indonesia	Pompa Air	1	5.000.000,00	5.000.000,00
		Mesin Las Listrik	1	1.392.000,00	1.392.000,00
		Mesin Gerinda Tangan	1	394.000,00	394.000,00
		Mesin Bor Tangan	1	728.900,00	728.900,00
		Steam Cleaner	1	3.000.000,00	3.000.000,00
		Steam Cleaner	1	1.060.000,00	1.060.000,00
		LCD Projector/Infocus	1	4.675.000,00	4.675.000,00
		Kursi Putar	1	2.960.000,00	2.960.000,00
		Mesin Pemotong Rumput	1	1.785.000,00	1.785.000,00
		A.C. Split	1	5.720.000,00	5.720.000,00
		A.C. Split	1	5.720.000,00	5.720.000,00
		Televisi	1	2.649.000,00	2.649.000,00
		Sound System	1	25.026.500,00	25.026.500,00
		Megaphone	1	4.995.000,00	4.995.000,00
		Mimbar/Podium	1	1.583.010,00	1.583.010,00
		Spray Gun	1	915.400,00	915.400,00
		Lap Top	1	7.800.000,00	7.800.000,00
		Aerator	1	384.625,00	384.625,00
		Alat Badminton	1	399.000,00	399.000,00
		Alat Badminton	1	399.000,00	399.000,00
		Alat Badminton	1	399.000,00	399.000,00
Total					351.619.810,00

Lampiran 10 : Lain-lain PAD yang Sah

No	Pihak Pemberi Hibah	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
1. Panti Sosial Asuhan Anak Balita Tunas Bangsa					47.900.000,00	9.580.000,00	38.320.000,00
	Para Dermawan Charity Halim	Lemari Es	1	8.600.000,00	8.600.000,00	1.720.000,00	6.880.000,00
		A.C. Split	2	6.200.000,00	12.400.000,00	2.480.000,00	9.920.000,00
		Televisi	3	1.550.000,00	4.650.000,00	930.000,00	3.720.000,00
		Sound System	1	20.100.000,00	20.100.000,00	4.020.000,00	16.080.000,00
		Alat Pemanas Prosesing (Water Heater)	1	2.150.000,00	2.150.000,00	430.000,00	1.720.000,00
2. Panti Sosial Asuhan Anak Putra Utama 3					10.149.000,00	-	10.149.000,00
	Ikatan Apoteker Indonesia Jakarta Pusat	Mesin Pengering (Dryer Machine) 10 Kg, Merk Samsung, Tipe Dv10Bb9440G/Wh Sebanyak 1 Unit	1	10.149.000,00	10.149.000,00	-	10.149.000,00
3. Panti Sosial Bina Grahita Belaian Kasih					54.944.375,00	-	54.944.375,00
	Bapak Suarno	Trolly Car/Lori	1	2.199.000,00	2.199.000,00	-	2.199.000,00
	Bapak Okto	Mesin Pompa air PMK	1	1.595.000,00	1.595.000,00	-	1.595.000,00
	Bapak Saiful Azhhar	Alat Penghancur Kertas	1	1.688.500,00	1.688.500,00	-	1.688.500,00
	Bapak Mariono Wadi	Tempat Tidur Besi	2	6.125.000,00	12.250.000,00	-	12.250.000,00
	Ibu Megi	A.C. Split	1	3.800.000,00	3.800.000,00	-	3.800.000,00
	PT. Permata Hijau Sawit	Televisi	1	16.380.000,00	16.380.000,00	-	16.380.000,00
	Ibu Ingri	Lemari Obat (Kaca)	1	7.845.000,00	7.845.000,00	-	7.845.000,00
	Komunitas Chinese	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	5	1.095.000,00	5.475.000,00	-	5.475.000,00
	Ibu Dian	Wheel Chair (Alat Kesehatan Rehabilitasi Medis)	1	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
	Ibu Stasia Febiany	Timbangan Badan (Alat Kesehatan Umum Lain)	1	711.875,00	711.875,00	-	711.875,00
4. Panti Sosial Bina Netra dan Rungu Wicara Cahaya Batin					108.990.000,00	21.798.000,00	87.192.000,00
	Bank Indonesia	Laptop ASUS Vivobook 14	10	10.899.000,00	108.990.000,00	21.798.000,00	87.192.000,00

No	Pihak Pemberi Hibah	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
5. Panti Sosial Bina Laras Harapan Sentosa 2					47.009.000,00	7.062.850,00	39.946.150,00
		Mesin Cuci kendaraan/ Car Washer	1	1.120.000,00	1.120.000,00	140.000,00	980.000,00
		Televisi	1	6.275.000,00	6.275.000,00	1.255.000,00	5.020.000,00
		A.C. Split	1	5.897.000,00	5.897.000,00	1.179.400,00	4.717.600,00
		Mesin Cuci	1	4.250.000,00	4.250.000,00	850.000,00	3.400.000,00
		Televisi	1	7.190.000,00	7.190.000,00	1.438.000,00	5.752.000,00
		Mesin Cuci	1	4.809.000,00	4.809.000,00	961.800,00	3.847.200,00
		Mesin Pompa Air PMK	1	2.250.000,00	2.250.000,00	281.250,00	1.968.750,00
		A.C. Split	1	5.681.000,00	5.681.000,00	-	5.681.000,00
		A.C. Split	1	4.750.000,00	4.750.000,00	-	4.750.000,00
		A.C. Split	1	4.787.000,00	4.787.000,00	957.400,00	3.829.600,00
6. Panti Sosial Perlindungan Bina Karya Harapan Mulia					5.642.000,00	-	5.642.000,00
		Mic Wireless, merk Shure	1	557.000,00	557.000,00	-	557.000,00
		Tablet Android, merk Infinix	1	2.452.500,00	2.452.500,00	-	2.452.500,00
		Televisi, merk Coocaa	1	2.632.500,00	2.632.500,00	-	2.632.500,00
7. Panti Sosial Bina Karya Harapan Jaya					101.271.235,00	-	101.271.235,00
	Bank Indonesia	Pompa Air	1	5.000.000,00	5.000.000,00	-	5.000.000,00
		Mesin Las Listrik	1	1.392.000,00	1.392.000,00	-	1.392.000,00
		Mesin Gerinda Tangan	1	394.000,00	394.000,00	-	394.000,00
		Mesin Bor Tangan	1	728.900,00	728.900,00	-	728.900,00
		Steam Cleaner	1	3.000.000,00	3.000.000,00	-	3.000.000,00
		Steam Cleaner	1	1.060.000,00	1.060.000,00	-	1.060.000,00
		LCD Projector/ Infocus	1	4.675.000,00	4.675.000,00	-	4.675.000,00
		Kursi Putar	1	2.960.000,00	2.960.000,00	-	2.960.000,00
		Mesin Pemotong Rumput	1	1.785.000,00	1.785.000,00	-	1.785.000,00
		A.C. Split	2	5.720.000,00	11.440.000,00	-	11.440.000,00
		Televisi	1	2.649.000,00	2.649.000,00	-	2.649.000,00
		Sound System	1	25.026.500,00	25.026.500,00	-	25.026.500,00

No	Pihak Pemberi Hibah	Uraian	Kuantitas	Harga Satuan	Nilai	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Bank Indonesia	Megaphone	1	4.995.000,00	4.995.000,00	-	4.995.000,00
		Mimbar/Podium	1	1.583.010,00	1.583.010,00	-	1.583.010,00
		Spray Gun	1	915.400,00	915.400,00	-	915.400,00
		Lap Top	1	7.800.000,00	7.800.000,00	-	7.800.000,00
		Aerator	1	384.625,00	384.625,00	-	384.625,00
		Alat Badminton	3	399.000,00	1.197.000,00	-	1.197.000,00
		Drum	1	18.650.000,00	18.650.000,00	-	18.650.000,00
		Shuttle Cock	3	175.000,00	525.000,00	-	525.000,00
		Bola Voli	3	127.500,00	382.500,00	-	382.500,00
		Jack	8	50.000,00	400.000,00	-	400.000,00
		Ember Plastik	8	154.350,00	1.234.800,00	-	1.234.800,00
		Net Tennis Meja	1	47.000,00	47.000,00	-	47.000,00
		Bola Futsal	3	126.500,00	379.500,00	-	379.500,00
		Senar	15	110.000,00	1.650.000,00	-	1.650.000,00
		Senar	10	90.000,00	900.000,00	-	900.000,00
	Net Bola Volly	1	117.000,00	117.000,00	-	117.000,00	
Total					375.905.610,00	38.440.850,00	337.464.760,00